

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan entitas anaknya

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Maret 2021 (tidak diaudit) dan untuk periode tiga bulan
yang berakhir pada tanggal tersebut (tidak diaudit)

**Surat Pernyataan Direksi
mengenai Tanggung Jawab Direksi untuk**

**Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Maret 2021
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (tidak diaudit)
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya**

Atas nama Direksi, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Ririek Adriansyah
Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
Alamat Domisili : Jl. Karang Tengah Raya Pertanian I/99 RT 005 RW 004
Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (022) 452 7101
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Heri Supriadi
Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
Alamat Domisili : Jl. Rancamayar No. 18 RT 001 RW 008
Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal, Bandung
Nomor Telepon : (022) 452 7201/021 520 9824
Jabatan : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

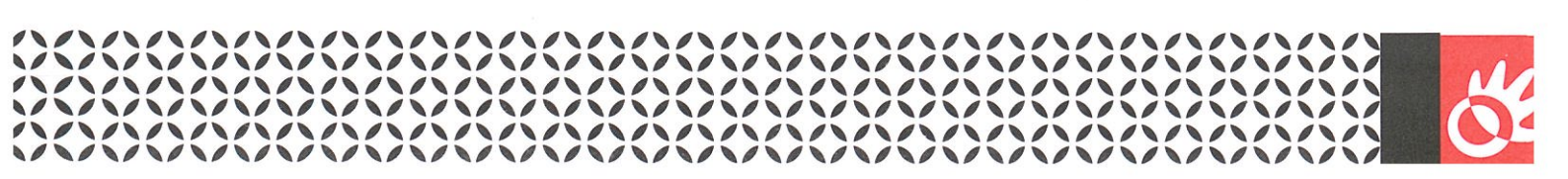
menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan") dan entitas anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak telah dipersiapkan dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. Seluruh informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak ini telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Juni 2021


Ririek Adriansyah **Heri Supriadi**
Direktur Utama Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 MARET 2021
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (TIDAK DIAUDIT)**

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3 - 4
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6-121

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2020 (diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	Catatan	31 Maret 2021	31 Desember 2020
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	3,33,38	31.729	20.589
Aset keuangan lancar lainnya	4,33,38	1.198	1.303
Piutang usaha			
Pihak berelasi	5,33,38	1.473	1.644
Pihak ketiga	5	10.907	9.695
Aset kontrak	6,33,38	1.098	1.036
Piutang lain-lain	38	278	214
Persediaan	7	901	983
Biaya kontrak	9	531	454
Pajak dibayar di muka	28a	2.863	3.170
Tagihan restitusi pajak	28b	745	854
Aset lancar lainnya	8,33	6.340	6.561
Jumlah Aset Lancar		<u>58.063</u>	<u>46.503</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset kontrak	6,33,38	209	203
Penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan	10,38	4.307	4.045
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi	11	176	192
Biaya kontrak	9	1.429	1.254
Aset tetap	12,36	159.887	160.923
Aset hak guna	13	17.388	18.566
Aset takberwujud	15	6.941	6.846
Aset pajak tangguhan - bersih	28f	3.533	3.578
Aset tidak lancar lainnya	14,28,33,38	5.915	4.833
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>199.785</u>	<u>200.440</u>
JUMLAH ASET		<u>257.848</u>	<u>246.943</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	16,38		
Pihak berelasi	33	874	928
Pihak ketiga		15.137	16.071
Liabilitas kontrak	18a,33	7.223	7.834
Utang lain-lain	38	711	578
Utang pajak	28c	4.568	2.713
Beban yang masih harus dibayar	17,33,38	14.521	14.265
Deposit pada pelanggan	33	2.500	2.024
Utang bank jangka pendek	19a,33,38	12.191	9.934
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	19b,33,38	8.381	9.350
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun	13,38	6.451	5.396
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>72.557</u>	<u>69.093</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	28f	692	561
Liabilitas kontrak	18b,33	1.103	1.004
Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja	32	1.252	1.254
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pascakerja lainnya	31	13.133	12.976
Pinjaman jangka panjang dan pinjaman lainnya	20,33,38	33.418	30.561
Liabilitas sewa	13,38	7.567	10.221
Liabilitas Lainnya		228	384
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>57.393</u>	<u>56.961</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>129.950</u>	<u>126.054</u>
EKUITAS			
Modal saham	22	4.953	4.953
Tambahan modal disetor		2.711	2.711
Komponen ekuitas lainnya	23	467	374
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	30	15.337	15.337
Belum ditentukan penggunaannya		85.165	79.152
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk - bersih		108.633	102.527
Kepentingan non-pengendali	21	19.265	18.362
JUMLAH EKUITAS		<u>127.898</u>	<u>120.889</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>257.848</u>	<u>246.943</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021	2020
PENDAPATAN	24,33	33.945	34.194
BIAYA DAN BEBAN			
Beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	26,33	(8.452)	(8.252)
Beban penyusutan dan amortisasi	12,13,15	(7.286)	(6.849)
Beban karyawan	25	(3.500)	(3.451)
Beban interkoneksi	33	(1.136)	(1.519)
Beban umum dan administrasi	27,33	(1.293)	(1.572)
Beban pemasaran	33	(755)	(641)
Laba selisih kurs - bersih		78	205
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih		98	(186)
LABA USAHA		11.699	11.929
Penghasilan pendanaan	33	153	219
Biaya pendanaan	33	(982)	(1.215)
Rugi bersih entitas asosiasi	11	(54)	(9)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		10.816	10.924
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	28d		
Pajak kini		(2.243)	(2.831)
Pajak tangguhan		(186)	208
		<u>(2.429)</u>	<u>(2.623)</u>
LABA PERIODE BERJALAN		8.387	8.301
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
<i>Penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	23	93	419
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi	11	-	4
<i>Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>			
Rugi aktuarial - bersih	31	(1)	-
Penghasilan komprehensif lain - bersih		<u>92</u>	<u>423</u>
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		8.479	8.724
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		6.014	5.862
Kepentingan nonpengendali	21	2.373	2.439
		<u>8.387</u>	<u>8.301</u>
Jumlah laba komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		6.106	6.285
Kepentingan nonpengendali		2.373	2.439
		<u>8.479</u>	<u>8.724</u>
LABA PER SAHAM DASAR			
(dalam jumlah penuh)	29		
Laba bersih per saham		60,71	59,17
Laba bersih per ADS (100 saham Seri B per ADS)		6.070,93	5.917,49

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Diatribusikan kepada pemilik entitas induk							
Uraian	Catatan	Modal Saham	Tambahkan modal disetor	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba			Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
					Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	Jumlah bersih		
Saldo, 1 Januari 2021		4.953	2.711	374	15.337	79.152	102.527	18.362	120.889
Transaksi entitas sepengendali		-	-	-	-	-	-	-	-
Penyesuaian kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	(70)	(70)
Dividen kas	30	-	-	-	-	-	-	(1.400)	(1.400)
Laba periode berjalan	21	-	-	-	-	6.014	6.014	2.373	8.387
Penghasilan komprehensif lain - bersih		-	-	93	-	(1)	92	-	92
Saldo, 31 Maret 2021		4.953	2.711	467	15.337	85.165	108.633	19.265	127.898

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
 untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 (tidak diaudit)
 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk							
		Modal Saham	Tambahan modal disetor	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba		Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas	
					Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	Jumlah bersih		
Saldo, 31 Desember 2019		4.953	2.711	408	15.337	76.152	99.561	17.689	117.250
Dampak penerapan standar akuntansi baru		-	-	(48)	-	649	601	(47)	554
Saldo, 1 Januari 2020		4.953	2.711	360	15.337	76.801	100.162	17.642	117.804
Penyesuaian kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	69	69
Dividen kas	30	-	-	-	-	-	-	(50)	(50)
Laba periode berjalan	21	-	-	-	-	5.862	5.862	2.439	8.301
Penghasilan komprehensif lain - bersih		-	-	419	-	4	423	-	423
Saldo, 31 Maret 2020		4.953	2.711	779	15.337	82.667	106.447	20.100	126.547

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021	2020
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan dan operator lain		32.141	29.273
Penerimaan restitusi pajak		650	1.816
Penerimaan dari pendapatan bunga		153	209
Pembayaran kas untuk beban		(9.070)	(8.625)
Pembayaran pajak penghasilan badan dan final		(735)	(1.364)
Pembayaran kas kepada karyawan		(2.534)	(2.492)
Pembayaran beban bunga		(1.080)	(1.229)
Pembayaran sewa jangka pendek dan bernilai rendah	13	(1.007)	(909)
Penerimaan (pembayaran) pajak pertambahan nilai - bersih		(477)	365
Penerimaan (pembayaran) kas lainnya - bersih		(608)	559
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi		17.433	17.603
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI			
Hasil dari penjualan aset tetap	12	147	45
Hasil dari klaim asuransi	12	85	3
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	11	-	5
Pembelian aset tetap	12,40	(5.974)	(4.051)
Penambahan penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan	10	(301)	(52)
Pembelian aset takberwujud	15,40	(606)	(736)
(Penempatan pada) hasil dari aset keuangan lancar lainnya - bersih		102	(411)
Penambahan penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi	11	(42)	-
(Kenaikan) penurunan uang muka dan aset lainnya - bersih		(174)	108
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi		(6.763)	(5.089)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Pencairan utang bank dan pinjaman lainnya	19,20	10.112	1.533
Pembayaran utang bank dan pinjaman lainnya	19,20	(5.979)	(6.064)
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham nonpengendali entitas anak	21	(1.400)	(50)
Pembayaran kewajiban sewa	13	(2.366)	(2.269)
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan		367	(6.850)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		11.037	5.664
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS		103	459
PENYISIHAN KERUGIAN KREDIT EKSPEKTASIAN		(0)	(0)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	3	20.589	18.242
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	3	31.729	24.365

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("Perusahaan") pada mulanya merupakan bagian dari "*Post en Telegraafdienst*", yang didirikan dan beroperasi secara komersial pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884.

Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara ("Persero"). Entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") (Catatan 1c dan 22).

Perusahaan didirikan berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 210. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dilakukan sehubungan dengan adanya kebutuhan Perusahaan untuk menyesuaikan kegiatan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") serta untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemandirian Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No. 32 tanggal 21 Juni 2019. Perubahan telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan surat No. AHU-0032595.AH.01.02 tanggal 24 Juni 2019.

Pada tahun 2020, Perusahaan, sesuai dengan Anggaran Dasar mengubah nama Perusahaan menjadi Perseroan Terbatas (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. atau disingkat PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. di Bursa Efek Indonesia.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2019, Perusahaan melakukan perubahan susunan pengurus Perusahaan, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn. No 12 tanggal 10 Juli 2020. Perubahan susunan pengurus telah diterima oleh Menkumham berdasarkan surat AHU-AH.01.03-0291419 tanggal 16 Juli 2020.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi dan informatika, serta optimalisasi sumber daya Perusahaan untuk menyediakan barang dan/atau jasa berkualitas tinggi dan kompetitif untuk mendapatkan/mengejar laba guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip Perusahaan Terbatas. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perusahaan menjalankan kegiatan yang secara umum meliputi:

i. Usaha utama:

- (a) Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau menjual atau menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang luas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang luas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

ii. Usaha penunjang:

- (a) Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.
- (b) Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, yang antara lain pemanfaatan aset tetap dan aset bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.
- (c) Bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi sumber daya informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain pelaku industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jalan Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Perusahaan memiliki beberapa izin penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa dari Pemerintah yang berlaku sampai jangka waktu yang tidak terbatas selama Perusahaan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin-izin tersebut. Untuk setiap izin, yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika ("Menkominfo"), evaluasi dilakukan setiap tahun dan evaluasi menyeluruh dilakukan setiap lima tahun. Perusahaan wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa berdasarkan izin-izin tersebut diatas setiap tahun kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika ("DJPPPI") sebelumnya Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ("DJPT").

Laporan tersebut meliputi beberapa informasi seperti kemajuan pengembangan jaringan, pencapaian standar kualitas jasa, jumlah pelanggan, pembayaran biaya atas hak penyelenggaraan, dan kontribusi pelayanan universal, sementara untuk Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik, Jasa Interkoneksi Internet, dan Jasa Akses Internet terdapat tambahan informasi yang dipersyaratkan seperti kinerja operasi, segmen pelanggan, lalu lintas, dan pendapatan kotor.

Rincian izin-izin tersebut adalah sebagai berikut:

Izin	No. Izin	Jenis jasa	Tanggal penetapan/ perpanjangan
Izin penerbit uang elektronik	Izin Bank Indonesia 11/432/DSAP	Penerbit uang elektronik	3 Juli 2009
Izin penyelenggaraan pengiriman uang	Izin Bank Indonesia 11/23/bd/8	Penyelenggaraan pengiriman uang	5 Agustus 2009
Izin penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik	127/KEP/DJPPPI/ KOMINFO/3/2016	Jasa internet teleponi untuk keperluan publik	30 Maret 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh	839/KEP/M.KOMINFO/ 05/2016	Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh	16 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup	844/KEP/M.KOMINFO/ 05/2016	Jaringan tetap tertutup	16 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional	846/KEP/M.KOMINFO/ 05/2016	Jaringan tetap sambungan internasional	16 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis <i>circuit switched</i>	948/KEP/M.KOMINFO/ 05/2016	Jaringan tetap lokal berbasis <i>circuit switched</i>	31 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data	191/KEP/DJPPPI/ KOMINFO/10/2016	Jasa sistem komunikasi data	31 Oktober 2016

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Izin	No. Izin	Jenis jasa	Tanggal penetapan/ perpanjangan
Izin penyelenggaraan jasa akses internet	2176/KEP/M.KOMINFO/12/2016	Jasa akses internet	30 Desember 2016
Izin penyelenggaraan jasa penyediaan konten	1040/KEP/M.KOMINFO/16/2017 1004/KEP/	Jasa penyediaan konten	16 Mei 2017
Izin penyelenggaraan jasa interkoneksi internet	M.KOMINFO/2018	Jasa interkoneksi internet	26 Desember 2018

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Corporate Secretary, Internal Audit, dan Karyawan

i. Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan keputusan yang dibuat pada RUPST yang dinyatakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. No. 12 tanggal 10 Juli 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, masing-masing adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Rhenald Kasali	Rhenald Kasali
Komisaris	Alex Denni	Alex Denni
Komisaris	Rizal Mallarangeng	Rizal Mallarangeng
Komisaris	Ahmad Fikri Assegaf	Ahmad Fikri Assegaf
Komisaris	Ismail	Ismail
Komisaris	Marcelino Rumambo Pandin	Marcelino Rumambo Pandin
Komisaris Independen	Marsudi Wahyu Kisworo	Marsudi Wahyu Kisworo
Komisaris Independen	Wawan Iriawan	Wawan Iriawan
Komisaris Independen	Chandra Arie Setiawan	Chandra Arie Setiawan
Direktur Utama	Ririek Adriansyah	Ririek Adriansyah
Direktur Keuangan	Heri Supriadi	Heri Supriadi
Direktur <i>Digital Business</i>	Muhamad Fajrin Rasyid	Muhamad Fajrin Rasyid
Direktur <i>Strategic Portfolio</i>	Budi Setyawan Wijaya	Budi Setyawan Wijaya
Direktur <i>Enterprise and Business Service</i>	Edi Witjara	Edi Witjara
Direktur <i>Wholesale and International Services</i>	Dian Rachmawan	Dian Rachmawan
Direktur <i>Human Capital Management</i>	Afriwandi	Afriwandi
Direktur <i>Network, Information Technology and Solution</i>	Herlan Wijanarko	Herlan Wijanarko
Direktur <i>Consumer Service</i>	FM Venusiana R	FM Venusiana R

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Corporate Secretary, Internal Audit, dan Karyawan (lanjutan)

ii. Komite Audit, Corporate Secretary, dan Internal Audit

Susunan Komite Audit, Corporate Secretary, dan Internal Audit Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Ketua	Chandra Arie Setiawan	Chandra Arie Setiawan
Anggota	Marsudi Wahyu Kisworo	Marsudi Wahyu Kisworo
Anggota	Wawan Iriawan	Wawan Iriawan
Anggota	Marcelino Rumambo Pandin	Marcelino Rumambo Pandin
Anggota	Sarimin Mietra Sardi	Sarimin Mietra Sardi
Anggota	Ahmad Fikri Assegaf	Ahmad Fikri Assegaf
Anggota	Emmanuel Bambang Suyitno	Emmanuel Bambang Suyitno
Corporate Secretary	Andi Setiawan	Andi Setiawan
Internal Audit	Harry Suseno Hadisoebroto	Harry Suseno Hadisoebroto

iii. Karyawan

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak ("Grup") pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah 24.276 orang dan 25.348 orang.

c. Penawaran umum efek Perusahaan

Jumlah saham Perusahaan sesaat sebelum penawaran umum perdana (*Initial Public Offering* atau "IPO") adalah 8.400.000.000, yang terdiri dari 8.399.999.999 saham Seri B dan 1 saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah. Pada tanggal 14 November 1995, Pemerintah menjual saham Perusahaan yang terdiri dari 933.333.000 saham baru Seri B dan 233.334.000 saham Seri B milik Pemerintah kepada masyarakat melalui IPO di Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan penawaran dan pencatatan di Bursa Efek New York ("NYSE") dan Bursa Efek London ("LSE") atas 700.000.000 saham Seri B milik Pemerintah dalam bentuk *American Depositary Shares* ("ADS"). Terdapat 35.000.000 ADS dan masing-masing ADS mewakili 20 saham Seri B pada saat itu.

Pada bulan Desember 1996, Pemerintah menjual saham Perusahaan sebanyak 388.000.000 saham Seri B dan selanjutnya pada tahun 1997, Pemerintah membagikan 2.670.300 saham Seri B sebagai insentif bagi para pemegang saham Perusahaan yang tidak menjual sahamnya selama satu tahun terhitung sejak tanggal IPO. Pada bulan Mei 1999, Pemerintah kembali menjual 898.000.000 saham Seri B.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada RUPST Perusahaan tanggal 16 April 1999, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan yang berasal dari kapitalisasi sebagian tambahan modal disetor melalui pembagian saham bonus sejumlah 746.666.640 lembar saham. Pembagian saham bonus kepada para pemegang saham Perusahaan dilakukan pada bulan Agustus 1999. Pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diamandemen dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku efektif pada tanggal yang sama. Pemberlakuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tidak berdampak terhadap penawaran umum efek Perusahaan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut.

Pada bulan Desember 2001, Pemerintah menjual 1.200.000.000 saham atau 11,9% dari jumlah saham Seri B yang beredar. Pada bulan Juli 2002, Pemerintah kembali menjual 312.000.000 saham atau 3,1% dari jumlah saham Seri B yang beredar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M. No. 26 tanggal 30 Juli 2004, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 2. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp500 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dan 1 saham Seri B dengan nilai nominal Rp250. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B, dan jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 10.079.999.639 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 40 saham Seri B.

Pada Rapat Umum Luar Biasa ("RUPSLB") yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2005 dan RUPST pada tanggal 29 Juni 2007, 20 Juni 2008, dan 19 Mei 2011, para pemegang saham Perusahaan menyetujui masing-masing rencana tahap I, II, III, dan IV program Perusahaan untuk membeli kembali saham Seri B yang telah diterbitkan.

Selama periode 21 Desember 2005 sampai dengan 20 Juni 2007, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali 211.290.500 saham dari publik (program pembelian kembali saham tahap I). Pada tanggal 30 Juli 2013, Perusahaan telah menjual seluruh saham tersebut.

Pada RUPST tanggal 19 April 2013, sebagaimana diaktakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, SH, M.Kn., No. 38 tanggal 19 April 2013, para pemegang saham menyetujui perubahan rencana Perusahaan atas treasury stock yang diakuisisi dalam tahap III.

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 April 2013 yang dinyatakan dalam akta notaris No. 38 tanggal 19 April 2013 oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 5. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp50 dan 4 saham Seri B dengan nilai nominal Rp50. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 399.999.999.999 saham Seri B. Jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 100.799.996.399 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 200 saham Seri B. Efektif tanggal 26 Oktober 2016, Perusahaan melakukan perubahan rasio *Depositary Receipt* dari 1 ADS mewakili 200 saham Seri B menjadi 1 ADS mewakili 100 saham Seri B (Catatan 22). Informasi laba bersih per ADS pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian telah disesuaikan dengan perubahan rasio ini.

Pada tanggal 16 Mei dan 5 Juni 2014, Perusahaan telah melakukan pembatalan pencatatan pada Bursa Efek Tokyo ("TSE") dan *delisting* pada LSE.

Pada tanggal 31 Maret 2021, seluruh saham Seri B Perusahaan telah dicatitkan pada BEI dan 38.161.127 ADS telah dicatitkan pada NYSE (Catatan 22).

Pada tanggal 16 Juni 2015, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp2.200 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, Rp2.100 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun, Rp1.200 miliar untuk Seri C yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun dan Rp1.500 miliar untuk Seri D yang berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dicatitkan di BEI (Catatan 20b.i).

Pada tanggal 21 Desember 2015, Perusahaan menjual sisa saham treasury tahap III.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 29 Juni 2016, Perusahaan menjual saham treasury tahap IV.

Pada RUPST tanggal 27 April 2018 yang diaktakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. No. 54, para pemegang saham menyetujui pembatalan 1.737.779.800 saham treasury dengan mengurangi modal saham Perseroan.

d. Entitas anak

Pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, Perusahaan telah mengkonsolidasikan laporan keuangan semua entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut (Catatan 2b dan 2d):

i. Entitas anak dengan kepemilikan langsung:

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			31 Maret 2021	31 Desember 2020	31 Maret 2021	31 Desember 2020
PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - operator fasilitas telekomunikasi dan jasa telepon seluler menggunakan teknologi Global System for Mobile Communication ("GSM")/ 26 Mei 1995	1995	65	65	107.596	103.652
PT Dayamitra Telekomunikasi ("Dayamitra"), Jakarta, Indonesia	Penyewaan menara telekomunikasi dan jasa telekomunikasi lainnya/ 17 Mei 2001	1995	100	100	37.868	25.368
PT Multimedia Nusantara ("Metra"), Jakarta, Indonesia	Jasa jaringan telekomunikasi dan multimedia/ 9 Mei 2003	1998	100	100	17.545	17.708
PT Telekomunikasi Indonesia International ("TII"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi/ 31 Juli 2003	1995	100	100	12.504	12.187
PT Graha Sarana Duta ("GSD"), Jakarta, Indonesia	Penyewaan kantor dan manajemen gedung dan jasa pemeliharaan, konsultan sipil, dan pengembang/ 25 April 2001	1982	100	100	6.115	6.163
PT Telkom Satelit Indonesia ("Telkomsat"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - menyediakan sistem komunikasi satelit, jasa dan sarana terkait/ 28 September 1995	1996	100	100	4.945	4.484
PT Telkom Akses ("Telkom Akses"), Jakarta, Indonesia	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi/ 26 November 2012	2013	100	100	3.962	4.154
PT PINS Indonesia ("PINS"), Jakarta, Indonesia	Jasa dan pembangunan telekomunikasi/ 15 Agustus 2002	1995	100	100	1.653	1.868
PT Metra-Net ("Metra-Net"), Jakarta, Indonesia	Jasa portal multimedia/ 17 April 2009	2009	100	100	1.549	1.320
PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia ("Telkom Infratel"), Jakarta, Indonesia	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi/ 16 Januari 2014	2014	100	100	1.119	1.074

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

i. Entitas anak dengan kepemilikan langsung (lanjutan):

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			31 Maret 2021	31 Desember 2020	31 Maret 2021	31 Desember 2020
PT Napsindo Primatel Internasional ("Napsindo"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - menyediakan <i>Network</i> , Access Point ("NAP"), <i>Voice Over Data</i> ("VOD"), dan jasa terkait lainnya/ 29 Desember 1998	1999; berhenti beroperasi pada tanggal 13 Januari 2006	60	60	5	5

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.

ii. Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung:

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			31 Maret 2021	31 Desember 2020	31 Maret 2021	31 Desember 2020
PT Sigma Cipta Caraka ("Sigma"), Tangerang, Indonesia	Jasa teknologi informatika - implementasi dan integrasi sistem, <i>outsourcing</i> , dan pemeliharaan lisensi piranti lunak/ 1 Mei 1987	1988	100	100	5.765	6.031
PT Metra Digital Investama ("MDI"), Jakarta, Indonesia	Jasa perdagangan informasi dan teknologi multimedia, hiburan dan investasi/ 8 Januari 2013	2013	100	100	3.450	3.461
Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., ("Telin Singapore"), Singapore	Telekomunikasi/ 6 Desember 2007	2008	100	100	3.434	3.320
Telekomunikasi Indonesia International Ltd. ("Telin Hong Kong"), Hong Kong	Telekomunikasi/ 8 Desember 2010	2010	100	100	3.106	2.652
PT Infomedia Nusantara ("Infomedia"), Jakarta, Indonesia	Jasa data dan informasi - menyediakan jasa informasi telekomunikasi dan jasa informasi lainnya dalam bentuk media cetak dan elektronik, dan jasa <i>call center</i> / 22 September 1999	1984	100	100	2.522	2.390
PT Telkom Landmark Tower ("TLT"), Jakarta, Indonesia	Jasa pengembangan dan manajemen properti/ 1 Februari 2012	2012	55	55	2.261	2.204
PT Metra Digital Media ("MD Media"), Jakarta, Indonesia	Jasa layanan informasi dalam bentuk direktori khusus/ 22 Januari 2013	2013	100	100	1.390	1.115

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

ii. Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung (lanjutan):

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			31 Maret 2021	31 Desember 2020	31 Maret 2021	31 Desember 2020
PT Finnet Indonesia ("Finnet"), Jakarta, Indonesia	Jasa teknologi informatika/ 31 Oktober 2005	2006	60	60	1.305	1.371
PT Melon Indonesia ("Melon"), Jakarta, Indonesia	Jasa penjualan konten digital/ 14 November 2016	2010	100	100	1.126	848
PT Persada Sokka Tama ("PST"), Jakarta, Indonesia	Penyediaan sarana prasarana jaringan telekomunikasi/ 19 Februari 2019	2008	95	95	888	824
Telekomunikasi Indonesia International ("Telin TL") S.A., Dili, Timor Leste	Telekomunikasi/ 11 September 2012	2012	100	100	780	719
TS Global Network Sdn. Bhd. ("TSGN"), Petaling Jaya, Malaysia	Jasa satelit/ 14 Desember 2017	1996	70	70	641	669
PT Telkomsel Mitra Inovasi ("TMI"), Jakarta, Indonesia	Jasa konsultan manajemen bisnis dan investasi modal/ 18 Januari 2019	2019	100	100	594	594
PT Swadharna Sarana Informatika ("SSI"), Jakarta, Indonesia	Jasa pengisian kas dan pemeliharaan ATM/ 2 April 2018	2001	51	51	567	577
PT Administrasi Medika ("Ad Medika"), Jakarta, Indonesia	Jasa administrasi asuransi kesehatan/ 25 Februari 2010	2002	100	100	529	480
PT Nusantara Sukses Investasi ("NSI"), Jakarta, Indonesia	Jasa dan perdagangan/ 1 September 2014	2014	100	100	312	316
PT Graha Yasa Selaras ("GYS"), Jakarta, Indonesia	Jasa pariwisata/ 27 April 2012	2012	51	51	287	289

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

ii. Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung (lanjutan):

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			31 Maret 2021	31 Desember 2020	31 Maret 2021	31 Desember 2020
PT Nutech Integrasi ("Nutech"), Jakarta, Indonesia	Jasa penyedia sistem integrator/ 13 Desember 2017	2001	60	60	155	137
Telekomunikasi Indonesia International Inc., ("Telkom USA"), Los Angeles, USA	Telekomunikasi/ 11 Desember 2013	2014	100	100	110	115
Telekomunikasi Indonesia International Pty. Ltd., ("Telkom Australia"), Sydney, Australia	Telekomunikasi/ 9 Januari 2013	2013	100	100	105	88
PT Metraplaza ("Metraplaza"), Jakarta, Indonesia	Jasa jaringan & e-commerce/ 9 April 2012	2012	60	60	84	260
Telekomunikasi Indonesia Intl (Malaysia) Sdn. Bhd. ("Telin Malaysia"), Malaysia	Telekomunikasi/ 2 Juli 2013	2013	70	70	35	39
PT Satelit Multimedia Indonesia ("SMI"), Jakarta, Indonesia	Jasa satelit/ 25 Maret 2013	2013	100	100	9	14

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.

e. Penyelesaian dan kewenangan penerbitan laporan keuangan konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah disetujui dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 28 Juni 2021.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") di Indonesia dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", yang terlampir dalam surat KEP-347/BL/2012.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.

Angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam dan dibulatkan menjadi miliaran Rupiah ("Rp") dan jutaan US\$, kecuali dinyatakan lain. Untuk angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini yang masih mengandung nilai tetapi dibawah Rp1 miliar dan US\$ 1 juta disajikan dengan angka nol.

Standar akuntansi baru

Pada tanggal 1 Januari 2021, Grup menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi. Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya:

- i. Amandemen PSAK 22 : Kombinasi Bisnis
- ii. Amandemen PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amandemen PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan, Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi dan Amandemen PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2
- iii. Amandemen PSAK 73: Sewa tentang Konsesi Sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021

Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Berlaku efektif 1 Januari 2022:

- i. Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis
Amandemen ini mengatur tentang referensi ke Kerangka Konseptual dengan mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.
- ii. Amandemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi
Amandemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.
- iii. Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan
Amandemen ini mengklarifikasi *fee* (imbalan) yang diakui oleh peminjam terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan.
- iv. Amandemen PSAK 73: Sewa
Amandemen ini mengklarifikasi pengukuran oleh penyewa dan pencatatan perubahan masa sewa terkait "perbaikan properti sewaan".

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Berlaku efektif 1 Januari 2023:

- i. Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
Amandemen ini mengklarifikasi klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang.
- ii. Amandemen PSAK 16: Aset Tetap
Amandemen ini mengatur tentang perlakuan atas hasil sebelum penggunaan yang diintensikan.

b. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak dimana Perusahaan memiliki kendali. Pengendalian timbul ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Secara spesifik, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur atau hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi imbal hasil.

Umumnya, ada dugaan bahwa mayoritas hak suara menghasilkan kontrol. Untuk mendukung anggapan ini bila Grup memiliki mayoritas atau kurang dari mayoritas hak suara atau hak serupa dari *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah ia memiliki kuasa atas *investee*, termasuk:

- i. Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
- ii. Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- iii. Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

Grup menilai kembali apakah Grup mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal Grup kehilangan pengendalian. Aset, liabilitas, pendapatan, dan beban entitas anak yang diperoleh atau dilepaskan selama periode berjalan dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian hingga tanggal sejak Grup kehilangan pengendalian.

Laba atau rugi dan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik Perusahaan dan pada kepentingan nonpengendali, meskipun hal ini akan mengakibatkan timbulnya saldo defisit pada kepentingan nonpengendali.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi konsolidasian yang dapat diatribusikan pada pemilik Perusahaan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang digunakan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No.KEP-347/BL/2012. Pihak-pihak yang dipertimbangkan sebagai pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tersebut, entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Grup. Status pihak berelasi diperluas sampai dengan manajemen kunci dari entitas anak sampai dengan tingkatan mereka mengarahkan operasi entitas anak dengan tingkat keterlibatan minimal dari manajemen Perusahaan.

d. Kombinasi bisnis dan *goodwill*

Kombinasi bisnis dicatat dengan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan diukur sebesar nilai wajarnya, yang merupakan agregat dari nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diambil alih dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai pertukaran atas pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, kepentingan nonpengendali diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dibuat berdasarkan basis tiap transaksi. Biaya terkait akuisisi dicatat sebagai beban pada saat timbulnya. Aset dan liabilitas yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Goodwill awalnya diukur pada harga perolehan, yang merupakan selisih lebih dari nilai agregat imbalan yang dialihkan dan nilai yang diakui oleh kepentingan nonpengendali dan nilai kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya, atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai wajar dari jumlah neto aset yang diakuisisi melebihi nilai agregat imbalan yang dialihkan, Grup menilai kembali apakah semua aset yang diakuisisi dan liabilitas yang diambil alih sudah diidentifikasi dengan benar dan memeriksa prosedur yang digunakan untuk mengukur nilai yang harus diakui pada tanggal akuisisi. Jika hasil penilaian kembali tersebut masih menghasilkan selisih lebih atas nilai wajar dari aset neto diakuisisi atas nilai agregat imbalan yang dialihkan, maka keuntungan diakui pada laba atau rugi.

Saat penentuan imbalan dari kombinasi bisnis termasuk imbalan kontinjensi, imbalan kontinjensi ini diukur pada nilai wajar saat tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan. Jumlah yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar dimana perubahan pada nilai wajar tersebut diakui dalam laba rugi atau ketika penyesuaian dicatat diluar periode pengukuran. Perubahan pada nilai wajar imbalan kontinjensi yang memenuhi persyaratan sebagai penyesuaian periode pengukuran, disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang didapat selama periode pengukuran, yang tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi, tentang fakta dan kondisi yang ada pada saat tanggal akuisisi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Kombinasi bisnis dan *goodwill* (lanjutan)

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi bisnis terjadi, maka Grup akan melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangan konsolidasian. Selama periode pengukuran, Grup menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, telah berdampak pada pengukuran jumlah yang diakui pada tanggal tersebut. Periode pengukuran berakhir segera setelah Perusahaan menerima informasi yang dicari tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi atau mempelajari bahwa informasi tambahan tidak dapat diperoleh. Namun demikian, periode pengukuran tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi.

Berdasarkan PSAK 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", pengalihan aset, liabilitas, saham, dan instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Perusahaan atau entitas individual yang berada dalam Grup yang sama. Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling-of interests*).

Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan selama restrukturisasi terjadi disajikan seolah-olah restrukturisasi tersebut telah terjadi sejak awal periode penyajian paling awal. Selisih imbalan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku historis terkait dengan nilai tercatat dari kepentingan yang diperoleh, setelah memperhitungkan dampak pajak penghasilan, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai "Tambahkan Modal Disetor" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada saat penerapan awal PSAK 38 (Revisi 2012), seluruh saldo Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali direklasifikasikan ke akun "Tambahkan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas di laporan posisi keuangan terdiri dari kas ditangan, kas dan bank, dan deposito jangka pendek yang sangat likuid dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang, yang siap dikonversi menjadi uang tunai dalam jumlah yang diketahui dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas terdiri dari kas dan deposito jangka pendek, sesuai definisi di atas, setelah dikurangi dengan saldo cerukan bank karena dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas Grup.

Deposito yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun disajikan sebagai "Aset Keuangan Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 2t).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Penyertaan pada entitas asosiasi

Asosiasi adalah entitas dimana Grup (sebagai investor) memiliki pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan terkait kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tapi tidak termasuk kendali atau kendali bersama atas kebijakan operasional tersebut. Pertimbangan dalam menentukan pengaruh signifikan sama dengan pertimbangan saat menentukan pengendalian atas entitas anak. Kepemilikan 20% atau lebih hak suara *investee* (dimiliki secara langsung atau tidak langsung melalui anak perusahaan) dianggap menimbulkan pengaruh signifikan, kecuali dapat dijelaskan secara jelas bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan. Sebaliknya, kepemilikan kurang dari 20% hak suara dianggap tidak menimbulkan pengaruh yang signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa sebenarnya terdapat pengaruh signifikan.

Adanya pengaruh signifikan biasanya akan dibuktikan dengan satu atau beberapa cara sebagai berikut:

- i. Keterwakilan dalam dewan direksi dan komisaris atau organ setara dari *investee*;
- ii. Partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen dan distribusi lainnya;
- iii. Transaksi material diantara investor dan *investee*;
- iv. Pertukaran personil manajerial; atau
- v. Penyediaan informasi teknis penting.

Grup menghitung investasi pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas.

Berdasarkan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Jumlah tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan dalam bagian investor atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal akuisisi. Pada saat perolehan investasi, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian investor atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi dicatat dengan cara sebagai berikut:

- i. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama termasuk dalam nilai tercatat investasi dan tidak diperkenankan diamortisasi ataupun pengujian penurunan nilai secara individu, dan
- ii. Setiap selisih lebih bagian investor atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi terhadap biaya perolehan investasi dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian investor atas laba rugi entitas asosiasi pada periode investasi diperoleh.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian Grup atas hasil operasi entitas asosiasi. Setiap perubahan dalam penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi akan disajikan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Selanjutnya, jika ada perubahan yang langsung diakui dalam ekuitas entitas asosiasi maka Grup mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba dan rugi belum direalisasi yang berasal dari transaksi antara Grup dan entitas asosiasi dieliminasi sejumlah porsi kepemilikan atas entitas asosiasi.

Grup pada setiap akhir periode pelaporan menentukan apakah terdapat bukti obyektif bahwa penyertaan pada entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Apabila hal ini terjadi, Grup menghitung dan mengakui nilai penurunan sebagai selisih antara nilai investasi di entitas asosiasi yang dapat terpulihkan dan nilai tercatatnya.

Aset-aset ini termasuk dalam "Penyertaan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Penyertaan pada entitas asosiasi (lanjutan)

Untuk tujuan pelaporan investasi dengan menggunakan metode ekuitas tersebut, aset dan liabilitas kedua perusahaan ini pada tanggal laporan posisi keuangan masing-masing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs rata-rata selama periode tersebut. Selisih kurs akibat penjabaran diakui dan dilaporkan sebagai "Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

g. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dikurangi provisi penurunan nilai yang dihitung berdasarkan estimasi kerugian kredit ekspektasian seumur hidup pada setiap tanggal pelaporan. Grup telah menetapkan metodologi perhitungan estimasi penyisihan tersebut berdasarkan pengalaman historis kredit tak tertagih yang kemudian disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi. Piutang dihapuskan pada tahun ditetapkan tidak tertagih (Catatan 2t).

h. Persediaan

Persediaan terdiri dari komponen mewakili terminal telepon, kabel, dan suku cadang lainnya. Persediaan juga termasuk kartu *Subscriber Identification Module* ("SIM"), pesawat telepon, modem *wireless broadband*, dan voucher Prabayar yang dibebankan pada saat dijual.

Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih ditentukan dengan mengestimasi harga jual, dikurangi estimasi biaya penjualan atau menentukan biaya penggantian yang berlaku.

Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Jumlah penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban umum dan administrasi pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Provisi persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan setiap jenis persediaan pada masa depan.

i. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset takberwujud

Aset takberwujud terutama terdiri dari piranti lunak. Aset takberwujud diakui jika kemungkinan besar Grup akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Aset takberwujud dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, apabila ada. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi jumlah terpulihkan.

Aset takberwujud, kecuali *goodwill* diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Piranti lunak	3-6
Lisensi	3-20
Aset takberwujud lainnya	1-30

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

k. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari: (a) harga perolehan, (b) setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, dan (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Setiap bagian aset tetap yang memiliki harga perolehan cukup signifikan terhadap biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	15-40
Renovasi bangunan sewa	2-15
Peralatan sentral telepon	3-15
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	5-15
Peralatan dan instalasi transmisi	3-30
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	3-20
Jaringan kabel	5-25
Catu daya	3-20
Kendaraan	4-8
Peralatan pengolahan data	3-20
Peralatan telekomunikasi lainnya	5
Peralatan kantor	2-5
Aset <i>Customer Premises Equipment</i> ("CPE")	4-5
Peralatan lainnya	2-5

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Biaya signifikan sehubungan dengan renovasi bangunan sewa dikapitalisasi dan disusutkan selama masa sewa.

Metode penyusutan, umur manfaat dan nilai residu dari suatu aset direviu paling tidak setiap akhir tahun buku dan disesuaikan jika diperlukan. Berdasarkan reviu umur manfaat aset tetap khususnya beberapa peralatan produksi mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh Grup dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, ketika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran dengan aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar kecuali, (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau (ii) nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Suku cadang utama dan suku cadang siap pakai yang diperkirakan dapat digunakan lebih dari 12 bulan dicatat sebagai bagian aset tetap.

Ketika aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian dan laba atau rugi yang timbul dari pelepasan atau penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Piranti keras komputer tertentu tidak dapat dioperasikan tanpa ketersediaan piranti lunak komputer tertentu. Dalam kondisi tersebut, piranti lunak komputer dicatat sebagai bagian dari piranti keras komputer. Jika piranti lunak komputer berdiri sendiri dari piranti keras komputernya, piranti lunak komputer tersebut dicatat sebagai bagian dari aset takberwujud.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan yang signifikan dikapitalisasi.

Aset dalam pembangunan diakui sebesar biaya perolehan hingga pembangunan selesai, yang kemudian direklasifikasi ke akun aset tetap yang terkait. Selama masa pembangunan hingga aset tetap siap untuk digunakan/dijual, biaya pinjaman, yang termasuk di dalamnya beban bunga dan selisih kurs yang timbul atas pinjaman yang diperoleh untuk membiayai pembangunan aset, dikapitalisasi secara proporsional terhadap rata-rata nilai akumulasi pengeluaran selama periode tersebut sepanjang aset tetap tersebut memenuhi definisi aset kualifikasi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai dan aset tetap siap untuk digunakan atau dijual.

l. Sewa

PSAK 73 menetapkan model komprehensif untuk mengidentifikasi perjanjian sewa dan perlakuannya dalam laporan keuangan Penyewa dan Pesewa. PSAK 73 memperkenalkan model pengendalian untuk identifikasi sewa, membedakan antara sewa dan kontrak layanan berdasarkan apakah ada aset identifikasi yang dikendalikan oleh pelanggan.

Grup menerapkan PSAK 73 pada 1 Januari 2020 dengan menggunakan pendekatan retrospektif modifikasi dengan mengakui dampak kumulatif penerapan awal PSAK 73 sebagai penyesuaian terhadap saldo awal ekuitas pada 1 Januari 2020. Dengan demikian data komparasi tahun 2019 tidak disajikan kembali dan disajikan sesuai standar sebelumnya dan interpretasi terkait.

Grup menilai pada awal kontrak apakah suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa, yaitu jika kontrak memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pertimbangan. Jangka waktu sewa tidak dapat dibatalkan untuk masing-masing kontrak, kecuali dalam kasus dimana Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi perpanjangan kontrak.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Sewa (lanjutan)

Grup memilih tindakan praktis yang tersedia berdasarkan pedoman transisi dalam PSAK 73, yang antara lain:

- penggunaan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang serupa;
- akuntansi untuk sewa operasi dengan sisa masa sewa kurang dari 12 bulan pada tanggal 1 Januari 2020 sebagai sewa jangka pendek;
- pengecualian biaya langsung awal untuk pengukuran aset hak guna pada tanggal penerapan awal;
- penggunaan tinjauan ke belakang dalam menentukan masa sewa dimana kontrak berisi opsi untuk perpanjangan atau pemutusan masa sewa;
- menerapkan PSAK 73 untuk sewa yang sebelumnya diidentifikasi berdasarkan PSAK 30R, dan tidak menerapkan PSAK 73 untuk sewa yang sebelumnya tidak diidentifikasi berdasarkan standar ini;
- tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa, dan sebagai konsekuensinya Grup menganggap seluruh kontrak sebagai sewa; dan
- untuk tidak mengakui liabilitas sewa dan aset hak guna untuk sewa dimana aset dasar adalah aset bernilai rendah (yaitu aset dasar dengan nilai maksimum US\$5.000 atau Rp50 juta dalam kondisi baru).

PSAK 73 juga mengizinkan Grup untuk melanjutkan penilaian sewa historis yang memungkinkan Grup untuk tidak menilai kembali hasil penilaian Grup sebelumnya tentang identifikasi sewa, klasifikasi sewa dan Grup telah memilih untuk membawa saldo penilaian sewa historis dan mengandalkan penilaian yang telah dibuat berdasarkan PSAK 30 dan ISAK 8 dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan sewa. Grup menerapkan definisi sewa dan panduan terkait yang ditetapkan dalam PSAK 73 untuk semua kontrak sewa yang dibuat atau diubah pada atau setelah 1 Januari 2020.

i. Grup sebagai lessee

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset yang mendasarinya.

Grup mengakui aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya aset hak guna termasuk jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dikeluarkan, biaya restorasi dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima.

Aset hak guna diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa sewa yang lebih pendek dan estimasi masa manfaat dari aset, sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	15-40
Instalasi dan peralatan transmisi	3-25
Catu daya	3-20
Kendaraan	4-8
Lain-lain	2-25

Jika kepemilikan aset sewaan dialihkan ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan taksiran masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna mengalami penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 Penurunan Nilai Aset.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Sewa (lanjutan)

i. Grup sebagai *lessee* (lanjutan)

Liabilitas sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau kurs, dan jumlah yang diharapkan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga pelaksanaan opsi pembelian yang wajar dipastikan akan dilakukan oleh Grup dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup yang melaksanakan opsi untuk mengakhiri. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau kurs diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

Dalam menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa, Grup menggunakan tingkat pinjaman tambahan pada tanggal dimulainya sewa karena tingkat suku bunga yang tersirat dalam sewa tidak dapat ditentukan dengan mudah. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset yang mendasarinya.

Sewa jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari 12 bulan, berakhir dalam 12 bulan setelah 1 Januari 2020 dan sewa bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengakuan yang ditetapkan oleh PSAK 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi. Grup akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

ii. Grup sebagai *lessor*

Berdasarkan PSAK 73, *lessor* terus mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dan memperhitungkan kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Sewa dimana Grup mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, jika tidak maka akan diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Klasifikasi sewa dibuat pada tanggal awal dan dinilai kembali hanya jika ada modifikasi sewa.

Pada tanggal dimulainya, Grup mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dengan jumlah yang sama dengan investasi bersih dalam sewa dan menyajikannya sebagai piutang sewa pembiayaan. Investasi bersih dalam sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap dalam substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau kurs, dan jaminan nilai residu yang diberikan kepada *lessor* oleh *lessee*. Pembayaran sewa juga termasuk harga pelaksanaan opsi pembelian yang wajar dipastikan akan dilakukan oleh *lessee* dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup yang menggunakan opsi untuk mengakhiri.

Sebagaimana disyaratkan oleh PSAK 71, penyisihan kerugian kredit yang diharapkan telah diakui sebagai "Piutang Lain-lain".

Pendapatan sewa yang timbul dari sewa operasi dicatat secara garis lurus selama masa sewa dan dimasukkan dalam pendapatan dalam laporan laba rugi karena sifat operasinya. Biaya langsung awal yang dikeluarkan untuk menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset tetap dan diakui selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya.

Jika suatu perjanjian mengandung komponen sewa dan non-sewa, Grup menerapkan pendapatan PSAK 72 dari kontrak dengan pelanggan untuk mengalokasikan pertimbangan dalam kontrak.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Beban tanggungan - hak atas tanah

Hak atas tanah termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali dicatat sebagai bagian dari aset tetap dan tidak diamortisasi. Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode legal hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

n. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang dan/atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

o. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya ditangguhkan sampai penarikan terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

p. Penjabaran valuta asing

Mata uang fungsional dan mata uang pembukuan Grup adalah Rupiah, kecuali Telekomunikasi Indonesia International Ltd., Hong Kong, Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., Singapura, Telekomunikasi Indonesia International Inc., USA, dan Telekomunikasi Indonesia International S.A., Timor Leste yang menggunakan mata uang Dolar A.S., Telekomunikasi Indonesia International Pty. Ltd., Australia yang menggunakan mata uang Dolar Australia, TS Global Network Sdn. Bhd., dan Telekomunikasi Indonesia International Sdn. Bhd. yang menggunakan Ringgit Malaysia.

Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh *Reuters* pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	31 Maret 2021		31 Desember 2020	
	Beli	Jual	Beli	Jual
Dolar A.S. ("US\$") 1	14.520	14.530	14.040	14.060
Dolar Australia ("AU\$") 1	11.060	11.070	10.738	10.756
Dolar Singapura ("SGD") 1	10.801	10.812	10.591	10.607
Dolar Taiwan Baru ("TWD") 1	509,49	510,02	499,61	500,46
Euro ("EUR") 1	17.051	17.064	17.209	17.239
Yen Jepang ("JPY") 1	131,34	131,47	135,91	136,15
Ringgit Malaysia ("MYR") 1	3.500	3.506	3.477	3.485
Pataca Makau ("MOP") 1	1.811	1.815	1.756	1.761
Dolar Hong Kong ("HKD") 1	1.868	1.869	1.811	1.814

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Penjabaran valuta asing (lanjutan)

Laba atau rugi selisih kurs yang timbul, baik yang telah maupun yang belum direalisasi, dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang timbul dari pinjaman selama pembangunan suatu aset tertentu yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi, dimana pinjaman dapat diatribusikan terhadap pembangunan aset tersebut (Catatan 2k).

q. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

PSAK 72 menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan, dan berapa banyak pendapatan yang harus diakui. Standar ini menyediakan model lima langkah tunggal untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan. Standar ini juga memberikan panduan spesifik yang mensyaratkan jenis biaya tertentu untuk memperoleh dan/atau memenuhi kontrak yang akan dikapitalisasi dan diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan barang atau jasa yang terkait dengan biaya yang dikapitalisasi.

Grup mengadopsi PSAK 72 pada 1 Januari 2020 menggunakan metode retrospektif yang dimodifikasi dengan mengakui efek kumulatif dari awal penerapan PSAK 72 sebagai penyesuaian terhadap saldo awal ekuitas pada 1 Januari 2020.

Grup telah memilih untuk menerapkan pendekatan praktis berikut pada tanggal transisi:

- (i) Kontrak yang telah diselesaikan - Grup menerapkan PSAK 72 hanya untuk kontrak pelanggan yang belum selesai pada 1 Januari 2020; dan
- (ii) Modifikasi kontrak - alih-alih menerapkan pendekatan retrospektif untuk mengukur efek kumulatif dari modifikasi kontrak sejak tiap modifikasi dilakukan; Grup mengumpulkan efek dari semua modifikasi kontrak yang terjadi sebelum 1 Januari 2020 untuk:
 - (a) Mengidentifikasi kewajiban kinerja yang telah dan belum dilaksanakan;
 - (b) Menentukan harga transaksi dari kontrak modifikasian terbaru; dan
 - (c) Mengalokasikan harga transaksi untuk kewajiban kinerja yang telah dan belum dilaksanakan pada 1 Januari 2020.

Selain itu, Grup juga memilih untuk menerapkan pendekatan praktis untuk tidak memperhitungkan dampak komponen pendanaan ketika periode antara pembayaran untuk barang atau jasa yang dijanjikan dan pengiriman barang atau jasa tersebut kepada pelanggan kurang dari satu tahun, dalam mengadopsi PSAK 72.

Di bawah ini adalah ringkasan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan Grup untuk setiap jenis pendapatan:

i. Mobile

Pendapatan dari *mobile* terutama terdiri dari pendapatan dari layanan seluler yang antara lain: layanan telepon, layanan interkoneksi, layanan internet dan data, dan layanan *Short Messaging Service* ("SMS"). Layanan tersebut ditawarkan secara pascabayar atau prabayar, dimana untuk prabayar, penjualan paket perdana (juga dikenal sebagai kartu SIM dan voucher pengisian awal) dan voucher pengisian pulsa diakui pada awalnya sebagai liabilitas kontrak.

Seluruh pendapatan layanan *mobile* diakui berdasarkan metode *output*, baik per penggunaan aktual atau estimasi unit yang digunakan (jika layanan dijual berdasarkan paket), karena pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh Grup.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

i. *Mobile* (lanjutan)

Untuk layanan yang dijual dalam paket bundel, total penerimaan dari pelanggan dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual yang berdiri sendiri untuk setiap produk dan/atau layanan. Grup mengestimasi harga jual yang berdiri sendiri menggunakan harga yang berlaku jika layanan tersebut dijual dengan basis yang berdiri sendiri. Sebagian besar paket yang dijual oleh Grup hanya mencakup layanan yang pada umumnya terselesaikan selama periode waktu yang sama. Karena itu, pola pengakuan pendapatan umumnya tidak dipengaruhi oleh alokasi.

Pembayaran yang diterima dialokasikan antara layanan telekomunikasi dan poin yang dikeluarkan, dimana pembayaran dialokasikan ke poin yang setara dengan nilai wajarnya. Nilai wajar poin ditentukan berdasarkan informasi historis terkait dengan tingkat penebusan poin penghargaan. Nilai wajar poin yang dikeluarkan ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan pada saat poin tersebut ditebus atau telah kedaluwarsa.

ii. *Consumer*

Pendapatan dari *consumer* terutama terdiri dari pendapatan telepon tidak bergerak dan layanan Indihome. Pendapatan dari layanan telepon tidak bergerak berasal dari pelanggan yang hanya berlangganan layanan telepon tidak bergerak. Sedangkan pendapatan dari layanan Indihome berasal dari pelanggan yang berlangganan layanan internet atau lebih dari satu produk ritel. Layanan tersebut ditawarkan berdasarkan pascabayar yang ditagih pada bulan berikutnya. Kontrak ditawarkan sebagai kontrak bulan ke bulan.

Grup memiliki paket layanan bundel bernama "Indihome". Dalam paket ini, pelanggan dapat berlangganan kombinasi layanan *consumer* (misalnya telepon, data dan internet, serta TV berbayar).

Seluruh layanan *consumer* diakui menggunakan metode *output* berdasarkan penggunaan aktual pelanggan atau waktu yang telah berlalu ketika pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat yang diberikan oleh Grup.

Pelanggan mungkin diharuskan membayar biaya di muka pada saat dimulainya kontrak. Biaya di muka dianggap sebagai hak material karena pelanggan tidak diharuskan membayar biaya di muka ketika pelanggan memperbarui layanan di luar periode kontrak asli. Grup menilai opsi pembaruan sebesar pembayaran yang diterima dari biaya di muka untuk layanan instalasi. Grup menangguhkan nilai tersebut dan mengakuinya sebagai pendapatan berdasarkan metode garis lurus sepanjang taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan. Grup memperkirakan jangka waktu hubungan dengan pelanggan berdasarkan informasi historis dan tren pelanggan serta memperbarui evaluasi tersebut setiap tahun.

iii. *Enterprise*

Pendapatan dari pelanggan *enterprise* terutama terdiri dari pendapatan dari penyediaan jasa telepon, data dan internet, teknologi informasi, dan jasa lainnya (misal penjualan periferal, *manage service*, *call center*, *e-health*, *e-payment*, dan lain-lain). Beberapa kontrak dengan pelanggan perusahaan dengan spesifikasi sesuai pesanan pelanggan.

Pendapatan dari pelanggan *enterprise* diakui sepanjang waktu menggunakan metode *output* berdasarkan penggunaan aktual atau waktu yang telah berlalu jika penyediaan layanan tidak tergantung pada penggunaan (yaitu menit suara, *kilobyte data*, dan lain-lain), kecuali untuk penjualan barang yang diakui pada waktu tertentu, karena pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat yang diberikan oleh Grup. Pendapatan untuk kewajiban kinerja yang dipenuhi pada waktu tertentu diakui ketika pengendalian barang dipindahkan ke pelanggan, biasanya ketika pelanggan memiliki fisik barang.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

iii. *Enterprise* (lanjutan)

Beberapa perjanjian dengan pelanggan *enterprise* ditawarkan sebagai produk bundel. Untuk pengaturan yang dibundel, produk dan/atau jasa dalam kontrak dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan tersendiri ketika secara terpisah dapat diidentifikasi dari janji-janji lain dalam kontrak dan pelanggan dapat mengambil manfaat dari produk/jasa itu sendiri. Total pembayaran dialokasikan untuk masing-masing kewajiban pelaksanaan yang berbeda yang telah dimasukkan dalam kontrak, berdasarkan harga jualnya yang berdiri sendiri. Harga jual yang berdiri sendiri ditentukan berdasarkan harga yang dapat diobservasi di mana produk dan/atau jasa individual dijual secara terpisah, disesuaikan dengan kondisi pasar dan diskon normal yang sesuai. Atau, ketika harga yang dapat diobservasi tidak tersedia, biaya yang diharapkan ditambah pendekatan margin digunakan untuk menentukan harga jual yang berdiri sendiri.

Kontrak tertentu dengan pelanggan *enterprise* dapat menimbulkan imbalan variabel karena harga kontrak tergantung pada peristiwa di masa mendatang (misalnya kontrak berbasis penggunaan atau kontrak berbasis bagi hasil). Dalam memperkirakan imbalan variabel ini, Grup diharuskan untuk menggunakan metode nilai yang diharapkan atau metode jumlah yang paling mungkin berdasarkan metode yang lebih baik memprediksi jumlah pembayaran yang menjadi haknya. Grup menentukan bahwa metode nilai yang paling diharapkan adalah metode yang tepat untuk digunakan dalam memperkirakan imbalan variabel untuk satu kontrak dengan sejumlah besar kemungkinan hasil.

Sebelum memasukkan jumlah imbalan variabel dalam harga transaksi, Grup mempertimbangkan apakah jumlah imbalan variabel dibatasi. Grup menentukan bahwa taksiran imbalan variabel tidak dibatasi berdasarkan pengalaman historisnya, estimasi bisnis, dan kondisi ekonomi saat ini dan hanya mencakup imbalan variabel sepanjang kemungkinan besar pembalikan signifikan dalam jumlah pendapatan kumulatif yang diakui tidak akan terjadi ketika ketidakpastian terkait dengan imbalan variabel selanjutnya diselesaikan.

Ketika pihak lain terlibat dalam menyediakan produk dan/atau jasa kepada pelanggan, Grup bertindak sebagai prinsipal jika Grup mengendalikan produk dan/atau jasa yang ditentukan sebelum produk dan/atau jasa tersebut ditransfer ke pelanggan. Pendapatan dicatat pada jumlah bersih yang diterima (jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan dikurangi jumlah yang dibayarkan kepada pemasok), ketika, pada dasarnya, Grup telah bertindak sebagai agen dan mendapat komisi dari pemasok produk dan/atau jasa yang dijual.

iv. *Wholesale and International Business Services* (“WIB”)

Pendapatan dari WIB terutama terdiri dari jasa interkoneksi untuk interkoneksi panggilan pelanggan operator telekomunikasi lainnya ke pelanggan Grup (panggilan masuk) dan panggilan antara pelanggan operator telekomunikasi lainnya melalui jaringan Grup (transit) dan jasa jaringan dengan operator telekomunikasi lainnya. Semua jasa ini diakui berdasarkan metode *output* menggunakan basis *traffic* aktual yang tercatat untuk bulan tersebut.

Biaya inkremental untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan

Biaya inkremental untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan, yang pada dasarnya terdiri dari komisi penjualan dan biaya pemenuhan kontrak, pada awalnya diakui pada laporan posisi keuangan. Biaya-biaya ini kemudian diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan periode dan pola pengiriman produk atau jasa terkait ke pelanggan. Biaya yang tidak memenuhi syarat sebagai biaya untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan dibebankan pada saat terjadinya atau sesuai dengan standar terkait lainnya.

Pendapatan dari transaksi *lessor*

Pendapatan dari transaksi *lessor* terdiri dari pendapatan dari sewa menara telekomunikasi dan sewa lainnya. Pendapatan sewa diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa dan termasuk dalam pendapatan dalam laporan laba rugi karena sifat operasinya.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Imbalan kerja

i. Imbalan kerja jangka pendek

Seluruh imbalan kerja jangka pendek yang terdiri dari gaji dan imbalan terkait, tunjangan cuti, insentif, dan imbalan kerja jangka pendek lain diakui sebagai biaya yang tidak didiskonto saat karyawan telah memberikan jasa kepada Grup.

ii. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain

Imbalan pasca kerja terdiri dari program pensiun imbalan pasti yang *funded* dan *unfunded*, program pensiun iuran pasti, imbalan pasca kerja lainnya, program imbalan kesehatan pasca kerja imbalan pasti, program imbalan kesehatan kerja iuran pasti, dan kewajiban berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan.

Imbalan kerja jangka panjang lain terdiri dari penghargaan masa kerja, cuti masa kerja, dan masa persiapan pensiun.

Perhitungan biaya terkait dengan program imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Kewajiban bersih Perusahaan berkaitan dengan imbalan pasti pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah, yang didenominasi dalam mata uang dimana manfaat akan dibayarkan dan yang mempunyai jangka waktu sampai dengan jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban imbalan pasca kerja terkait. Obligasi pemerintah digunakan karena tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi.

Aset program adalah aset yang dimiliki oleh program pensiun imbalan pasti dan imbalan kesehatan pasca kerja serta polis asuransi yang memenuhi syarat. Aset ini diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Nilai wajar polis asuransi adalah jumlah yang sama dengan kewajiban yang terkait (dan dapat dikurangi jika jumlah yang dapat diterima dari polis asuransi tidak dapat diperoleh secara penuh).

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak batas atas aset (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) dan imbal hasil aset program (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) diakui pada ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain di periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak diklasifikasikan ke laba rugi di periode selanjutnya.

Biaya jasa lalu diakui di laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- (a) ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi; dan
- (b) ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto.

Laba atau rugi kurtailmen diakui apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam jumlah yang material yang ditanggung oleh suatu program atau apabila terdapat perubahan ketentuan-ketentuan pada suatu program imbalan pasti, dimana bagian yang material dari jasa yang diberikan karyawan pada masa depan tidak lagi memberikan imbalan, atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program manfaat pasti (selain pembayaran imbalan sesuai dengan ketentuan program dan termasuk dalam asumsi aktuarial).

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran secara rutin yang merupakan biaya berkala bersih untuk periode iuran tersebut dan dicatat sebagai bagian dari beban karyawan ketika terutang.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Imbalan kerja (lanjutan)

iii. Kompensasi berbasis saham

Perusahaan menjalankan program kompensasi berbasis saham dengan penyelesaian menggunakan ekuitas. Nilai wajar dari jasa karyawan yang dikompensasikan dengan saham Perusahaan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan mengkredit akun tambahan modal disetor pada tanggal pemberian kompensasi.

iv. Pensiun dini ("Pendi")

Beban Pendi diakui pada saat Grup berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi yang timbul sehubungan dengan tawaran yang diajukan Grup agar karyawan mengundurkan diri secara sukarela. Grup dianggap berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi jika, dan hanya jika, Grup telah memiliki rencana formal terinci yang tidak dapat dibatalkan.

s. Pajak

Pajak Penghasilan ("PPh")

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali pajak penghasilan tersebut sehubungan dengan transaksi atau kejadian yang diakui secara langsung di ekuitas dimana pajak penghasilannya diakui secara langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak kini dihitung sebesar jumlah yang diperkirakan dapat diperoleh atau dibayar dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan atau secara substantif ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi perlakuan pajak yang diterapkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT Tahunan") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada Otoritas Pajak.

Pemeriksaan pajak

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat diterimanya Surat Ketetapan Pajak ("SKP") atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

Pajak tangguhan

Grup mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup juga mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak pada masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa depan cukup besar (*probable*). Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak dan undang-undang pajak pada setiap tanggal pelaporan yang diharapkan berlaku terhadap penghasilan kena pajak ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan direviu pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangi apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya. Pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Pajak (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Pajak tangguhan suatu transaksi diakui diluar laba rugi, oleh karena itu pajak tangguhan atas transaksi tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain konsolidasian atau diakui langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan saling hapus di laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset dan liabilitas pajak kini dan aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh Otoritas Pajak yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk dipulihkan atau diselesaikan.

Pajak pertambahan nilai ("PPN")

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- i. PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
- ii. Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan

Sesuai dengan ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas pajak yang mengandung ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan ditentukan dengan mempertimbangan apakah diperlakukan secara terpisah atau bersamaan, penggunaan asumsi tentang pemeriksaan atas perlakuan pajak tidak pasti oleh otoritas perpajakan, pertimbangan apakah besar kemungkinan Otoritas Pajak akan menerima perlakuan pajak tidak pasti dan penilaian kembali pertimbangan atau estimasi yang disyaratkan jika terjadi perubahan fakta dan keadaan.

Jika penerimaan perlakuan pajak dimungkinkan oleh Otoritas Pajak, pengukuran tersebut sejalan dengan pengisian pajak penghasilan. Jika penerimaan perlakuan pajak oleh Otoritas Pajak tidak memungkinkan, Grup menggunakan jumlah pajak dengan menggunakan metode yang memberikan prediksi resolusi yang lebih baik (yaitu jumlah yang paling mungkin atau nilai yang diharapkan).

Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa interpretasi tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Pajak final

Peraturan perpajakan Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final atas jasa konstruksi dan sewa disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan (Beban) Lain-Lain - bersih".

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Instrumen keuangan

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain. Grup mengadopsi PSAK 71 pada 1 Januari 2020.

i. Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"), dan nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan tersebut. Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan atau saat Grup menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Grup menerapkan panduan praktis, diukur pada harga transaksi yang telah ditentukan berdasarkan PSAK 72.

Agar aset keuangan dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai *Solely Payment of Principal and Interest (SPPI) testing* dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Grup mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari perolehan arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Untuk tujuan pengukuran setelah pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan kedalam empat kategori:

(a) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai. Aset keuangan Grup pada kategori ini meliputi kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, piutang lain-lain, aset kontrak, dan aset tidak lancar lainnya.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

- (b) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang)

Grup mengukur instrumen utang pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, pendapatan bunga, keuntungan atau kerugian selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama dengan aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar lainnya diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya direklasifikasi ke laba rugi.

Grup tidak memiliki instrumen utang yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif per 31 Maret 2021.

- (c) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tanpa fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif saat penghentian pengakuan (instrumen ekuitas)

Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan dalam penghasilan komprehensif lain perubahan nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 71 dan yang bukan merupakan instrumen ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan. Pilihan ini dilakukan pada level instrumen per instrumen. Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak direklasifikasikan ke laba rugi. Dividen diakui pada laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan, kecuali dividen secara jelas mewakili bagian terpulihkan dari biaya investasi. Instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak terpengaruh pada persyaratan penurunan nilai.

- (d) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan yang dikelola untuk diperdagangkan, aset keuangan yang pada saat awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang disyaratkan untuk diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif, termasuk derivatif melekat yang dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Aset keuangan yang tidak memenuhi *SPPI testing* diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, terlepas apapun model bisnisnya. Terlepas dari kriteria untuk instrumen utang yang akan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, seperti dijelaskan di atas, instrumen utang dapat ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada pengakuan awal jika penerapan itu dapat menghilangkan, atau secara signifikan mengurangi, inkonsistensi pengukuran atau pengakuan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

(d) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Aset keuangan kategori ini pada laporan posisi keuangan diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan dan kerugian yang timbul sebagai hasil dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi. Aset keuangan yang dimiliki untuk dijual diungkapkan sebagai bagian dalam catatan aset keuangan lancar, sementara itu yang lain diungkapkan dalam investasi jangka panjang dalam utang dan instrument ekuitas.

Kerugian Kredit Ekspektasian ("ECL")

Grup mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian untuk seluruh instrumen utang yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kerugian kredit ekspektasian didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan menggunakan perkiraan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

Kerugian kredit ekspektasian diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah kerugian kredit ekspektasian dalam 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang umurnya.

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur. Grup telah membentuk model provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) yaitu kondisi pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Grup mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi *default* ketika telah menunggak lebih dari 90 hari. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Grup juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan *default* ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Grup tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit. Penghapusan piutang usaha dilakukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan.

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman, dan utang atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai.

Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar, dan untuk pinjaman sebesar pinjaman yang diterima setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (a) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau (b) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman dan liabilitas lainnya. Pinjaman termasuk utang bank jangka pendek, pinjaman penerusan, obligasi dan wesel bayar, utang bank jangka panjang, dan utang sewa pembiayaan.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan bergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

(a) Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini mencakup juga derivatif yang tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi.

Penentuan liabilitas keuangan untuk dapat ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditentukan pada saat pengakuan awal, dan hanya jika kriteria-kriteria yang terdapat dalam PSAK 71 terpenuhi. Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

(b) Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Grup. Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode suku bunga efektif. Amortisasi metode suku bunga efektif diakui sebagai biaya pendanaan pada laporan laba rugi. Kategori ini secara umum berlaku untuk pinjaman. Informasi lebih lanjut dapat mengacu ke Catatan 20 Pinjaman Jangka Panjang dan Pinjaman Lainnya.

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan sebagai berikut:

- (i) situasi bisnis yang normal;
- (ii) peristiwa *default*; dan
- (iii) peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari Grup dan seluruh pihak lawan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Instrumen keuangan (lanjutan)

iv. Penghentian pengakuan instrumen keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau saat seluruh resiko dan manfaat dari aset keuangan tersebut ditransfer secara substansial kepada pihak lain.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan saat kewajiban kontraktual untuk membayar dilepaskan, dibatalkan atau berakhir.

v. Akuntansi lindung nilai

Grup tidak menerapkan akuntansi lindung nilai.

u. Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Grup diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait. Perbedaan antara nilai tercatat dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui pada laporan laba rugi sebagai beban penerbitan sukuk.

Sukuk Ijarah, setelah disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi, disajikan sebagai bagian dari liabilitas.

v. Modal saham yang diperoleh kembali

Saham diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan nilai perolehannya sebagai "Modal Saham yang Diperoleh Kembali" dan disajikan sebagai pengurang modal saham. Harga pokok dari penjualan/pengalihan saham yang diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Modal saham diperoleh kembali yang dialihkan dalam bentuk kepemilikan saham karyawan dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara harga perolehan kembali dan harga jual kembali/nilai pengalihan saham dicatat sebagai "Tambahkan Modal Disetor".

w. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan. Untuk dividen interim, Perusahaan mengakui sebagai liabilitas berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris.

x. Laba per saham dan laba per ADS

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode tersebut. Laba per ADS dihitung dengan mengalikan laba per saham dasar dengan 100, yaitu jumlah lembar saham per ADS.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

y. Informasi segmen

Informasi segmen Grup disajikan menurut segmen operasi yang telah diidentifikasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- i. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- ii. hasil operasinya direviu secara reguler oleh Pengambil Keputusan Operasional (PKO) Grup, misalnya Dewan Direksi untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- iii. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

z. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi untuk kontrak yang memberatkan diakui ketika kontrak tersebut menjadi memberatkan sebesar mana yang lebih rendah antara biaya neto memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika tidak memenuhi kontrak.

aa. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka Grup menentukan jumlah terpulihkan dari Unit Penghasil Kas ("UPK") yang mana aset tercakup ("aset UPK").

Jumlah terpulihkan dari suatu aset (baik aset individual maupun UPK) adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar lain yang tersedia.

Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan dibebankan pada operasi berjalan dan disajikan sebagai bagian dari "Penyusutan dan Amortisasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aa. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka jumlah terpulihkan aset tersebut diestimasi. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat yang telah ditentukan, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi konsolidasian.

Penurunan nilai *goodwill* diuji setiap tahun dan ketika terdapat keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai. Penurunan nilai untuk *goodwill* ditentukan dengan menilai jumlah terpulihkan dari UPK (atau kelompok UPK) yang mana *goodwill* tercakup. Jika nilai terpulihkan dari UPK lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dipulihkan pada periode mendatang.

ab. Klasifikasi lancar dan tidak lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset yang tidak memenuhi kriteria di atas, diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i. akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv. tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Liabilitas yang tidak memenuhi kriteria di atas, diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar.

ac. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat keputusan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan yang menyertainya, dan pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian tentang asumsi dan perkiraan ini dapat menghasilkan hasil yang memerlukan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode mendatang.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)

i. Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Pajak penghasilan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat. Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Grup mengakui liabilitas untuk area pemeriksaan pajak yang diantisipasi berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak akan terutang. Jika hasil akhir pajak berbeda dengan jumlah yang sudah dicatat, selisihnya akan mempengaruhi aset dan liabilitas pajak kini dan tanggungan pada periode ditentukannya hasil pajak tersebut. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat pajak penghasilan diungkapkan pada Catatan 28.

ii. Estimasi dan asumsi

Estimasi dan asumsi terus dievaluasi dan didasarkan kepada pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, jarang yang sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi pada saat tanggal pelaporan yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama satu tahun laporan keuangan ke depan dipaparkan di bawah ini.

(a) Imbalan pasca kerja

Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan tingkat pengembalian investasi. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto tersebut adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Jika terdapat peningkatan peringkat seperti pada obligasi pemerintah atau penurunan tingkat bunga sebagai hasil dari peningkatan kondisi ekonomi, maka akan terdapat dampak material terhadap tingkat diskonto yang digunakan dalam menentukan kewajiban pasca kerja.

Asumsi kunci kewajiban imbalan pasca kerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 31 dan 32.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)

ii. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

(b) Umur manfaat aset tetap

Grup mengestimasi umur manfaat aset tetap berdasarkan ekspektasi penggunaan aset oleh Grup dengan mempertimbangkan rencana strategi usaha, perkembangan teknologi di masa depan, dan perilaku pasar. Estimasi umur manfaat aset tetap adalah berdasarkan pada penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal, dan pengalaman untuk aset yang sejenis.

Grup melakukan reviu atas estimasi umur manfaat sekurang-kurangnya setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dengan estimasi sebelumnya, yang dikarenakan adanya perubahan ekspektasi daya pakai aset akibat pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan aset. Jumlah beban tercatat setiap tahun akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Perubahan estimasi umur manfaat aset tetap merupakan perubahan estimasi akuntansi dan diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan dan periode mendatang.

Rincian atas sifat dan jumlah tercatat atas aset tetap diungkapkan pada Catatan 12.

(c) Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian - Grup sebagai *lessee*

Grup menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan masa sewa, jika cukup masuk akal untuk tidak dilakukan.

Grup memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian. Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau menghentikan sewa, mempertimbangkan semua faktor relevan yang menciptakan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian. Setelah tanggal dimulainya sewa, Grup menilai kembali masa sewa jika ada peristiwa atau perubahan signifikan dalam kendali yang mempengaruhi kemampuan untuk melakukan atau tidak opsi perpanjangan atau penghentian.

(d) Kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian berdasarkan kerugian kredit ekspektasian sepanjang kepemilikan aset pada tanggal pelaporan. Grup telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Untuk deposito berjangka dan instrumen utang pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya, Grup menerapkan metode yang disederhanakan. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi itu, Grup menilai kembali peringkat kredit eksternal dari instrumen utang. Selain itu, Grup menganggap bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika pembayaran kontrak lebih dari 30 hari tunggakan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)

ii. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

(d) Kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan (lanjutan)

Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Provisi atas penurunan nilai piutang usaha dan piutang lain-lain, dihitung berdasarkan kondisi terkini dan tingkat ketertagihan historis piutang usaha. Provisi ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan taksiran. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat provisi penurunan nilai piutang diungkapkan pada Catatan 5.

Terkait efek pandemi Covid-19, Grup tidak merubah definisi dari kenaikan risiko kredit yang signifikan maupun definisi gagal bayar. Grup juga mengamati perubahan dari keserupaan karakteristik risiko dari piutang usaha tertentu dengan mengevaluasi segmentasi portofolio pelanggan, dimana pelanggan tersebut mungkin terlibat dalam industri bisnis, atau berlokasi di area, yang telah terpengaruh, atau lebih rentan terhadap pandemi. Grup telah mengkaji ulang model yang digunakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian berdasarkan informasi terkini yang wajar dan terdukung untuk lebih mencerminkan perubahan kondisi saat ini. Metode dan pendekatan akan terus dimonitor dan diperbaharui jika terdapat tambahan informasi yang wajar, terdukung, dan tersedia; termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*) dan masukan lainnya.

(e) Pendapatan

(i) Pertimbangan penting dalam menentukan kewajiban pelaksanaan, waktu pengakuan pendapatan dan klasifikasi pendapatan

Grup menyediakan jasa teknologi informatika dengan spesifikasi sesuai pesanan pelanggan. Produk sesuai pesanan pelanggan terdiri dari berbagai barang dan/atau jasa yang dijual dalam satu rangkaian tidak terpisah untuk memberikan layanan solusi terintegrasi kepada pelanggan. Selain produk sesuai pesanan pelanggan, Grup juga menyediakan beberapa produk standar sebagai bagian dari solusi terintegrasi dalam kontrak dengan pelanggan. Diperlukan pertimbangan yang signifikan dalam menentukan jumlah dan sifat kewajiban pelaksanaan yang dijanjikan kepada pelanggan dalam kontrak tersebut. Jumlah dan sifat kewajiban pelaksanaan akan menentukan waktu pengakuan pendapatan untuk kontrak tersebut.

Grup menelaah penentuan kewajiban pelaksanaan berdasarkan kontrak per kontrak. Ketika suatu kontrak yang terdiri dari beberapa barang dan/atau jasa dinilai memiliki satu kewajiban pelaksanaan, Grup menerapkan metode tunggal untuk mengukur tingkat penyelesaian kewajiban pelaksanaan berdasarkan metode pengukuran yang paling menggambarkan ekonomi kontrak, yang dalam banyak kasus adalah berdasarkan waktu.

Grup juga menyajikan klasifikasi pendapatan dengan menggunakan pendekatan yang konsisten. Ketika suatu kontrak yang terdiri dari beberapa barang dan/atau jasa dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan tersendiri, Grup menyajikan kewajiban pelaksanaan dalam komponen laporan keuangan yang paling mewakili layanan utama Grup, yaitu internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika.

(ii) Pertimbangan penting dalam menentukan harga jual yang berdiri sendiri

Grup menyediakan beragam produk yang berkaitan dengan telekomunikasi dan teknologi. Untuk menentukan harga jual yang berdiri sendiri untuk barang dan/atau jasa yang tidak dapat diamati, Grup menggunakan pendekatan margin biaya ditambah biaya yang diharapkan. Grup menentukan margin yang sesuai berdasarkan data historis.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)

ii. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

(f) Uji penurunan nilai aset tidak lancar dan *goodwill*

Penerapan metode akuisisi dalam suatu kombinasi bisnis mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan harga beli kepada nilai pasar wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Akuisisi bisnis tertentu oleh Grup menimbulkan *goodwill*, yang tidak diamortisasi namun diuji bagi penurunan nilai setiap tahunnya dan setiap terdapat indikasi penurunan nilai.

Walaupun manajemen berkeyakinan bahwa asumsi yang digunakan adalah tepat dan memiliki dasar yang kuat, perubahan signifikan pada asumsi tersebut dapat mempengaruhi secara material evaluasi atas nilai terpulihkan dan dapat menimbulkan penurunan nilai sesuai PSAK 48: Penurunan Nilai Aset.

(g) Akuisisi

Grup mengevaluasi setiap transaksi akuisisi untuk menentukan akan diperlakukan sebagai akuisisi aset atau kombinasi bisnis. Untuk transaksi yang diperlakukan sebagai akuisisi aset, harga pembelian dialokasikan untuk aset yang diperoleh, tanpa pengakuan *goodwill*. Untuk akuisisi yang memenuhi definisi kombinasi bisnis, Grup menerapkan metode akuisisi akuntansi atas aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dicatat pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan hasil operasi disertakan dengan hasil Grup dari tanggal akuisisi masing-masing.

Setiap kelebihan dari harga pembelian dibayar atas jumlah yang diakui untuk aset yang diperoleh dan liabilitas diambil alih dicatat sebagai *goodwill*. Grup terus mengevaluasi akuisisi yang diperhitungkan sebagai kombinasi bisnis untuk jangka waktu tidak melebihi satu tahun setelah tanggal akuisisi yang berlaku dari setiap transaksi untuk menentukan apakah penyesuaian tambahan diperlukan untuk alokasi harga pembelian yang dibayarkan untuk aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih biasanya ditentukan dengan menggunakan salah satu perkiraan biaya penggantian atau metode penilaian arus kas diskonto. Ketika menentukan nilai wajar dari aset berwujud yang diperoleh, Grup memperkirakan biaya untuk mengganti aset dengan aset baru dengan mempertimbangkan faktor seperti umur, kondisi, dan masa manfaat ekonomi dari aset. Ketika menentukan nilai wajar dari aset tidak berwujud yang diperoleh, Grup memperkirakan tingkat diskonto yang berlaku dan waktu dan jumlah arus kas masa depan, termasuk tingkat dan persyaratan atas perpanjangan dan pengurangan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS

	31 Maret 2021		31 Desember 2020	
	Saldo		Saldo	
	Mata uang	Mata uang asing (dalam jutaan)	Mata uang	Mata uang asing (dalam jutaan)
	Rp	-	-	-
Kas		48		19
Bank				
Pihak berelasi				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri")	Rp	2.039	-	1.559
	US\$	25	8	110
	EUR	2	2	28
	JPY	1	1	0
	HKD	2	2	3
	AU\$	0	0	0
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI")	Rp	1.188	-	1.129
	US\$	2	5	72
	SGD	0	0	0
	EUR	-	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI")	Rp	237	-	312
	US\$	8	0	6
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("BTN")	Rp	65	-	43
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	Rp	29	-	21
	US\$	0	0	0
	SGD	0	0	0
Sub-jumlah		4.096		3.283
Pihak ketiga				
PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("Bank CIMB Niaga")	Rp	1.234	-	1.576
	US\$	6	0	1
	MYR	-	1	4
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("HSBC Hongkong")	US\$	27	36	504
	HKD	13	5	10
PT Bank Permata Tbk. ("Bank Permata")	Rp	281	-	81
	US\$	-	1	12
Bank of Tokyo, Ltd. ("BoT")	Rp	180	0	7
	US\$	0	0	0
PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")	Rp	4	-	218
Mega International Commercial Bank ("Mega Bank")	US\$	9	-	-
	TWD	39	-	-
PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA")	Rp	99	-	66
	US\$	0	0	2
PT Bank Pembangunan Daerah ("BPD")	Rp	69	-	155
Standard Chartered Bank ("SCB")	Rp	0	-	0
	US\$	7	6	86
	SGD	6	8	81
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	Rp	269	-	187
	US\$	8	8	106
	AU\$	2	41	5
	MYR	4	13	44
	SGD	1	1	15
	EUR	0	0	5
	TWD	1	42	21
Sub-jumlah		3.114		3.186
Jumlah bank		7.210		6.469
Deposito berjangka				
Pihak berelasi				
Bank Mandiri	Rp	6.299	-	2.825
	US\$	-	14	190
BNI	Rp	4.802	-	3.039
	US\$	41	27	385
BRI	Rp	3.793	-	2.421
	US\$	38	34	479
BTN	Rp	3.062	-	2.123
	US\$	5	-	-
Bank Syariah Indonesia Tbk. ("BSI")	Rp	305	-	-
Sub-jumlah		19.479		11.462

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	31 Maret 2021		31 Desember 2020	
	Saldo		Saldo	
	Mata uang	Mata uang asing (dalam jutaan)	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Deposito berjangka (lanjutan)				
Pihak ketiga				
PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega")	Rp	-	1.350	379
	US\$	21	303	131
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("BJB")	Rp	-	876	919
	US\$	11	156	80
PT Bank Maybank Indonesia Tbk. ("Maybank")	Rp	-	602	12
	US\$	29	415	494
PT Bank Bukopin Tbk. ("Bank Bukopin")	Rp	-	900	-
PT Bank Sinarmas Tbk. ("Bank Sinarmas")	Rp	-	255	250
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. ("BTPN")	Rp	-	100	115
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank CIMB Niaga")	Rp	-	31	42
PT Bank Danamon Tbk. ("Bank Danamon")	Rp	-	-	101
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	Rp	-	-	45
	US\$	-	-	71
	MYR	-	4	-
Sub-jumlah		<u>4.992</u>	<u>2.639</u>	<u>2.639</u>
Jumlah deposito berjangka		<u>24.471</u>	<u>14.101</u>	<u>14.101</u>
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian		<u>(0)</u>	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>
Jumlah		<u>31.729</u>	<u>20.589</u>	<u>20.589</u>

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Rupiah	2,50% - 9,50%	2,00% - 8,25%
Mata uang asing	0,20% - 1,75%	0,25% - 2,80%

Pihak berelasi dimana Grup melakukan penempatan dananya merupakan bank milik negara. Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank-bank tersebut karena mereka memiliki jaringan cabang yang luas di Indonesia dan dipertimbangkan sebagai bank yang sehat secara finansial karena dimiliki oleh negara.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

4. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

	<u>31 Maret 2021</u>		<u>31 Desember 2020</u>		
	<u>Saldo</u>		<u>Saldo</u>		
	<u>Mata uang</u>	<u>Mata uang asing (dalam jutaan)</u>	<u>Setara Rupiah</u>	<u>Mata uang asing (dalam jutaan)</u>	<u>Setara Rupiah</u>
Deposito berjangka					
Pihak berelasi					
Bank Mandiri	Rp	-	220	-	180
	US\$	10	145	5	70
BRI	Rp	-	120	-	120
	US\$	19	269	14	197
BNI	Rp	-	60	-	60
	US\$	6	83	20	278
BTN	US\$	6	87	9	126
Sub jumlah			<u>984</u>		<u>1.031</u>
Pihak ketiga					
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	Rp	-	18	-	18
	US\$	5	74	5	71
Jumlah deposito berjangka			<u>1.076</u>		<u>1.120</u>
Rekening penampungan					
	Rp	-	8	-	47
	US\$	0	7	2	27
Jumlah rekening penampungan			<u>15</u>		<u>74</u>
Reksa dana					
Pihak berelasi					
PT Bahana TCW Investment Management ("Bahana TCW")	Rp	-	75	-	77
Jumlah reksa dana			<u>75</u>		<u>77</u>
Lainnya (masing-masing di bawah Rp75 miliar)					
	Rp	-	32	-	-
	US\$	-	-	2	32
Jumlah lainnya			<u>32</u>		<u>32</u>
Jumlah			<u>1.198</u>		<u>1.303</u>

Seluruh deposito berjangka di atas memiliki tanggal jatuh tempo lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun, dengan tingkat bunga per tahun sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Rupiah	3,00% - 3,50%	3,25% - 6,50%
Mata uang asing	0,10% - 1,08%	0,15% - 1,08%

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA

Piutang usaha berhubungan dengan jasa yang diberikan kepada pelanggan *retail* dan *non-retail*. dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

(i) Pihak berelasi

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
BUMN	1.382	1.564
Indonusa	504	504
Indosat	299	225
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp75 miliar)	457	407
Jumlah	2.642	2.700
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(1.169)	(1.056)
Jumlah bersih	1.473	1.644

(ii) Pihak ketiga

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Pelanggan individual dan bisnis	16.083	15.095
Penyelenggara jasa telekomunikasi internasional luar negeri	2.161	1.904
Jumlah	18.244	16.999
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(7.337)	(7.304)
Jumlah bersih	10.907	9.695

b. Berdasarkan umur

(i) Pihak berelasi

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Sampai dengan 3 bulan	1.500	1.356
3 sampai dengan 6 bulan	172	253
Lebih dari 6 bulan	970	1.091
Jumlah	2.642	2.700
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(1.169)	(1.056)
Jumlah bersih	1.473	1.644

(ii) Pihak ketiga

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Sampai dengan 3 bulan	10.104	8.762
3 sampai dengan 6 bulan	873	1.021
Lebih dari 6 bulan	7.267	7.216
Jumlah	18.244	16.999
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(7.337)	(7.304)
Jumlah bersih	10.907	9.695

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan umur (lanjutan)

(iii) Umur total piutang usaha

	31 Maret 2021			31 Desember 2020		
	Penyisihan		Tingkat	Penyisihan		Tingkat
	Sebelum penyisihan	kerugian ekspektasian	kerugian kredit ekspektasian	Sebelum penyisihan	kerugian kredit ekspektasian	kerugian kredit ekspektasian
Belum jatuh tempo	8.422	699	8,3%	7.818	696	8,9%
Jatuh tempo sampai dengan 3 bulan	3.182	342	10,7%	2.300	488	21,2%
Jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan	1.045	409	39,1%	1.274	495	38,9%
Jatuh tempo lebih dari 6 bulan	8.237	7.056	85,7%	8.307	6.681	80,4%
Jumlah	20.886	8.506		19.699	8.360	

Grup telah membentuk penyisihan kerugian kredit ekspektasian berdasarkan tingkat penurunan nilai historis secara kolektif dan historis kredit para pelanggan secara individual. Grup tidak membedakan piutang usaha pihak berelasi dan piutang usaha pihak ketiga dalam menilai jumlah yang jatuh tempo. Pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, nilai tercatat piutang usaha Grup yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya masing-masing sebesar Rp4.657 miliar dan Rp4.217 miliar. Manajemen telah menyimpulkan bahwa piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya, termasuk piutang usaha yang belum jatuh tempo dan juga tidak diturunkan nilainya, adalah terutang dari para pelanggan dengan tingkat ketertagihan yang baik dan diharapkan dapat terpulihkan.

c. Berdasarkan mata uang

(i) Pihak berelasi

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Rupiah	2.639	2.690
Dolar A.S.	3	10
Jumlah	2.642	2.700
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(1.169)	(1.056)
Jumlah bersih	1.473	1.644

(ii) Pihak ketiga

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Rupiah	15.121	14.635
Dolar A.S.	3.007	2.265
Dolar Singapura	68	75
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp75 miliar)	48	24
Jumlah	18.244	16.999
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(7.337)	(7.304)
Jumlah bersih	10.907	9.695

d. Mutasi penyisihan kerugian kredit ekspektasian

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Saldo awal	8.360	6.203
Penyesuaian atas penerapan awal PSAK 71	-	(14)
Penyisihan yang diakui selama periode berjalan	492	2.362
Penghapusbukuan piutang	(346)	(191)
Saldo akhir	8.506	8.360

Penghapusbukuan piutang merupakan penghapusbukuan piutang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga.

Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan kerugian kredit ekspektasian cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, piutang usaha tertentu entitas anak masing-masing sebesar Rp2.722 miliar dan Rp3.432 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 19a dan 20c).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. ASET KONTRAK

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Aset kontrak	1.443	1.351
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(136)	(112)
Jumlah bersih	1.307	1.239
Jangka pendek	(1.098)	(1.036)
Jangka panjang	209	203

Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan kerugian kredit ekspektasian cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya aset kontrak.

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

7. PERSEDIAAN

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Komponen	569	560
Kartu SIM dan voucher Prabayar	285	265
Lain-lain	110	226
Jumlah	964	1.051
Provisi atas persediaan usang		
Komponen	(32)	(37)
Kartu SIM dan voucher Prabayar	(28)	(28)
Lain-lain	(3)	(3)
Jumlah	(63)	(68)
Jumlah bersih	901	983

Mutasi provisi atas persediaan usang adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Saldo awal	68	92
Provisi yang diakui selama periode berjalan	-	1
Penghapusbukuan persediaan	(5)	(25)
Saldo akhir	63	68

Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi atas persediaan usang cukup untuk menutup kerugian akibat dari penurunan nilai persediaan karena usang.

Persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban usaha operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi pada 31 Maret 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp134 miliar dan Rp123 miliar (Catatan 26).

Pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, persediaan tertentu entitas anak masing-masing sebesar Rp557 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 20c).

Pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, modul (bagian dari aset tetap) dan komponen dengan nilai buku masing-masing sebesar Rp105 miliar dan Rp107 miliar, yang dimiliki oleh Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lain. Total nilai pertanggungan pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp155 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang muncul dari risiko yang ditanggung.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. ASET LANCAR LAINNYA

Rincian dari aset lancar lainnya adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Izin penggunaan frekuensi dibayar di muka (Catatan 36c.i)	4.129	4.554
Uang muka	1.392	1.339
Sewa dibayar di muka	247	259
Gaji dibayar di muka	230	180
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	342	229
Jumlah	6.340	6.561

9. BIAYA KONTRAK

Rincian dari biaya kontrak adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2021		
	Biaya perolehan kontrak	Biaya pemenuhan kontrak	Jumlah
Saldo, 1 Januari 2021	1.245	463	1.708
Amortisasi selama periode berjalan	(52)	(132)	(184)
Penambahan selama periode berjalan	176	260	436
Saldo, 31 Maret 2021	1.369	591	1.960
Jangka pendek	(215)	(316)	(531)
Jangka panjang	1.154	275	1.429

	31 Desember 2020		
	Biaya perolehan kontrak	Biaya pemenuhan kontrak	Jumlah
Saldo, 31 Desember 2019	-	-	-
Penyesuaian atas penerapan awal PSAK 72	696	489	1.185
Jumlah	696	489	1.185
Saldo, 1 Januari 2020	696	489	1.185
Amortisasi selama periode berjalan	(150)	(368)	(518)
Penambahan selama periode berjalan	699	342	1.041
Saldo, 31 Desember 2020	1.245	463	1.708
Jangka pendek	(193)	(261)	(454)
Jangka panjang	1.052	202	1.254

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PENYERTAAN JANGKA PANJANG PADA INSTRUMEN KEUANGAN

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Obligasi konversi		
PT Aplikasi Karya Anak Bangsa ("AKAB")	2.116	2.116
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	223	223
Jumlah obligasi konversi	2.339	2.339
Investasi pada ekuitas	1.968	1.706
Total	4.307	4.045

Pada tanggal 16 November 2020, Telkomsel mengadakan perjanjian AKAB untuk investasi dalam bentuk obligasi konversi tanpa bunga senilai US\$150 juta (setara dengan Rp2.116 miliar pada tanggal 31 Desember 2020), yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2023. Obligasi konversi tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2023. Investasi pada obligasi konversi ini diklasifikasikan sebagai FVTPL karena dimiliki oleh Telkomsel bukan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan tidak semata-mata pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang terhutang.

Investasi pada ekuitas termasuk investasi MDI pada beberapa perusahaan *start-up* yang bergerak di bidang informasi dan teknologi. Penambahan investasi pada periode berjalan oleh MDI berjumlah sebesar Rp286 miliar. Investasi pada ekuitas ini diklasifikasikan sebagai FVTPL.

11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG PADA ENTITAS ASOSIASI

Rincian penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi dengan metode ekuitas untuk periode 31 Maret 2021:

	2021							
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan (pengurangan)	Bagian laba (rugi) bersih	Dividen	Bagian penghasilan komprehensif lain	Penurunan nilai	Saldo akhir
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:								
Jalin ^a	33,00	89	-	4	-	-	-	93
Finarya ^b	24,33	87	-	(60)	-	-	-	27
Tiphone ^c	24,00	-	-	-	-	-	-	-
Indonusa ^d	20,00	-	-	3	-	-	-	3
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar) ^e		16	38	(1)	-	-	-	53
Jumlah penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi		192	38	(54)	-	-	-	176

Ringkasan informasi keuangan investasi Grup yang diperhitungkan dengan menggunakan metode ekuitas untuk periode 31 Maret 2021*:

	Jalin	Finarya	Indonusa	Lain-lain
<i>Laporan posisi keuangan</i>				
Aset lancar	231	2.769	679	1.027
Aset tidak lancar	183	157	318	4.611
Liabilitas jangka pendek	(121)	(1.896)	(409)	(757)
Liabilitas jangka panjang	(14)	(24)	(574)	(4.488)
Ekuitas (defisit)	279	1.006	14	393
<i>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya</i>				
Pendapatan	84	29	190	318
Beban operasional	(68)	(283)	(168)	(282)
Penghasilan (beban) lain-lain termasuk biaya pendanaan - bersih	-	10	(13)	(39)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	16	(244)	9	(3)
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(4)	3	-	3
Laba (rugi) periode berjalan	12	(241)	9	-
Laba (rugi) komprehensif lain	-	-	-	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode berjalan	12	(241)	9	-

* Ringkasan informasi keuangan Tiphone pada tanggal 31 Maret 2021 tidak tersedia.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Rincian penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi dengan metode ekuitas untuk periode per 31 Desember 2020:

	2020							
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan (pengurangan)	Bagian laba (rugi) bersih	Dividen	Bagian penghasilan komprehensif lain	Penurunan nilai	Saldo akhir
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:								
Jalin ^a	33,00	77	-	17	(5)	(0)	-	89
Finarya ^b	25,00	267	28	(209)	-	1	-	87
Tiphone ^c	24,00	526	-	(41)	-	-	(485)	-
Indonusa ^d	20,00	210	-	-	-	-	(210)	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar) ^e		130	(33)	(13)	-	(0)	(68)	16
Jumlah penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi		1.210	(5)	(246)	(5)	1	(763)	192

Ringkasan informasi keuangan investasi Grup yang diperhitungkan dengan menggunakan metode ekuitas untuk periode 31 Desember 2020:

	Jalin	Finarya	Indonusa	Lain-lain
<i>Laporan posisi keuangan</i>				
Aset lancar	187	3.160	565	972
Aset tidak lancar	194	169	331	4.516
Liabilitas jangka pendek	(92)	(2.327)	(318)	(795)
Liabilitas jangka panjang	(22)	(41)	(573)	(4.398)
Ekuitas (defisit)	267	961	5	295
<i>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya</i>				
Pendapatan	277	133	783	1.278
Beban operasional	(205)	(948)	(691)	(1.035)
Penghasilan (beban) lain-lain termasuk biaya pendanaan - bersih	(3)	69	(24)	(92)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	69	(746)	68	151
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(18)	2	(6)	(4)
Laba (rugi) periode berjalan	51	(744)	62	147
Laba (rugi) komprehensif lain	(1)	4	7	(27)
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode berjalan	50	(740)	69	120

* Ringkasan informasi keuangan Tiphone pada tanggal 31 Desember 2020 tidak tersedia.

^a Jalin sebelumnya adalah entitas anak. Pada tanggal 19 Juni 2019 Grup menjual 67% kepemilikan sahamnya kepada PT Danareksa (Persero) ("Danareksa") senilai Rp395 miliar.

^b Pada tanggal 21 Januari 2019, Telkomsel mendirikan anak perusahaan PT Fintek Karya Nusantara ("Finarya") dengan modal awal Rp25 miliar dan pada tanggal 22 Februari 2019 Telkomsel mengalihkan asetnya sebesar Rp 150 miliar. Atas akuisisi ini Telkomsel memperoleh masing-masing 2.499 dan 14.974 lembar saham (kepemilikan saham 100%). Telkomsel dengan PT Mandiri Capital Indonesia, PT BRI Ventura Indonesia, PT BNI Sekuritas, PT Jasamarga Tollroad Operator, PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero), PT Pertamina Retail, PT Kereta Commuter Indonesia ("KCI"), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan PT Danareksa Capital, menandatangani perjanjian pemegang saham pada tanggal 31 Juli 2019, 31 Oktober 2019, dan 31 Desember 2019 sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor oleh masing-masing pemegang saham. Pada tanggal 31 Desember 2019, Telkomsel memiliki 48.530 lembar saham atau setara dengan 26,58% kepemilikan saham.

Pada tanggal 23 Oktober 2020, Finarya menerbitkan 13.632 saham seri B yang dimiliki oleh Grab LA Pte Ltd ("Grab") sebesar 11.237 lembar saham, PT BRI Ventura Indonesia sebesar 943 lembar saham, PT Mandiri Capital Indonesia sebesar 924 lembar saham dan Telkomsel sebesar 528 lembar saham. Investasi ini menurunkan kepemilikan Telkomsel di Finarya menjadi 25,00%. Pada tanggal 8 Maret 2021, PT Dompot Karya Anak Bangsa ("DKAB") berinvestasi di Finarya yang menyebabkan kepemilikan Telkomsel turun dari 25% menjadi 24,33%.

^c Tiphone berdiri pada tanggal 25 Juni 2008 dengan nama PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Tiphone bergerak di bidang perdagangan perangkat telekomunikasi berupa telepon seluler berikut suku cadang, aksesoris, pulsa serta jasa perbaikan dan penyediaan konten melalui anak perusahaan. Pada tanggal 18 September 2014, Perusahaan melalui PINS melakukan pembelian 25% saham kepemilikan di Tiphone senilai Rp1.395 miliar, termasuk didalamnya aset tak berwujud dan goodwill masing-masing sebesar Rp188 miliar dan Rp647 miliar. Pada tahun 2020, Manajemen telah mengakui penurunan nilai penuh atas investasi pada Tiphone mengingat keraguan atas kelangsungan bisnis, kondisi keuangan dan penangguhan saham yang berlaku efektif 10 Juni 2020. Manajemen telah memutuskan untuk membukukan penyisihan penuh untuk investasi di Tiphone per 31 Desember 2020.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

- ^d Indonusa sebelumnya adalah entitas anak. Pada tahun 2013 Perusahaan menjual 80% kepemilikan sahamnya. Pada tanggal 14 Mei 2014, berdasarkan Surat Sirkuler Pemegang Saham Indonusa yang tercakup dalam akta notaris No. 57 tanggal 23 April 2014 oleh FX Budi Santoso Isbandi, S.H., yang disetujui oleh Menkumham dalam Surat No. AHU-02078.40.20.2014 tanggal 29 April 2014, pemegang saham Indonusa menyetujui atas peningkatan jumlah saham yang diterbitkan dan dibayar penuh sejumlah Rp80 miliar. Perusahaan telah menggunakan haknya atas saham yang diterbitkan dan melakukan pengalihan ke Metra sehingga kepemilikan Metra atas Indonusa meningkat menjadi 4,33% dan kepemilikan Perusahaan atas Indonusa menjadi 15,67%. Berdasarkan penilaian manajemen, pada tanggal 31 Desember 2020 terdapat penyisihan penurunan nilai investasi pada Indonusa.
- ^e Bagian kumulatif rugi atas investasi lain-lain yang tidak diakui hingga periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah Rp232 miliar dan Rp228 miliar.

12. ASET TETAP

	<u>1 Januari 2021</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Reklasifikasi/ Translasi</u>	<u>31 Maret 2021</u>
Harga perolehan:					
Aset tetap pemilikan langsung					
Tanah	1.800	-	-	(20)	1.780
Bangunan	16.137	15	-	235	16.387
Renovasi bangunan sewa	1.410	4	(2)	-	1.412
Peralatan sentral telepon	17.506	86	-	372	17.964
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	2.012	25	-	(429)	1.608
Peralatan dan instalasi transmisi	159.196	465	(22)	192	159.831
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	10.423	69	-	(49)	10.443
Jaringan kabel	60.796	1.300	-	(917)	61.179
Catu daya	20.988	98	(14)	189	21.261
Peralatan pengolahan data	17.663	15	(8)	934	18.604
Peralatan telekomunikasi lainnya	7.513	2	-	6	7.521
Peralatan kantor	2.125	13	(1)	(28)	2.109
Kendaraan	551	3	-	(37)	517
Peralatan lainnya	68	4	-	(18)	54
Aset dalam pembangunan	2.524	3.634	(48)	(3.347)	2.763
Jumlah	<u>320.712</u>	<u>5.733</u>	<u>(95)</u>	<u>(2.917)</u>	<u>323.433</u>

	<u>1 Januari 2021</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Reklasifikasi/ Translasi</u>	<u>31 Maret 2021</u>
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:					
Aset tetap pemilikan langsung					
Bangunan	4.872	146	-	24	5.042
Renovasi bangunan sewa	1.061	32	(1)	-	1.092
Peralatan sentral telepon	11.621	454	-	112	12.187
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	1.582	-	-	-	1.582
Peralatan dan instalasi transmisi	87.991	2.840	(15)	(1.879)	88.937
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	4.412	187	-	55	4.654
Jaringan kabel	15.978	653	-	(54)	16.577
Catu daya	14.757	382	(12)	(4)	15.123
Peralatan pengolahan data	12.780	404	(5)	1	13.180
Peralatan telekomunikasi lainnya	2.885	345	-	-	3.230
Peralatan kantor	1.574	88	-	(5)	1.657
Kendaraan	229	15	-	(4)	240
Peralatan lainnya	47	1	-	(3)	45
Jumlah	<u>159.789</u>	<u>5.547</u>	<u>(33)</u>	<u>(1.757)</u>	<u>163.546</u>
Nilai buku bersih	<u>160.923</u>				<u>159.887</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP (lanjutan)

	31 Desember 2019	Dampak penerapan PSAK 73	1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi /Translasi	31 Desember 2020
Harga perolehan:							
Aset tetap pemilikan langsung							
Tanah	1.644	-	1.644	157	-	(1)	1.800
Bangunan	14.062	-	14.062	201	-	1.874	16.137
Renovasi bangunan sewa	1.549	-	1.549	31	(192)	22	1.410
Peralatan sentral telepon	17.348	-	17.348	956	(1.921)	1.123	17.506
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	2.258	-	2.258	429	-	(675)	2.012
Peralatan dan instalasi transmisi	151.750	-	151.750	1.050	(3.825)	10.221	159.196
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	12.344	-	12.344	236	(2)	(2.155)	10.423
Jaringan kabel	54.357	-	54.357	8.280	(68)	(1.773)	60.796
Catu daya	20.113	-	20.113	45	(311)	1.141	20.988
Peralatan pengolahan data	16.409	-	16.409	3	(703)	1.954	17.663
Peralatan telekomunikasi lainnya	5.340	-	5.340	2.157	-	16	7.513
Peralatan kantor	2.361	-	2.361	216	(354)	(98)	2.125
Kendaraan	568	-	568	48	(104)	39	551
Peralatan lainnya	123	-	123	17	-	(72)	68
Aset dalam pembangunan	2.619	-	2.619	15.610	(8)	(15.697)	2.524
Aset sewa pembiayaan							
Peralatan dan instalasi transmisi	5.500	(5.500)	-	-	-	-	-
Peralatan pengolahan data	1	(1)	-	-	-	-	-
Kendaraan	503	(503)	-	-	-	-	-
Peralatan kantor	42	(42)	-	-	-	-	-
Aset CPE	22	(22)	-	-	-	-	-
Catu daya	-	-	-	-	-	-	-
Aset PBH	89	-	89	-	-	(89)	-
Jumlah	<u>309.002</u>	<u>(6.068)</u>	<u>302.934</u>	<u>29.436</u>	<u>(7.488)</u>	<u>(4.170)</u>	<u>320.712</u>
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:							
Aset tetap pemilikan langsung							
Bangunan	4.113	-	4.113	739	-	20	4.872
Renovasi bangunan sewa	1.091	-	1.091	158	(188)	-	1.061
Peralatan sentral telepon	11.976	-	11.976	1.569	(1.921)	(3)	11.621
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	1.580	-	1.580	-	-	2	1.582
Peralatan dan instalasi transmisi	79.993	-	79.993	11.463	(3.545)	80	87.991
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	5.809	-	5.809	900	(1)	(2.296)	4.412
Jaringan kabel	14.171	-	14.171	2.509	(66)	(636)	15.978
Catu daya	13.596	-	13.596	1.512	(309)	(42)	14.757
Peralatan pengolahan data	11.977	-	11.977	1.522	(708)	(11)	12.780
Peralatan telekomunikasi lainnya	1.766	-	1.766	1.120	-	(1)	2.885
Peralatan kantor	1.678	-	1.678	375	(360)	(119)	1.574
Kendaraan	210	-	210	74	(70)	15	229
Peralatan lainnya	66	-	66	2	-	(21)	47
Aset sewa pembiayaan							
Peralatan dan instalasi transmisi	3.734	(3.734)	-	-	-	-	-
Peralatan pengolahan data	1	(1)	-	-	-	-	-
Kendaraan	115	(115)	-	-	-	-	-
Peralatan kantor	44	(44)	-	-	-	-	-
Aset CPE	20	(20)	-	-	-	-	-
Catu daya	-	-	-	-	-	-	-
Aset PBH	89	-	89	-	-	(89)	-
Jumlah	<u>152.029</u>	<u>(3.914)</u>	<u>148.115</u>	<u>21.943</u>	<u>(7.168)</u>	<u>(3.101)</u>	<u>159.789</u>
Nilai buku bersih	<u>156.973</u>		<u>302.934</u>	<u>29.436</u>	<u>(7.488)</u>	<u>(4.170)</u>	<u>320.712</u>

a. Laba dari penjualan aset tetap

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Hasil penjualan aset tetap	147	45
Nilai buku bersih	(13)	(7)
Labanya dari pelepasan atau penjualan aset tetap	<u>134</u>	<u>38</u>

b. Lain-lain

- (i) Pada tanggal 31 Desember 2020, UPK yang menghasilkan proyeksi arus kas masuk adalah sambungan nirkabel tidak bergerak, seluler, dan lainnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset dari UPK tersebut pada tanggal 31 Desember 2020.
- (ii) Bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan sejumlah Rp132 miliar dan Rp22 miliar masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020. Tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi berkisar antara 0,80%-11% dan 1,29%-11% masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP (lanjutan)

b. Lain-lain (lanjutan)

- (iii) Tidak ada rugi selisih kurs yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (iv) Pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, Grup telah mendapat klaim asuransi atas aset tetap yang hilang dan rusak masing-masing sebesar Rp85 miliar dan Rp3 miliar dan dicatat sebagai bagian dari "Penghasilan Lain-Lain - bersih" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, nilai tercatat aset tetap tersebut masing-masing sebesar Rp76 miliar dan Rp1 miliar, telah dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
- (v) Pada tahun 2018, umur manfaat lisensi piranti lunak radio dan peralatan pengolahan data diubah masing-masing dari 7 tahun menjadi 10 tahun dan dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Dampak pengurangan beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp266 miliar.

Pada tahun 2020, umur manfaat menara Grup yang berada di Indonesia diubah dari 20 tahun menjadi 30 tahun. Dampak pengurangan beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp160 miliar. Menara disajikan sebagai bagian dari peralatan dan instalasi transmisi.

- (vi) Grup memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di berbagai daerah di Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan ("HGB") berjangka waktu 10-50 tahun yang akan habis masa berlakunya antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2070. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan untuk memperpanjang hak atas tanah pada saat berakhirnya hak tersebut.
- (vii) Pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, aset tetap milik Grup kecuali tanah, dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp155.768 miliar dan Rp159.454 miliar telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, gempa bumi dan risiko lainnya, termasuk gangguan bisnis, dengan jumlah keseluruhan pertanggungan masing-masing sebesar Rp21.582 miliar dan Rp22.886 miliar, US\$Nihil, HKD8 juta, SGD315 juta, dan MYR44 juta dan MYR39 juta dan *first loss basis* masing-masing sebesar Rp2.750 miliar. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.
- (viii) Pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, tingkat persentase penyelesaian aset dalam pembangunan adalah masing-masing sekitar 68,47% dan 61,19% dari nilai kontrak dengan perkiraan penyelesaian masing-masing sampai dengan Maret 2024 dan Maret 2023. Saldo aset dalam pembangunan tersebut terutama terdiri dari bangunan, peralatan dan instalasi transmisi, jaringan kabel dan catu daya. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian aset dalam pembangunan.
- (ix) Pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, seluruh aset yang dimiliki Perusahaan telah dijamin dalam perjanjian obligasi (Catatan 20b.i). Aset tetap entitas anak tertentu dengan biaya perolehan masing-masing sebesar Rp16.635 miliar dan Rp14.115 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 19a, 20c, dan 20d).
- (x) Pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap Grup yang telah disusutkan secara penuh dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp65.955 miliar dan Rp63.656 miliar. Grup saat ini sedang melakukan modernisasi aset jaringan untuk menggantikan aset tetap yang sudah disusutkan secara penuh.
- (xi) Pada tahun 2020, nilai wajar tanah dan bangunan Grup, yang ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak ("NJOP") tanah dan bangunan yang bersangkutan adalah sebesar Rp41.984 miliar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

13. ASET HAK-GUNA

Grup menyewa beberapa aset termasuk tanah, bangunan, instalasi dan peralatan transmisi, catu daya, kendaraan, dan peralatan lainnya yang digunakan dalam operasinya, yang pada umumnya memiliki masa sewa antara 1 dan 33 tahun.

Grup juga memiliki sewa tertentu dengan jangka waktu dua belas bulan atau kurang dan nilai sewa bernilai rendah. Grup menerapkan 'sewa jangka pendek' dan 'sewa aset bernilai rendah' sebagai pengecualian untuk sewa ini. Tidak ada kontrak sewa dengan pembayaran sewa variabel. Beban sewa jangka pendek dan beban sewa aset bernilai rendah untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp1.007 miliar dan Rp909 miliar.

Nilai tercatat aset hak guna yang diakui dan mutasi selama periode berjalan:

	1 Januari 2021	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ translasi	31 Maret 2021
Harga perolehan:					
Tanah	4.863	58	(160)	2	4.763
Bangunan	734	31	(6)	12	771
Peralatan dan instalasi transmisi	16.072	21	(141)	4	15.956
Catu daya	641	-	(44)	-	597
Kendaraan	676	40	(2)	0	714
Lain-lain	29	1	(0)	0	30
Jumlah	<u>23.015</u>	<u>151</u>	<u>(353)</u>	<u>18</u>	<u>22.831</u>
Akumulasi amortisasi					
Tanah	(763)	(209)	118	0	(854)
Bangunan	(166)	(86)	14	(3)	(241)
Peralatan dan instalasi transmisi	(3.160)	(859)	100	(1)	(3.920)
Catu daya	(200)	(50)	44	-	(206)
Kendaraan	(141)	(71)	11	0	(201)
Lain-lain	(19)	(2)	0	0	(21)
Jumlah	<u>(4.449)</u>	<u>(1.277)</u>	<u>287</u>	<u>(4)</u>	<u>(5.443)</u>
Nilai buku bersih	<u>18.566</u>				<u>17.388</u>

	31 Desember 2019	Dampak penerapan PSAK 73	1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ translasi	31 Desember 2020
Harga perolehan:							
Tanah	-	3.777	3.777	1.407	(322)	1	4.863
Bangunan	-	639	639	132	(8)	(29)	734
Peralatan dan instalasi transmisi	-	14.873	14.873	1.872	(674)	1	16.072
Catu daya	-	544	544	97	-	-	641
Kendaraan	-	540	540	138	(2)	-	676
Lain-lain	-	45	45	1	(1)	(16)	29
Jumlah	-	<u>20.418</u>	<u>20.418</u>	<u>3.647</u>	<u>(1.007)</u>	<u>(43)</u>	<u>23.015</u>
Akumulasi amortisasi							
Tanah	-	-	-	(812)	49	-	(763)
Bangunan	-	-	-	(193)	4	23	(166)
Peralatan dan instalasi transmisi	-	-	-	(3.687)	527	-	(3.160)
Catu daya	-	-	-	(200)	-	-	(200)
Kendaraan	-	-	-	(141)	-	-	(141)
Lain-lain	-	-	-	(20)	1	-	(19)
Jumlah	-	-	-	<u>(5.053)</u>	<u>581</u>	<u>23</u>	<u>(4.449)</u>
Nilai buku bersih	-						<u>18.566</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET HAK-GUNA (lanjutan)

Nilai tercatat liabilitas sewa dan rincian mutasinya adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Saldo awal	15.617	16.600
Penambahan	767	3.964
Pengurangan	(2.366)	(4.947)
Saldo akhir	14.018	15.617
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(6.451)	(5.396)
Bagian jangka panjang	7.567	10.221

Jatuh tempo pembayaran liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

<u>Tahun</u>	<u>31 Maret 2021</u>
2021	7.208
2022	1.725
2023	2.151
2024	1.872
2025	1.305
Selanjutnya	1.749
Jumlah pembayaran sewa	16.010
Bunga	(1.992)
Nilai kini atas pembayaran sewa	14.018
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(6.451)
Bagian jangka panjang	7.567

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Rincian dari aset tidak lancar lainnya adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Tagihan restitusi pajak - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 28b)	2.256	1.382
Izin penggunaan frekuensi dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 8)	1.174	1.237
Beban tanggungan	724	498
Pajak dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 28a)	601	787
Uang muka pembelian aset tetap	565	404
Setoran jaminan	148	168
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	447	357
Jumlah	5.915	4.833

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. ASET TAKBERWUJUD

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

	<i>Goodwill</i>	Piranti lunak	Lisensi	Aset takberwujud lainnya	Jumlah
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 1 Januari 2021	1.428	14.688	94	1.474	17.684
Penambahan	-	695	-	3	698
Pengurangan	-	(19)	-	-	(19)
Reklasifikasi/translasi	(12)	(134)	-	(16)	(162)
Saldo, 31 Maret 2021	<u>1.416</u>	<u>15.230</u>	<u>94</u>	<u>1.461</u>	<u>18.201</u>
Akumulasi amortisasi:					
Saldo, 1 Januari 2021	(125)	(9.863)	(94)	(756)	(10.838)
Beban amortisasi	-	(401)	-	(42)	(443)
Penurunan nilai	-	-	-	-	-
Pengurangan	-	11	-	-	11
Reklasifikasi/translasi	-	(3)	-	13	10
Saldo, 31 Maret 2021	<u>(125)</u>	<u>(10.256)</u>	<u>(94)</u>	<u>(785)</u>	<u>(11.260)</u>
Nilai buku bersih	<u>1.291</u>	<u>4.974</u>	<u>-</u>	<u>676</u>	<u>6.941</u>

	<i>Goodwill</i>	Piranti lunak	Lisensi	Aset takberwujud lainnya	Jumlah
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 1 Januari 2020	1.432	12.480	96	1.571	15.579
Penambahan	-	2.282	3	3	2.288
Pengurangan	-	(166)	-	(74)	(240)
Reklasifikasi/translasi	(4)	92	(5)	(26)	57
Saldo, 31 Desember 2020	<u>1.428</u>	<u>14.688</u>	<u>94</u>	<u>1.474</u>	<u>17.684</u>
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai:					
Saldo, 1 Januari 2020	(29)	(8.400)	(93)	(611)	(9.133)
Beban amortisasi	-	(1.545)	(9)	(176)	(1.730)
Penurunan nilai	(104)	-	-	-	(104)
Pengurangan	-	124	-	-	124
Reklasifikasi/translasi	8	(42)	8	31	5
Saldo, 31 Desember 2020	<u>(125)</u>	<u>(9.863)</u>	<u>(94)</u>	<u>(756)</u>	<u>(10.838)</u>
Nilai buku bersih	<u>1.303</u>	<u>4.825</u>	<u>0</u>	<u>718</u>	<u>6.846</u>

- (i) *Goodwill* timbul dari akuisisi Sigma (2008), Admedika (2010), *data center* PT Bina Data Mandiri (“BDM”) (2012), Contact Centres Australia Pty. Ltd. (2014), PT Media Nusantara Data Global (“MNDG”) (2015), Melon dan PT Griya Silkindo Drajatmoerni (“GSDm”) (2016), TSGN dan Nutech (2017), SSI, CIP, dan Telin Malaysia (2018), dan PST (2019).
- (ii) Pada tanggal 31 Desember 2020, *goodwill* yang mengalami penurunan nilai adalah *goodwill* yang timbul dari akuisisi Sigma, Contact Centres Australia Pty. Ltd., dan *platform Tiketapasaja.com* masing-masing sebesar Rp88 miliar, Rp14 miliar, dan Rp2 miliar.
- (iii) Beban amortisasi diakui sebagai bagian dari “Penyusutan dan Amortisasi” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Sisa periode amortisasi dari aset takberwujud piranti lunak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing 1-6 tahun.
- (iv) Pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, jumlah tercatat bruto dari aset takberwujud yang telah diamortisasi seluruhnya dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp7.320 miliar dan Rp7.077 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG USAHA

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Pihak berelasi		
Pembelian peralatan, barang, dan jasa	630	678
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	244	250
Sub-jumlah	874	928
Pihak ketiga		
Pembelian peralatan, barang, dan jasa	10.535	11.953
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	2.830	2.914
Beban pemakaian frekuensi radio, beban hak penyelenggaraan, dan Kewajiban Pelayanan Universal ("KPU")	1.772	1.204
Sub-jumlah	15.137	16.071
Jumlah	16.011	16.999

Utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Rupiah	13.668	14.895
Dolar A.S.	2.288	2.012
Lain-lain	55	92
Jumlah	16.011	16.999

Syarat dan ketentuan atas kewajiban keuangan diatas:

1. Utang usaha tidak dikenakan bunga dan secara umum diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun.
2. Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi pihak berelasi.
3. Lihat Catatan 38b.v untuk manajemen risiko likuiditas Grup.

17. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Rincian beban yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	7.856	8.455
Gaji dan tunjangan	3.576	3.399
Umum, administrasi, dan pemasaran	2.741	2.255
Beban bunga dan administrasi bank	348	156
Jumlah	14.521	14.265

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. LIABILITAS KONTRAK

a. Liabilitas kontrak jangka pendek

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Uang muka pelanggan Mobile	4.206	5.047
Uang muka pelanggan Enterprise	2.040	1.884
Uang muka pelanggan WIB	655	668
Uang muka pelanggan Consumer	119	111
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	203	124
Jumlah	7.223	7.834

b. Liabilitas kontrak jangka panjang

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Uang muka pelanggan Consumer	633	588
Uang muka pelanggan WIB	359	345
Uang muka pelanggan Enterprise	59	68
Lain-lain	52	3
Jumlah	1.103	1.004

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

19. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN

a. Utang bank jangka pendek

Kreditur	Mata uang	31 Maret 2021		31 Desember 2020	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asal	Setara Rupiah	Mata uang asal	Setara Rupiah
Pihak berelasi					
Bank Mandiri	Rp	-	4.600	-	2.900
BNI	Rp	-	1.073	-	897
PT Bank BNI Syariah ("BNI Syariah")	Rp	-	-	-	-
Sub-jumlah			5.673		3.797
Pihak ketiga					
HSBC	Rp	-	2.331	-	2.304
	US\$	0	1	0	4
MUFG Bank, Ltd. ("MUFG Bank")	Rp	-	1.911	-	2.611
Bank of China	Rp	-	1.000	-	-
Bank DBS	Rp	-	485	-	573
	US\$	1	104	1	13
PT Bank UOB Indonesia ("UOB Indonesia")	Rp	-	400	-	200
SCB	Rp	-	135	-	100
Bank CIMB Niaga	Rp	-	78	-	78
BTPN	Rp	-	-	-	110
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	Rp	-	73	-	73
	US\$	-	-	5	71
Sub-jumlah			6.518		6.137
Jumlah			12.191		9.934

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)	Jatuh tempo fasilitas pinjaman	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan**
Mandiri 2019 - 2020	Perusahaan, Finnet	Rp	2.900	28 April 2021 - 21 November 2021	Bulanan, Kuartalan	1 bulan JIBOR + 1,50% 3 bulan JIBOR + 0,60%	Tidak ada
BNI 2014 - 2020	GSD, Sigma ^a , TLT	Rp	415	23 Agustus 2021 - 9 Januari 2022	Bulanan	8,50% - 9,00%	Piutang usaha dan aset tetap
2018 - 2021	Infomedia ^b , Sigma ^h , Metranet, Telkom Infratel	Rp	1.140	6 Juni 2021 - 29 Maret 2022	Bulanan	1 bulan JIBOR + 2,10% - 2,50%	Aset tetap
HSBC 2018	Sigma ^{c,h}	Rp	600	15 Juli 2021	Bulanan	Under BLR 8,75%	Piutang usaha
2018	Sigma ^{c,h}	US\$	0,004	15 Juli 2021	Bulanan	Under BLR 9,13%	Piutang usaha
2018 - 2020	Perusahaan, Sigma, Melon, Metra, PINS, Metranet	Rp	2.650	7 April 2021 - 31 Desember 2021	Bulanan, Kuartalan	1 bulan JIBOR + 0,80% - 0,90% 3 bulan JIBOR + 1,00%	Tidak ada
MUFG Bank 2018 - 2020	Perusahaan, Infomedia, Metra, GSD, Telkom Infratel	Rp	1.960	15 Juni 2021 - 27 September 2021	Bulanan	1 bulan JIBOR + 0,70%	Tidak ada
Bank of China 2020	Telkom	Rp	1.000	8 April 2021	Bulanan	1 bulan JIBOR + 0,70%	Tidak ada
DBS 2016	Nutech	Rp	4	13 Oktober 2021	Bulanan	9,00%	Tidak ada
2016	Sigma ^{d,e}	US\$	0,02	31 Juli 2021	Semesteran	3,25% (US\$), 10,75% (Rp)	Piutang usaha
2018	Telkom Infratel, Infomedia	Rp	600	31 Juli 2021	Bulanan	1 bulan JIBOR + 0,70% - 1,45%	Tidak ada
UOB Indonesia 2016	Finnet ^f	Rp	500	9 April 2021	Bulanan	1 bulan JIBOR + 1,75%	Tidak ada
SCB 2019	GSD ^g	Rp	150	17 Januari 2022	Bulanan	Cost of fund + 2,00%	Tidak ada
Bank CIMB Niaga 2013	GSD ^h	Rp	85	18 Oktober 2021	Bulanan	10,90% - 11,50%	Piutang usaha dan aset tetap

* Disajikan dalam mata uang asal.

** Lihat Catatan 5 dan Catatan 12 untuk piutang usaha dan aset tetap yang dijamin.

^a Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 23 April 2019.

^b Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 28 Maret 2018 dan 6 Juli 2018.

^c Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 16 Juli 2018.

^d Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 5 Desember 2018.

^e Fasilitas dalam mata uang Dolar A.S. Penarikan dapat dilakukan dalam mata uang Dolar A.S. dan Rupiah.

^f Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 11 Desember 2020.

^g Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 18 Januari 2019.

^h Perpanjangan otomatis jika belum dilunasi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO
DALAM SATU TAHUN (lanjutan)**

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

Pada tanggal 19 Agustus 2020, Perusahaan dan GSD menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan MUFG Bank sebesar Rp900 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2021, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp19,1 miliar.

Pada tanggal 24 Agustus 2020, Perusahaan, Sigma, dan Melon menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan HSBC sebesar Rp700 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2021, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp19,5 miliar.

Pada tanggal 27 Agustus 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Permata dengan jumlah fasilitas sebesar Rp400 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2021, semua fasilitas belum digunakan.

Pada tanggal 1 Oktober 2020, Perusahaan, Infomedia, MD Media, dan Telkom Infratel menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan MUFG Bank sebesar Rp1.560 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2021, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp900 miliar.

Pada tanggal 7 Oktober 2020, Perusahaan, Infomedia, dan Telkom Infratel menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan Bank DBS sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2021, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp525 miliar.

Pada tanggal 23 Oktober 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan Bank of China dengan jumlah fasilitas sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2021, semua fasilitas sudah digunakan.

Pada tanggal 9 November 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan Citibank dengan jumlah fasilitas sebesar Rp500 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2021, semua fasilitas belum digunakan.

Pada tanggal 16 November 2020, Perusahaan menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan Bank Mandiri sebesar Rp4.400 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2021, semua fasilitas sudah digunakan.

Pada tanggal 27 November 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan HSBC dengan jumlah fasilitas sebesar Rp500 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2021, semua fasilitas sudah digunakan.

Pada tanggal 28 Desember 2020, Perusahaan, Metra, MD Media, Metranet dan Telkomsat menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan HSBC sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2021, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp216 miliar.

Pada tanggal 27 Maret 2021, Perusahaan, Metra, Infomedia, dan TII menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan MUFG Bank sebesar Rp400 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2021, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp30 miliar.

Pada tanggal 29 Maret 2021, Perusahaan dan Telkom Infratel menandatangani perjanjian kredit dengan BNI sebesar Rp735 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2021, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp175 miliar.

Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Grup diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan seperti adanya batasan bahwa Perusahaan harus memiliki kepemilikan saham mayoritas paling sedikit 51% terhadap anak perusahaan dan mempertahankan rasio-rasio keuangan. Pada tanggal 31 Maret 2021, Grup telah memenuhi ketentuan mengenai rasio keuangan tersebut, kecuali untuk pinjaman tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup telah memperoleh persetujuan (*waiver*) dari pemberi pinjaman untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut untuk Sigma, Telkom Infratel, dan PINS. *Waiver* dari BNI, BCA, dan BTPN diterima masing-masing pada tanggal 28 Desember 2020, 29 Desember 2020, dan 7 Januari 2021.

Fasilitas utang bank yang diperoleh Grup digunakan untuk keperluan modal kerja.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN (lanjutan)

b. Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

	Catatan	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	20a	162	184
Obligasi dan wesel bayar	20b	478	478
Utang bank	20c	6.713	7.648
Pinjaman lainnya	20d	1.028	1.040
Jumlah		8.381	9.350

20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA

	Catatan	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	20a	359	384
Obligasi dan wesel bayar	20b	6.991	6.991
Utang bank	20c	23.862	20.581
Pinjaman lainnya	20d	2.206	2.605
Jumlah		33.418	30.561

Jadwal pembayaran pokok utang pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

	Catatan	Jumlah	Tahun				Selanjutnya
			2022	2023	2024	2025	
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	20a	359	130	128	101	-	-
Obligasi dan wesel bayar	20b	6.991	2.200	-	-	2.097	2.694
Utang bank	20c	23.862	4.309	5.656	5.038	3.798	5.061
Pinjaman lainnya	20d	2.206	642	1.052	512	-	-
Jumlah		33.418	7.281	6.836	5.651	5.895	7.755

a. Pinjaman penerusan (*two-step loans*)

Pinjaman penerusan (*two-step loans*) adalah pinjaman tanpa jaminan yang diperoleh Pemerintah yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh hingga bulan Juli 1994 dicatat dan terutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman. Pinjaman yang diperoleh setelah bulan Juli 1994 terutang dalam mata uang asalnya dan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi ditanggung oleh Perusahaan.

Kreditur	Mata uang	31 Maret 2021		31 Desember 2020	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Bank luar negeri	Yen	3.072	404	3.072	418
	US\$	2	29	4	59
	Rp	-	88	-	91
Jumlah			521		568
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 19b)			(162)		(184)
Bagian jangka panjang			359		384

Kreditur	Mata uang	Periode jadwal pembayaran	Pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Bank luar negeri	Yen	Semesteran	Semesteran	2,95%
	US\$	Semesteran	Semesteran	3,85%
	Rp	Semesteran	Semesteran	7,50%

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

a. Pinjaman penerusan (*two-step loans*) (lanjutan)

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai pengembangan infrastruktur dan sarana penunjang telekomunikasi. Pinjaman ini akan dilunasi dalam angsuran semesteran dan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2024.

Sejak 2008, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman penerusan dan periode penarikan pinjaman penerusan tersebut telah berakhir.

Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- a. Rasio *projected net revenue to projected debt service* harus melebihi 1,2:1 untuk pinjaman penerusan yang berasal dari Bank Pembangunan Asia ("ADB").
- b. Pendanaan dari sumber internal (laba sebelum penyusutan dan biaya pendanaan) harus melebihi 20% dari rata-rata jumlah pengeluaran barang modal tahunan untuk pinjaman penerusan yang berasal dari ADB.

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perusahaan telah memenuhi ketentuan rasio-rasio tersebut di atas.

b. Obligasi dan wesel bayar

Obligasi dan wesel bayar	Mata uang	31 Maret 2021	31 Desember 2020
		Saldo terutang	Saldo terutang
Obligasi			
2015			
Seri A	Rp	2.200	2.200
Seri B	Rp	2.100	2.100
Seri C	Rp	1.200	1.200
Seri D	Rp	1.500	1.500
Wesel bayar jangka menengah			
(Medium term notes atau "MTN")			
MTN I Telkom Tahun 2018			
Seri C	Rp	296	296
MTN Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018			
Seri C	Rp	182	182
Jumlah		<u>7.478</u>	<u>7.478</u>
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		(9)	(9)
Jumlah		<u>7.469</u>	<u>7.469</u>
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (catatan 19b)		<u>(478)</u>	<u>(478)</u>
Bagian jangka Panjang		<u>6.991</u>	<u>6.991</u>

i. Obligasi

Tahun 2015

Obligasi	Pokok utang	Penerbit	Tempat pencatatan	Tanggal terbit	Jatuh tempo	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Seri A	2.200	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2022	Kuartalan	9,93%
Seri B	2.100	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2025	Kuartalan	10,25%
Seri C	1.200	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2030	Kuartalan	10,60%
Seri D	1.500	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2045	Kuartalan	11,00%
Total	<u>7.000</u>						

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (Catatan 12b.ix). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah Bahana, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah Bank Permata.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 23 Juni 2015.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan)

i. Obligasi (lanjutan)

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk pengembangan usaha: *broadband, backbone, metro network, regional metro junction, information technology application and support*, dan akuisisi beberapa perusahaan baik dalam lingkup domestik maupun internasional.

Pada tanggal 31 Maret 2021, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh Pefindo adalah idAAA (*Triple A*).

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Perusahaan dipersyaratkan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

(a) *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.

(b) *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1.

(c) *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

ii. Wesel bayar

MTN I Telkom Tahun 2018

Wesel bayar	Mata uang	Pokok utang	Tanggal terbit	Jatuh tempo	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun	Jaminan
Seri A	Rp	262	4 September 2018	14 September 2019	Kuartalan	7,25%	Seluruh aset
Seri B	Rp	200	4 September 2018	4 September 2020	Kuartalan	8,00%	Seluruh aset
Seri C	Rp	296	4 September 2018	4 September 2021	Kuartalan	8,35%	Seluruh aset
		<u>758</u>					

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantauan *Medium Term Notes* ("MTN") I Telkom Tahun 2018 yang dinyatakan dalam akta Notaris No. 24 tanggal 31 Agustus 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan menerbitkan MTN dengan keseluruhan nilai pokok MTN yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp758 miliar yang diterbitkan secara berseri.

Bertindak sebagai *Arranger* atas MTN adalah Bahana, PT BNI Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. BTN sebagai Agen Pemantau, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") bertindak sebagai Agen Pembayaran dan Kustodian. MTN tersebut diterbitkan tanpa melalui transaksi regular di bursa (*private placement*). Dana yang diperoleh dari MTN tersebut digunakan untuk pengembangan jaringan akses dan *backbone*.

Pada tanggal 31 Maret 2021, peringkat MTN yang diberikan oleh Pefindo adalah idAAA (*Triple A*).

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan dipersyaratkan menaati seluruh perjanjian dan pembatasan termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

(a) *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.

(b) *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1.

(c) *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan)

ii. Wesel bayar (lanjutan)

MTN Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018

<u>Wesel bayar</u>	<u>Mata uang</u>	<u>Pokok utang</u>	<u>Tanggal terbit</u>	<u>Jatuh tempo</u>	<u>Periode imbalan</u>	<u>Cicilan imbalan per tahun</u>	<u>Jaminan</u>
Seri A	Rp	264	4 September 2018	14 September 2019	Kuartalan	19	Hak manfaat obyek Ijarah
Seri B	Rp	296	4 September 2018	4 September 2020	Kuartalan	24	Hak manfaat obyek Ijarah
Seri C	Rp	182	4 September 2018	4 September 2021	Kuartalan	15	Hak manfaat obyek Ijarah
		742				58	

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantauan MTN Syariah Ijarah Telkom Tahun 2018 yang dinyatakan dalam akta Notaris No. 26 tanggal 31 Agustus 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan menerbitkan MTN Syariah Ijarah dengan keseluruhan nilai pokok MTN Syariah Ijarah yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp742 miliar yang diterbitkan secara berseri.

Bertindak sebagai *Arranger* atas MTN adalah Bahana, PT BNI Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. BTN sebagai Agen Pemantau, dan KSEI bertindak sebagai Agen Pembayaran dan Kustodian. MTN Syariah Ijarah tersebut diterbitkan tanpa melalui transaksi regular di bursa (*private placement*). Dana yang diperoleh dari MTN Syariah Ijarah tersebut digunakan untuk pengembangan jaringan akses dan *backbone*. Objek Ijarah dari MTN Syariah Ijarah tersebut berupa jaringan telekomunikasi di wilayah D.I. Yogyakarta yaitu jaringan kabel, peralatan teknologi informasi, dan alat-alat produksi layanan telekomunikasi lainnya.

Pada tanggal 31 Maret 2021, peringkat MTN Syariah Ijarah yang diberikan oleh Pefindo adalah idAAA Sy (Triple A Syariah).

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan dipersyaratkan menaati seluruh perjanjian dan pembatasan termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- (a) *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
- (b) *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1.
- (c) *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank

Kreditur	Mata uang	31 Maret 2021		31 Desember 2020	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	7.429	-	7.958
Bank Mandiri	Rp	-	6.595	-	6.203
BRI	Rp	-	2.709	-	2.822
BNI Syariah	Rp	-	41	-	43
Sub-jumlah			16.774		17.026
Pihak ketiga					
BCA	Rp	-	5.337	-	3.145
MUFG Bank	Rp	-	2.554	-	2.596
Bank Sindikasi	Rp	-	1.500	-	1.326
	US\$	27	392	30	427
Bank DBS	Rp	-	1.324	-	1.378
Bank Permata	Rp	-	1.256	-	757
UOB Singapore	US\$	27	386	31	437
ANZ	Rp	-	352	-	374
Bank CIMB Niaga	Rp	-	272	-	307
HSBC	Rp	-	214	-	214
BTPN	Rp	-	158	-	173
PT Bank ICBC Indonesia ("ICBC")	Rp	-	102	-	113
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp75 miliar)	MYR	11	40	12	41
Sub-jumlah			13.887		11.288
Jumlah			30.661		28.314
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi			(86)		(85)
			30.575		28.229
Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun (catatan 19b)			(6.713)		(7.648)
Bagian jangka Panjang			23.862		20.581

Informasi lain yang signifikan terkait utang bank pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)*	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)*	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan**
BNI								
2018	GSD	Rp	182	15	2018 - 2021	Bulanan	8.75%	Piutang usaha
2013 - 2019	Perusahaan, GSD, TLT, Sigma, Dayamitra	Rp	9.752	433	2016 - 2033	Bulanan, Kuartalan	1 bulan JIBOR + 2,25% - 2,50%; 3 bulan JIBOR + 1,70% - 2,25%	Piutang usaha, persediaan, aset tetap, dan seluruh aset
Bank Mandiri								
2017 - 2018	Perusahaan, Balebat	Rp	680	66	2018 - 2024	Bulanan, Kuartalan	8,50% - 9,00%	Piutang usaha, persediaan, dan aset tetap
2017 - 2021	Perusahaan, GSD, Dayamitra, Telkomsel ^a	Rp	7.738	1.143	2019 - 2028	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 0,60% - 2,25%	Aset tetap
BRI								
2017 - 2019	Perusahaan, Dayamitra, GSD	Rp	3.253	114	2019 - 2026	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,7% - 2,00%	Aset tetap, dan seluruh aset

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

Informasi lain yang signifikan terkait utang bank pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)*	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)*	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan**
BCA								
2017 - 2020	Perusahaan, Metra, Dayamitra, Telkom Infratel, PST	Rp	7.981	88	2017 - 2027	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,50% - 2,25%	Aset tetap
MUFG Bank								
2016 - 2021	GSD, Metra, Dayamitra	Rp	3.700	42	2016 - 2028	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,43% - 2,35%	Aset tetap
Bank Sindikasi								
2015 - 2020	Perusahaan, GSD, Dayamitra	Rp	4.000	250	2016 - 2027	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,00% - 2,75%	Aset tetap dan Seluruh aset
2018	TII	US\$	0.09	0,01	2019 - 2025	Semesteran	6 bulan LIBOR + 1,25%	Tidak ada
DBS								
2017 - 2020	PINS, Dayamitra, Telkomsat	Rp	1.830	54	2018 - 2027	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,50% - 2,45%	Aset tetap
Bank Permata								
2020	Nutech	Rp	7	0,1	2020 - 2027	Bulanan	9,25%	Aset tetap
2020 - 2021	Dayamitra	Rp	1.250	-	2021 - 2028	Kuartalan	3 Bulan JIBOR + 1,50% - 2,40%	Aset tetap
UOB Singapore								
2016	TII	US\$	0,049	0,005	2019 - 2024	Semesteran	6 bulan LIBOR + 1,25%	Tidak ada
ANZ								
2015 - 2020	GSD, PINS	Rp	500	22	2020 - 2025	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,40% - 2,00%	Aset tetap
Bank CIMB Niaga								
2017 - 2019	GSD, Metra	Rp	695	35	2018 - 2024	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,425 - 1,50%	Tidak ada
HSBC								
2020	Telkomsat	Rp	214	-	31 Desember 2021	Tahunan	12 bulan JIBOR + 0,8%	Tidak ada
BTPN								
2017 - 2020	GSD, Metra, Dayamitra, TII, Admedika	Rp	589	26	2018 - 2025	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,435% - 2,00%	Tidak ada
ICBC								
2017	GSD	Rp	272	11	2017 - 2024	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,36%	Piutang usaha dan aset tetap

* Disajikan dalam mata uang asal

** Lihat Catatan 5, Catatan 7, dan Catatan 12 untuk piutang usaha, persediaan, dan aset tetap yang dijamin.

^a Telkomsel tidak memberikan jaminan apa pun atas setiap pinjaman atau fasilitas kredit lainnya. Persyaratan dari berbagai pinjaman antara Telkomsel dengan krediturnya dan penyedia dana, mengharuskan ketaatan terhadap sejumlah jaminan dan larangan termasuk persyaratan keuangan dan lainnya, diantaranya pembatasan atas jumlah dividen dan bentuk distribusi laba lainnya yang dapat berdampak buruk pada kemampuan Telkomsel untuk memenuhi persyaratan dari fasilitas-fasilitas tersebut. Persyaratan dari perjanjian yang relevan juga meliputi klausul gagal bayar dan gagal bayar silang. Pada tanggal 31 Maret 2021, Telkomsel memenuhi persyaratan tersebut di atas.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

Pada tanggal 13 Maret 2015, Perusahaan, GSD, Metra, dan Infomedia menandatangani perjanjian kredit dengan BTPN, MUFG Bank, ANZ, dan bank sindikasi (BCA dan BNI) dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp750 miliar, Rp750 miliar, Rp500 miliar, dan Rp3.000 miliar. Berdasarkan amandemen pada tanggal 2 Agustus 2016, Dayamitra dan Telkom Akses dimasukkan sebagai pemegang ke perjanjian fasilitas kredit BTPN dan MUFG Bank, serta mengecualikan GSD dari perjanjian tersebut. Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 13 Maret 2017, PINS dimasukkan sebagai salah satu pemegang dalam perjanjian fasilitas kredit ANZ. Pada tahun 2017, PINS melakukan penarikan fasilitas kredit sebesar Rp200 miliar.

Pada tanggal 24 Maret 2017, Perusahaan, Dayamitra, Sigma, GSD, dan TII menandatangani perjanjian kredit dengan BRI, BNI, dan Bank Mandiri dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp1.000 miliar, Rp2.005 miliar, dan Rp1.500 miliar.

Pada tanggal 30 Maret 2017, Perusahaan, GSD, Metra, Dayamitra, PINS, dan Telkom sat menandatangani perjanjian kredit dengan MUFG Bank, BTPN, Bank DBS, Bank CIMB Niaga, dan BCA, dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp400 miliar, Rp400 miliar, Rp850 miliar, Rp495 miliar, dan Rp850 miliar. Berdasarkan amandemen pada tanggal 29 Juni 2017, BCA setuju Telkom Infratel menggantikan PINS selaku debitur yang dapat melakukan penarikan kredit.

Pada tanggal 26 Februari 2018, Perusahaan dan TII menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Mandiri dengan jumlah fasilitas Perusahaan sebesar Rp775 miliar.

Pada tanggal 27 Maret 2018 dan 23 Mei 2019, Perusahaan dan Dayamitra menandatangani perjanjian kredit dengan MUFG Bank dan BRI, dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp800 miliar, dan Rp200 miliar.

Pada tanggal 15 Januari 2019, Perusahaan, Infomedia, TII, Telkom Infratel, Telkom sat, dan Sigma menandatangani perjanjian kredit dengan BTPN dengan jumlah fasilitas sebesar Rp628 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2021, fasilitas yang tidak digunakan dari BTPN sebesar Rp538 miliar.

Pada tanggal 19 Juni 2019, Perusahaan dan Dayamitra menandatangani perjanjian dengan BNI dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp2.160 miliar dan Rp840 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2021, semua fasilitas sudah digunakan.

Pada tanggal 18 Agustus 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan BCA dengan jumlah fasilitas sebesar Rp4.000 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2021, fasilitas yang belum digunakan dari BCA sebesar Rp2.000 miliar.

Pada tanggal 16 November 2020, Perusahaan, Dayamitra, dan GSD menandatangani perubahan perjanjian dengan Bank Mandiri dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp1.400 miliar, Rp1.113 miliar, dan Rp200 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2021, semua fasilitas sudah digunakan.

Pada tanggal 4 Desember 2020, Perusahaan dan Admedika menandatangani perjanjian kredit dengan BTPN dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp1.500. Pada tanggal 31 Maret 2021, fasilitas yang belum digunakan dari BTPN sebesar Rp1.490 miliar.

Pada tanggal 11 Desember 2020, Perusahaan, PINS, dan GSD menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan Bank CIMB Niaga dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp500 miliar, Rp300 miliar, dan Rp200 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2021, fasilitas yang belum digunakan dari Bank CIMB Niaga sebesar Rp908 miliar.

Pada tanggal 18 Januari 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan BRI dengan jumlah fasilitas sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2021, semua fasilitas belum digunakan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

Pada tanggal 28 Januari 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit sindikasi dengan Bank Mandiri dan BNI dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp2.500 miliar. Pada tanggal 31 Maret 2021, semua fasilitas belum digunakan.

Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Grup diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan perolehan utang baru, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan. Pada tanggal 31 Maret 2021, Grup telah memenuhi ketentuan mengenai rasio keuangan tersebut, kecuali untuk pinjaman tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup telah memperoleh persetujuan (*waiver*) dari pemberi pinjaman atas tidak terpenuhinya rasio-rasio keuangan untuk posisi keuangan, Sigma, Telkom Infratel, dan GSD. *Waiver* dari BNI, HSBC, BCA, Bank Mandiri, dan ICBC masing-masing diterima pada tanggal 28 Desember 2020, 29 Desember 2020, dan 31 Desember 2020.

Fasilitas utang bank yang diperoleh Grup tersebut digunakan untuk keperluan pengembangan bisnis usaha.

d. Pinjaman lainnya

Kreditur	Mata uang	Saldo terutang	
		31 Maret 2021	31 Desember 2020
PT Sarana Multi Infrastruktur	Rp	3.241	3.652
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		(7)	(7)
Jumlah		3.234	3.645
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (catatan 19b)		(1.028)	(1.040)
Bagian jangka Panjang		2.206	2.605

Informasi lain yang signifikan terkait pinjaman lainnya pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)	Jadwal pembayaran	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
PT Sarana Multi Infrastruktur							
14 November 2018	Perusahaan	Rp	1.000	-	Semesteran (2019 - 2023)	3 bulan JIBOR + 1,75%	Tidak ada
29 Maret 2019	Perusahaan	Rp	2.836	350	Kuartalan (2020 - 2024)	8,49%	Tidak ada
12 Oktober 2016	Dayamitra	Rp	700	50	Semesteran (2018-2024)	3 bulan JIBOR + 1,85%	Aset tetap
29 Maret 2017	Dayamitra	Rp	600	-	Semesteran (2018-2024)	3 bulan JIBOR + 1,85%	Aset tetap
29 Maret 2019	Telkomsat	Rp	164	12	Semesteran (2020-2024)	8,49%	Tidak ada

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan, Dayamitra, dan Telkomsat diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- (a) *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1, kecuali Dayamitra tidak lebih dari 5:1
- (b) *Net Debt to EBITDA* tidak lebih dari 4:1.
- (c) *Debt service coverage* minimal 125%, kecuali Dayamitra minimal 100%

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perusahaan, Dayamitra, dan Telkomsat telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

Pada tanggal 15 Juni 2020, Perusahaan, Telkomsat, dan Telkom Infratel menandatangani amandemen perjanjian kredit dengan PT Sarana Multi Infrastruktur dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp2.836 miliar, Rp164 miliar, dan RpNihil. Pada tanggal 31 Maret 2021, fasilitas yang tidak digunakan dari PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp36 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Rincian kepentingan nonpengendali adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak:		
Telkomsel	18.861	17.879
GSD	231	232
Metra	139	135
Lainnya	34	116
Jumlah	19.265	18.362
	2021	2020
Kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) tahun berjalan entitas anak:		
Telkomsel	2.382	2.452
GSD	(2)	(4)
Metra	(2)	(4)
Lainnya	(5)	(5)
Jumlah	2.373	2.439

Entitas anak dengan kepemilikan nonpengendali yang material

Pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, kepemilikan kepentingan nonpengendali yang dianggap material oleh Perusahaan adalah kepemilikan kepentingan nonpengendali atas Telkomsel sebesar 35% (Catatan 1d).

Ringkasan informasi keuangan Telkomsel dibawah ini disajikan berdasarkan nilai sebelum eliminasi saldo dan transaksi antar perusahaan.

Ringkasan laporan posisi keuangan

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Aset lancar	25.507	19.488
Aset tidak lancar	82.089	84.164
Liabilitas jangka pendek	(31.339)	(28.997)
Liabilitas jangka panjang	(22.446)	(23.568)
Jumlah ekuitas	53.811	51.087
Yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	34.950	33.208
Kepentingan nonpengendali	18.861	17.879

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	2021	2020
Pendapatan	21.215	22.424
Beban operasi	(13.744)	(13.276)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	889	(269)
Laba sebelum pajak penghasilan	8.360	8.879
Beban pajak penghasilan - bersih	(1.636)	(1.823)
Laba tahun berjalan dari operasi yang masih berlanjut	6.724	7.056
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - bersih	-	-
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	6.724	7.056
Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	2.382	2.469
Dividen yang dibayar kepada kepentingan nonpengendali	1.400	-

Ringkasan laporan arus kas

	2021	2020
Kegiatan operasi	12.911	12.451
Kegiatan investasi	(871)	(1.719)
Kegiatan pendanaan	(4.958)	(5.804)
Kenaikan bersih kas dan setara kas	7.082	4.928

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. MODAL SAHAM

Keterangan	31 Maret 2021		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham seri B			
Pemerintah	51.602.353.559	52,09	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	3.816.112.680	3,85	191
Direksi (Catatan 1b):			
Ririek Adriansyah	1.156.955	0	0
Budi Setyawan Wijaya	275.000	0	0
Dian Rachmawan	120.222	0	0
Afriwandi	42.500	0	0
Herlan Wijanarko	42.500	0	0
Edi Witjara	32.500	0	0
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	43.642.080.683	44,06	2.182
Jumlah	99.062.216.600	100,00	4.953

Keterangan	31 Desember 2020		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham Seri B			
Pemerintah	51.602.353.559	52,09	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	3.839.380.280	3,88	192
Direksi (Catatan 1b):			
Ririek Adriansyah	1.156.955	0	0
Harry Mozarta Zen	275.000	0	0
Faizal Rochmad Djoemadi	120.222	0	0
Bogi Witjaksono	42.500	0	0
Edi Witjara	42.500	0	0
Siti Choiriana	32.500	0	0
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	43.618.813.083	44,03	2.181
Jumlah	99.062.216.600	100,00	4.953

* The Bank of New York Mellon Corporation bertindak sebagai lembaga penyimpanan untuk saham ADS Perusahaan.

Perusahaan hanya menerbitkan 1 saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Pemerintah dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun, dan mempunyai hak veto dalam RUPS Perusahaan berkaitan dengan pengangkatan dan penggantian Dewan Komisaris dan Direksi, penerbitan saham baru, serta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

23. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	676	583
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	386	386
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	5	5
Selisih transaksi akuisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	(637)	(637)
Komponen ekuitas lainnya	37	37
Jumlah	467	374

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. PENDAPATAN

2021	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain	Pendapatan konsolidasian
Pendapatan telepon	3.854	238	187	72	-	4.351
Pendapatan Interkoneksi	103	-	-	1.723	-	1.826
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika						
Internet dan data seluler	15.530	-	-	-	-	15.530
Internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika	-	-	1.593	493	-	2.086
SMS	894	-	8	-	-	902
Lain-lain	-	-	396	192	41	629
Jumlah pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika	16.424	-	1.997	685	41	19.147
Pendapatan jaringan	1	-	187	168	-	356
Pendapatan Indihome	-	5.721	626	-	-	6.347
Layanan lainnya						
Manage service dan terminal	-	-	445	-	-	445
Call center service	-	-	184	19	-	203
E-health	-	-	146	-	-	146
E-payment	-	-	109	-	5	114
Lain-lain	-	20	216	81	93	410
Jumlah layanan lainnya	-	20	1.100	100	98	1.318
Jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	20.382	5.979	4.097	2.748	139	33.345
Pendapatan dari transaksi lessor	-	-	-	600	-	600
Jumlah pendapatan	20.382	5.979	4.097	3.348	139	33.945
Penyesuaian dan eliminasi	-	(6)	5	(1)	(92)	-
Pendapatan eksternal sesuai yang disajikan di segmen operasi	20.382	5.973	4.102	3.347	47	-
2020	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain	Pendapatan konsolidasian
Pendapatan telepon	5.073	290	245	77	-	5.685
Pendapatan Interkoneksi	129	-	-	1.922	-	2.051
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika						
Internet dan data seluler	15.120	-	-	-	-	15.120
Internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika	-	4	1.941	380	-	2.325
SMS	1.250	-	110	-	-	1.360
Lain-lain	-	-	229	115	58	402
Jumlah pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika	16.370	4	2.280	495	58	19.207
Pendapatan jaringan	1	-	202	236	-	439
Pendapatan Indihome	-	4.473	604	-	-	5.077
Layanan lainnya						
Manage service dan terminal	-	-	279	-	-	279
Call center service	-	-	163	22	-	185
E-health	-	-	140	-	-	140
E-payment	-	-	100	-	3	103
Lain-lain	-	7	328	81	99	515
Jumlah layanan lainnya	-	7	1.010	103	102	1.222
Jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	21.573	4.774	4.341	2.833	160	33.681
Pendapatan dari transaksi lessor	-	-	-	513	-	513
Jumlah pendapatan	21.573	4.774	4.341	3.346	160	34.194
Penyesuaian dan eliminasi	-	(2)	(17)	13	(96)	-
Pendapatan eksternal sesuai yang disajikan di segmen operasi	21.573	4.772	4.324	3.359	64	-

Manajemen mengharapkan bahwa sebagian besar transaksi yang dialokasikan untuk kontrak yang belum diselesaikan pada tanggal 31 Maret 2021 akan diakui sebagai pendapatan selama periode-periode pelaporan berikutnya. Kewajiban pelaksanaan yang belum terpenuhi pada tanggal 31 Maret 2021, bagian yang diharapkan dapat direalisasi dalam satu tahun adalah sebesar Rp8.133 miliar dan bagian yang lebih dari satu tahun adalah sebesar Rp4.582 miliar.

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa menyewa yang tidak dapat dibatalkan sebagai lessor. Perjanjian tersebut meliputi sewa jaringan, peralatan telekomunikasi serta tanah dan bangunan. Sewa ini memiliki jangka waktu antara 1 hingga 10 tahun. Semua sewa termasuk klausul untuk memungkinkan revisi atas biaya sewa setiap tahun sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku. Penyewa juga diharuskan untuk memberikan jaminan nilai residu pada properti yang disewa.

Tidak ada pendapatan dari pelanggan utama yang melebihi 10% dari total pendapatan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021.

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. BEBAN KARYAWAN

Rincian dari beban karyawan adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Gaji dan tunjangan	2.015	1.992
Cuti, insentif, dan tunjangan lainnya	983	1.026
Beban pensiun berkala, bersih (Catatan 31)	331	262
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala, bersih (Catatan 31)	78	71
Beban penghargaan masa kerja (Catatan 32)	43	43
Beban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Catatan 31)	34	40
Beban imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 31)	6	6
Beban imbalan tunjangan masa kerja (Catatan 31)	1	-
Lain-lain	9	11
Jumlah	<u>3.500</u>	<u>3.451</u>

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

26. BEBAN OPERASI, PEMELIHARAAN, DAN JASA TELEKOMUNIKASI

Rincian dari beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Operasi dan pemeliharaan	4.746	4.583
Beban pemakaian frekuensi radio (Catatan 36c.i)	1.454	1.450
Sewa sirkit dan CPE	935	810
Beban hak penyelenggaraan dan KPU	601	603
Listrik, gas, dan air	257	270
Beban pokok penjualan kartu SIM dan voucher (Catatan 7)	120	121
Asuransi	113	98
Manajemen proyek	111	133
Sewa kendaraan dan fasilitas pendukung	72	96
Beban pokok penjualan periferal (Catatan 7)	14	2
Sewa menara	-	3
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	29	83
Jumlah	<u>8.452</u>	<u>8.252</u>

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian dari beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	516	697
Beban umum	349	332
Jasa profesional	102	190
Perjalanan	63	91
Pelatihan, pendidikan, dan rekrutmen	45	126
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	218	136
Jumlah	<u>1.293</u>	<u>1.572</u>

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

	<u>31 Maret 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Perusahaan:		
PPh		
PPh Badan	-	363
Pasal 22 - Pembelian barang	2	2
Pasal 23 - Penyerahan jasa	124	124
PPN	601	787
Entitas anak:		
PPh		
PPh Badan	21	420
Pasal 4 (2) - Pajak final	93	6
Pasal 22 - Pembelian barang	4	-
Pasal 23 - Penyerahan jasa	119	-
PPN	2.500	2.255
Jumlah pajak dibayar di muka	3.464	3.957
Bagian jangka pendek	(2.863)	(3.170)
Bagian jangka panjang (Catatan 14)	601	787

b. Tagihan restitusi pajak

	<u>31 Maret 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Perusahaan:		
PPh Badan	-	102
PPN	1.450	428
Entitas anak:		
PPh		
PPh Badan	933	933
Pasal 23 - Penyerahan jasa	17	17
PPN	601	756
Jumlah tagihan restitusi pajak	3.001	2.236
Bagian jangka pendek	(745)	(854)
Bagian jangka panjang (Catatan 14)	2.256	1.382

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Utang pajak

	<u>31 Maret 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Perusahaan:		
PPh		
Pasal 4 (2) - Pajak final	26	53
Pasal 21 - PPh pribadi	94	119
Pasal 22 - Pembelian barang	7	5
Pasal 23 - Penyerahan jasa	27	21
Pasal 25 - Angsuran PPh Badan	22	-
Pasal 26 - PPh Wajib Pajak Luar Negeri	2	7
Pasal 29 - PPh Badan	929	814
PPN	705	-
PPN atas Pemungutan Pajak ("WAPU")	251	490
	<u>2.063</u>	<u>1.509</u>
Entitas anak:		
PPh		
Pasal 4 (2) - Pajak final	146	136
Pasal 21 - PPh pribadi	182	176
Pasal 22 - Pembelian barang	4	4
Pasal 23 - Penyerahan jasa	14	55
Pasal 25 - Angsuran PPh Badan	422	3
Pasal 26 - PPh Wajib Pajak Luar Negeri	65	7
Pasal 29 - PPh Badan	868	474
PPN	804	349
	<u>2.505</u>	<u>1.204</u>
Jumlah utang pajak	<u>4.568</u>	<u>2.713</u>

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kini		
Perusahaan	572	600
Entitas anak	1.671	2.231
	<u>2.243</u>	<u>2.831</u>
Tangguhan		
Perusahaan	27	38
Entitas anak	159	(246)
	<u>186</u>	<u>(208)</u>
Beban pajak penghasilan bersih	<u>2.429</u>	<u>2.623</u>

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan estimasi laba kena pajak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	10.816	10.924
Penambahan kembali eliminasi konsolidasian	8.224	5.372
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dan eliminasi	19.040	16.296
Dikurangi: laba entitas anak sebelum pajak penghasilan	(11.192)	(9.721)
Laba sebelum pajak penghasilan sebelum dikurangi pajak penghasilan atas pajak final - Perusahaan	7.848	6.575
Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(68)	(104)
Laba sebelum pajak penghasilan setelah dikurangi penghasilan atas pajak final - Perusahaan	7.780	6.471

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut (lanjutan):

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan estimasi laba kena pajak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Perbedaan temporer:		
Provisi penurunan nilai piutang	12	365
Provisi imbalan karyawan	132	248
Pendapatan instalasi tanggungan	52	41
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(208)	(70)
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	(10)	(58)
Sewa pembiayaan	(1)	(12)
Penyisihan lain-lain	92	242
Jumlah perbedaan temporer bersih	<u>69</u>	<u>756</u>
Perbedaan tetap:		
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala – bersih	78	71
Imbalan karyawan	45	44
Sumbangan	60	39
Keuntungan pengalihan bisnis ke entitas sepengendali	(5.088)	(4.322)
Lain-lain	33	33
Jumlah perbedaan tetap bersih	<u>(4.872)</u>	<u>(4.135)</u>
Penghasilan kena pajak - Perusahaan	<u>2.977</u>	<u>3.092</u>
Beban pajak penghasilan kini	566	587
Beban pajak penghasilan final	6	13
Jumlah beban pajak penghasilan kini - Perusahaan	<u>572</u>	<u>600</u>
Beban pajak penghasilan kini - entitas anak	1.671	2.231
Jumlah beban pajak penghasilan kini	<u>2.243</u>	<u>2.831</u>

Rekonsiliasi antara pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak perusahaan 19% terhadap laba sebelum pajak penghasilan setelah dikurang pendapatan yang dikenakan pajak final dan beban pajak bersih pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	10.816	10.924
Dikurangi: pendapatan yang dikenakan pajak final – bersih konsolidasian	<u>(2.194)</u>	<u>(513)</u>
	<u>8.622</u>	<u>10.411</u>
Beban pajak penghasilan dihitung pada tarif Perusahaan	1.638	1.979
Perbedaan pada tarif pajak entitas anak	215	250
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	155	196
Beban pajak penghasilan final	6	13
Pajak tanggungan yang tidak diakui	-	10
Lain-lain	415	175
Beban pajak penghasilan bersih	<u>2.429</u>	<u>2.623</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

- d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut (lanjutan):

Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 menerapkan peraturan di bawah Peraturan Pemerintah (“PP”) No. 56/2015 mengenai pemberian pengurangan tarif pajak sebesar 5% dari tarif pajak tertinggi kepada perusahaan yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di BEI dengan jumlah paling sedikit 40% dari jumlah seluruh saham yang disetor perusahaan dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham, dimana kepemilikan masing-masing tidak boleh melebihi 5%. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu tahun fiskal.

Pada bulan Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No.2/2020, yang antara lain mengatur penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan 20% untuk tahun pajak 2022. Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan PP No. 30/2020 tentang Penurunan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka, yang mengatur pemberian tarif pajak sebesar 3% lebih rendah untuk wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di BEI dengan jumlah paling sedikit 40% dari jumlah seluruh saham yang disetor perusahaan dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham, dimana kepemilikan masing-masing tidak boleh melebihi 5%. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu tahun fiskal, dan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Wajib Pajak Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Perusahaan telah memenuhi seluruh kriteria yang telah dipersyaratkan, sehingga untuk perhitungan beban pajak kini dan pajak tangguhan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan menurunkan tarif pajak sebesar 3%.

Perusahaan menerapkan tarif pajak sebesar 19% untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Entitas anak menerapkan tarif pajak sebesar 22% untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Perusahaan akan menyampaikan perhitungan penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan kini di atas dalam SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun fiskal 2021 kepada Otoritas Pajak dan dilaporkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

- e. Pemeriksaan pajak

- (i) Perusahaan

PPh dan PPN Tahun 2012

Pada tanggal 3 Mei 2016, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2012. Pada tanggal 3 November 2016, Otoritas Pajak menerbitkan SKPKB PPh Badan senilai Rp991,6 miliar (termasuk denda Rp321,6 miliar), SKPKB PPN senilai Rp467 miliar (termasuk denda Rp153,5 miliar), SKPKB PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (“JKP”) dari Luar Daerah Pabean senilai Rp1,2 miliar (termasuk denda Rp392 juta), SKPKB PPN WAPU senilai Rp57 miliar (termasuk denda Rp18,5 miliar), tagihan pajak PPN senilai Rp37,5 miliar, SKPKB PPh Pasal 21 senilai Rp16,2 miliar (termasuk denda Rp5,3 miliar), SKPKB PPh Final Pasal 21 senilai Rp1,2 miliar (termasuk denda Rp407 juta), SKPKB PPh Pasal 23 senilai Rp63,5 miliar (termasuk denda Rp20,6 miliar), SKPKB PPh Pasal 4 (2) senilai Rp25 miliar (termasuk denda Rp8,1 miliar), dan SKPKB PPh Pasal 26 senilai Rp197,6 miliar (termasuk denda Rp64 miliar). Perusahaan telah menyetujui senilai Rp35,2 miliar terkait perhitungan kembali pengkreditan pajak masukan atas penyelenggaraan jasa interkoneksi *international incoming call*, Rp613,3 juta atas Pajak Penghasilan, dan Rp311,5 juta atas PPh Pasal 26 dan telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2016. Pada tanggal 16 November 2016, Perusahaan telah mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan lainnya.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

PPH dan PPN Tahun 2012 (lanjutan)

Pada tanggal 1 Maret 2017 dan 9 Mei 2017, Perusahaan menerima surat keputusan dari Otoritas Pajak atas kurang bayar PPN Jasa Luar Negeri senilai Rp1,8 juta (termasuk denda Rp0,6 juta) dan kurang bayar PPN WAPU senilai Rp4,4 miliar (termasuk denda Rp1,4 miliar). Atas keputusan keberatan tersebut, Perusahaan menerima keputusan tersebut. Pada tanggal 19 Oktober 2017, Otoritas Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Perusahaan dimana Otoritas Pajak telah mengurangi kurang bayar atas PPh Badan dan menambah kurang bayar atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 (2) dan PPh Pasal 26 dengan rincian kurang bayar Pajak Pasal 21 senilai Rp20,7 miliar (termasuk denda Rp6,7 miliar), kurang bayar PPh Pasal 21 Final senilai Rp23,8 miliar (termasuk denda Rp7,7 miliar), kurang bayar PPh Pasal 23 senilai Rp115,7 miliar (termasuk denda Rp37,5 miliar), kurang bayar PPh Pasal 4 (2) senilai Rp25 miliar (termasuk denda Rp8,1 miliar), kurang bayar PPh Pasal 26 senilai Rp197,6 miliar (termasuk denda Rp64,1 miliar), dan kurang bayar PPh Badan senilai Rp496,4 miliar (termasuk denda Rp161 miliar). Pada tanggal 30 dan 31 Oktober 2017, Otoritas pajak menerbitkan surat keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Perusahaan untuk PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2012 dimana Direktorat Jenderal Pajak telah menambahkan dan mengurangi jumlah kurang bayar yang masih harus dibayar oleh Perusahaan senilai Rp429,3 miliar (termasuk denda Rp141,2 miliar).

Atas keputusan keberatan tersebut, pada tanggal 17 dan 26 Januari 2018, Perusahaan mengajukan banding dan telah menempuh serangkaian sidang banding. Pada bulan September 2018, Otoritas Pajak menerbitkan surat keputusan (pembetulan) atas keberatan yang diajukan oleh Perusahaan, dimana Otoritas Pajak telah mengurangi jumlah kurang bayar atas PPN untuk masa pajak Maret, April, September, dan Desember 2012 senilai Rp9,9 miliar (termasuk denda Rp3,2 miliar). Sehingga, sampai dengan 31 Desember 2018, kurang bayar atas PPN untuk masa pajak Januari s.d. Desember 2012 senilai Rp419,4 miliar (termasuk denda Rp138 miliar).

Pada tanggal 16 Desember 2019, Perusahaan menerima putusan dari Pengadilan Pajak atas sengketa pajak atas semua jenis pajak tahun 2012. Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan Perusahaan terkait pajak penghasilan sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk PPh Pasal 21 senilai Rp52,4 juta (termasuk denda Rp17 juta),

PPh Pasal 23 senilai Rp1,4 miliar (termasuk denda Rp0,4 miliar), PPh Pasal 26 senilai Rp802,6 juta (termasuk denda Rp260,3 juta), dan PPh Pasal 4 (2) senilai Rp1,3 juta (termasuk denda Rp0,4 juta). Untuk permohonan banding atas PPh Pasal 21 Final, Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh permohonan Perusahaan. jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk PPh Badan senilai Rp29,6 miliar (termasuk denda Rp9,6 miliar) dan PPN senilai Rp51,1 miliar (termasuk denda Rp17,5 miliar).

Selanjutnya, Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding terkait PPh Badan dan PPN yang diajukan Perusahaan, sehingga Perusahaan telah menerima seluruh Salinan Putusan Banding tersebut di atas dan setuju untuk membayar kurang bayar atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Badan, dan PPN.

Pada bulan Februari 2020, Perusahaan menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas PPN Masa Desember 2012 senilai Rp115,7 miliar, dimana senilai Rp46,8 miliar dikompensasikan ke SKPKB PPN masa Januari s.d. November 2012.

Pada bulan April 2020, Perusahaan mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak ("STP") atas PPN Masa Januari s.d. Desember 2012. Perusahaan mengajukan permohonan pengurangan STP dengan melakukan perhitungan ulang berdasarkan hasil Putusan Banding, sehingga nilai STP yang semula Rp37,5 miliar menjadi Rp5,8 miliar. Pada bulan Juni 2020, Perusahaan menerima keputusan atas permohonan tersebut. Pada bulan Juli 2020, Perusahaan menerima realisasi pengembalian tersebut senilai Rp31,7 miliar, namun sejumlah Rp20,9 juta dikompensasikan ke utang pajak STP PPh Pasal 21 yang diterbitkan oleh beberapa Kantor Pelayanan Pajak Cabang.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

PPH dan PPN Tahun 2012 (lanjutan)

Pada tanggal 6 Juli 2020, Perusahaan menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Direktorat Jenderal Pajak mengajukan Peninjauan Kembali untuk seluruh Putusan Banding atas seluruh sengketa pajak tahun 2012. Pada tanggal 30 Juli 2020, Perusahaan telah merespon dengan mengirimkan Kontra Memori Peninjauan Kembali untuk seluruh sengketa pajak tahun 2012.

Sampai dengan bulan Desember 2020, Mahkamah Agung telah mengumumkan hasil putusan atas proses peninjauan kembali terhadap seluruh sengketa PPh *Withholding Tax*, PPh Badan dan sebagian sengketa PPN atas masa pajak Januari s.d. Desember 2012 kecuali masa pajak Januari, Maret, Mei dan Oktober 2012. Dalam hasil putusan tersebut, Mahkamah Agung menolak seluruh peninjauan kembali yang diajukan oleh DJP kecuali atas sengketa PPh Pasal 21 diberikan putusan N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Pada bulan Februari dan Maret 2021, Perusahaan telah menerima hasil putusan atas proses peninjauan kembali terhadap sengketa PPN atas masa pajak Maret dan Oktober 2012.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, dari seluruh perkara Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung untuk seluruh jenis Pajak Tahun 2012, selain dua perkara berkenaan dengan jenis pajak PPN masa pajak Januari dan Mei 2012 yang telah diuraikan pada paragraf di atas yang belum diterima putusannya, Perusahaan telah menerima seluruh putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung.

Dalam periode penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan telah menerima dan melakukan pembayaran atas STP pelaksanaan hasil putusan banding dengan jumlah sanksi administrasi yang harus dibayar untuk PPh Pasal 21 senilai Rp52,4 juta, PPh Pasal 23 senilai Rp1,4 miliar, PPh Pasal 26 senilai Rp491,1 juta, PPh Final senilai Rp1,3 juta, PPh Badan senilai Rp29,0 miliar dan PPN masa pajak Januari s.d Desember 2012 senilai Rp46,8 miliar.

PPH dan PPN Tahun 2015

Pada tanggal 23 Agustus 2016, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2015.

Pada tanggal 25 April 2017, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") PPh Badan senilai Rp147 miliar, SKPKB PPN senilai Rp13 miliar (termasuk denda Rp4,1 miliar), SKPKB PPN WAPU senilai Rp6 miliar (termasuk denda Rp1,5 miliar), dan SKPKB PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp55,3 miliar (termasuk denda Rp16,8 miliar). Perusahaan juga menerima STP atas PPN senilai Rp34 miliar, PPN WAPU senilai Rp7 miliar, dan PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp8 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

PPH dan PPN Tahun 2015 (lanjutan)

Perusahaan setuju untuk menerima putusan pemeriksaan senilai Rp17 miliar atas PPh Badan, mengalihkan perhitungan pajak atas realisasi ganti rugi migrasi Flexi senilai Rp42 miliar yang sebelumnya dilaporkan pada SPT PPh Badan tahun 2015 ke SPT PPh Badan tahun 2016.

Perusahaan juga menerima ketetapan kurang bayar PPN, kurang bayar PPN WAPU, serta STP PPN WAPU senilai Rp26 miliar. Bagian yang telah diterima telah dibebankan pada laporan laba rugi dan komprehensif lain konsolidasian tahun 2017. Pada tanggal 24 Juli 2017, Perusahaan mengajukan Surat Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas SKPLB PPh Badan dengan keberatan senilai Rp210,5 miliar dan PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp55 miliar.

Pada tanggal 3 dan 22 Mei 2018, Otoritas Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan atas SKPLB PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar senilai Rp54,6 miliar dan mengabulkan seluruh keberatan yang diajukan Perusahaan. Perusahaan telah menyetujui hasil proses keberatan dari Otoritas Pajak atas SKPLB PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp793 juta dan telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2018. Pada tanggal 18 Juli 2018, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan atas SKPLB PPh Badan yang menambah jumlah pajak yang masih harus diterima senilai Rp76 miliar. Atas keputusan keberatan tersebut, pada tanggal 10 Oktober 2018, Perusahaan mengajukan banding.

Pada tanggal 8 Juli 2020, Perusahaan menerima putusan banding dari Pengadilan Pajak atas sengketa PPh Badan tahun 2015. Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan Perusahaan. Pada tanggal 9 September 2020, Perusahaan menerima pengembalian atas restitusi tambahan lebih bayar PPh Badan hasil putusan banding senilai Rp90,9 miliar.

Pada tanggal 26 Oktober 2020, Perusahaan menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Direktorat Jenderal Pajak mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Banding atas sengketa PPh Badan tahun 2015. Pada tanggal 2 Desember 2020, Perusahaan mengajukan kontra memori peninjauan kembali sebagai jawaban atas permohonan peninjauan kembali tersebut. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, Perusahaan masih belum menerima hasil Putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali DJP tersebut. Dengan demikian untuk seluruh kewajiban pajak tahun 2015 selain jenis pajak PPh Badan dapat dianggap final dan berkekuatan hukum tetap karena pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini kewajiban pajak tahun 2015 tersebut telah melewati masa daluwarsa penetapan pajak sebagaimana ketentuan perundangan-undangan perpajakan.

PPH dan PPN Tahun 2016

Pada tanggal 25 Agustus 2017, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2016.

Pada tanggal 7 Juni 2018, Otoritas Pajak menerbitkan SKPLB PPh Badan senilai Rp15,3 miliar, SKPKB PPh Pasal 26 senilai Rp556,7 juta (termasuk denda Rp180,5 juta) dan SKPLB PPN senilai Rp922,7 miliar. Perusahaan setuju untuk menerima putusan pemeriksaan atas PPh Badan senilai Rp15,3 miliar dan saldo tersisa senilai Rp99,1 miliar telah dibebankan sebagai pajak kini atas pemeriksaan pajak, kurang bayar PPh Pasal 26 senilai Rp557 juta, kredit pajak PPN senilai Rp10,5 miliar, STP PPN WAPU senilai Rp7,1 miliar, PPN atas pemberian cuma-cuma senilai Rp7,3 miliar, PPN atas pengalihan aset senilai Rp1,2 miliar, dan STP PPN senilai Rp1,7 miliar. Bagian yang telah diterima telah dibebankan pada laporan laba rugi dan komprehensif lain konsolidasian tahun 2018. Pada bulan Juli 2018, Perusahaan menerima restitusi pajak senilai Rp882,7 miliar dan untuk sisa saldo senilai Rp39,9 miliar telah dikompensasikan ke STP PPN senilai Rp31,9 miliar, PPN WAPU senilai Rp7,1 miliar, PPh Pasal 23 senilai Rp556 juta, dan PPh Pasal 21 senilai Rp300 juta. Atas surat ketetapan tersebut, pada tanggal 31 Agustus 2018, Perusahaan mengajukan keberatan atas pengenaan PPN terkait interkoneksi *international incoming call* senilai Rp151,7 miliar dan STP PPN senilai Rp30,3 miliar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

PPH dan PPN Tahun 2016 (lanjutan)

Pada tanggal 11 Maret dan 27 Mei 2019, Otoritas Pajak menerbitkan surat putusan atas keberatan Perusahaan, dimana Otoritas Pajak mengabulkan semua keberatan Perusahaan dan menambah jumlah kelebihan bayar untuk masa pajak Januari s.d. Desember 2016. Pada bulan April dan Juli 2019, Perusahaan menerima restitusi pajak senilai Rp151,7 miliar dan senilai Rp1,9 juta telah dikompensasikan ke PPh Pasal 21 untuk beberapa masa pajak. Dengan demikian untuk seluruh kewajiban pajak tahun 2016 telah dianggap final dan berkekuatan hukum tetap.

PPH tahun 2018

Pada tanggal 17 Februari 2020, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2018. Pada tanggal 25 Februari 2020, Perusahaan telah menerima pengembalian pendahuluan atas restitusi PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2018 senilai Rp979,1 miliar dan senilai Rp30,3 miliar dikompensasikan ke SKPKB PPh Badan dan pajak penghasilan tahun pajak 2012. Pada tanggal 16 Desember 2020, Perusahaan menerima SKP dan STP atas hasil pemeriksaan *all taxes* tahun 2018. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKPLB PPh Badan senilai Rp101,5 miliar, SKPKB PPh Pasal 21 senilai Rp1,9 miliar (termasuk denda Rp573,9 juta), SKPKB PPh Pasal 23 senilai Rp4 juta (termasuk denda Rp1,2 juta) dan SKPLB PPN Masa Januari s.d. Agustus dan Oktober s.d. Desember senilai Rp85,3 miliar. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga menerbitkan SKPKB PPN Masa September senilai Rp240,5 miliar (termasuk denda Rp59,5 miliar), SKPKB PPN WAPU senilai Rp15,17 miliar (termasuk denda Rp4,6 miliar) dan STP PPN WAPU senilai Rp1,2 miliar. Perusahaan setuju untuk menerima koreksi pajak pemeriksa atas PPh Badan senilai Rp1,1 miliar, kurang bayar PPh Pasal 21 senilai Rp1,9 miliar, kurang bayar PPh 23 senilai Rp4 juta, kredit pajak PPN senilai Rp4,8 miliar, STP PPN WAPU senilai Rp1,2 miliar, kurang bayar PPN WAPU senilai Rp15,17 miliar. Koreksi yang telah disetujui telah dibebankan pada laporan laba rugi tahun 2020.

Perusahaan tidak menyetujui koreksi pemeriksa pajak yang mengenakan PPN atas transaksi penyerahan komponen *space segment* aset dalam konstruktif (ADK) Satelit Merah Putih kepada TelkomSat. Pada bulan Maret 2021, Perusahaan telah mengajukan surat keberatan pajak ke Otoritas Pajak atas koreksi pemeriksa pajak tersebut. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, proses keberatan pajak masih berlangsung dan Perusahaan telah menerima seluruh pengembalian kelebihan pajak atas PPh Badan dan PPN.

(ii) Telkomsel

PPH dan PPN Tahun 2011

Pada tanggal 15 Februari 2016, Telkomsel mengajukan banding kepada Otoritas Pajak atas kurang bayar PPh Badan senilai Rp250 miliar (termasuk denda Rp81,1 miliar). Selanjutnya, pada tanggal 17 Maret 2016, Telkomsel juga mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak atas kurang bayar PPN senilai Rp1,2 miliar (termasuk denda Rp392 juta).

Pada tanggal 6 Februari 2017, Telkomsel menerima putusan dari Pengadilan Pajak atas PPN senilai Rp1,2 miliar yang mendukung Telkomsel. Selanjutnya, Telkomsel menerima restitusi pajak di bulan Maret dan Juni 2017. Pada tanggal 2 Maret 2017, Telkomsel menerima putusan dari Pengadilan Pajak atas kurang bayar PPh Badan yang menerima sebagian dari banding Telkomsel senilai Rp247,6 miliar dan mencatatnya sebagai tagihan restitusi pajak. Pada tanggal 31 Agustus 2017, Telkomsel menerima restitusi pajak. Di bulan Juli dan Oktober 2017, Telkomsel menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung bahwa Otoritas Pajak mengajukan memori peninjauan kembali atas kurang bayar PPh Badan dan PPN masing-masing senilai Rp62 miliar dan Rp1,2 miliar. Atas hal ini, Telkomsel mengajukan kontra memori peninjauan kembali di bulan Agustus dan November 2017.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Telkomsel telah menerima keputusan resmi dari Mahkamah Agung secara parsial, dimana Mahkamah Agung menolak permintaan Otoritas Pajak berkaitan dengan PPN senilai Rp1,1 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

PPH dan PPN Tahun 2011 (lanjutan)

Pada tanggal 17 Oktober 2019, Perusahaan telah mengajukan surat kepada Pengadilan Pajak untuk meminta sisa putusan resmi terkait PPN tahun 2011 yang telah diumumkan oleh SC dimenangkan oleh Telkomsel.

Pada bulan Oktober 2019, Telkomsel telah menerima keputusan resmi dari Mahkamah Agung yang menolak permintaan Otoritas Pajak atas PPh Badan senilai Rp62 miliar. Pada tanggal 24 Januari 2020, Telkomsel telah menerima sisa keputusan resmi dari MA yang menolak permintaan Otoritas Pajak terkait PPN tahun 2011 sebesar Rp0,1 miliar.

PPH dan PPN Tahun 2014

Pada tanggal 31 Mei 2019, Telkomsel menerima SKPKB dan STP untuk tahun fiskal 2014 senilai Rp150,6 miliar (termasuk denda Rp54,6 miliar). Telkomsel menerima atas bagian senilai Rp16,5 miliar dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 27 Juni 2019 dan dicatat sebagai beban lain-lain. Pada tanggal 20 Agustus 2019, Telkomsel telah membayar sebesar Rp99,1 miliar dan mencatat sebagai tagihan restitusi pajak. Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2019, Telkomsel mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak senilai Rp134,1 miliar.

Pada tanggal 15 Juli dan 22 Juli 2020, Telkomsel menerima surat keputusan keberatan dari Otoritas Pajak yang menerima sebesar Rp27,2 miliar dan menolak keberatan sebesar Rp106,8 miliar. Pada tanggal 27 Agustus 2020, Telkomsel menerima sebagian restitusi pajak sebesar Rp27,2 miliar.

Pada tanggal 28 September 2020, Telkomsel mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas PPh Badan, pajak penghasilan, dan PPN tahun 2014. Sampai dengan tanggal persetujuan dan otorisasi untuk penerbitan laporan keuangan ini, pengajuan banding masih dalam proses.

PPH dan PPN Tahun 2015

Pada tanggal 1 Agustus 2019, Telkomsel menerima SKPKB dan STP untuk tahun fiskal 2015 senilai Rp384,8 miliar (termasuk denda Rp128,6 miliar) dan telah dibayar penuh pada tanggal 28 Agustus 2019. Atas nilai tagihan sebesar Rp34,6 miliar dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya dan saldo tersisa senilai Rp350,2 miliar dicatat sebagai tagihan restitusi pajak. Pada tanggal 24 September 2019, Telkomsel mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak senilai Rp350,2 miliar.

Pada tanggal 13 Juli 2020, Telkomsel menerima surat keputusan keberatan dari Otoritas Pajak yang menolak semua keberatan Perusahaan.

Pada tanggal 28 September 2020, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas PPh Badan, pajak penghasilan, dan PPN tahun 2015. Sampai dengan tanggal persetujuan dan otorisasi untuk penerbitan laporan keuangan ini, pengajuan banding masih dalam proses.

PPH dan PPN Tahun 2018

Pada tanggal 20 Februari 2020, Telkomsel menerima surat perintah pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2018. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pemeriksaan pajak masih dalam proses.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Aset dan liabilitas pajak tangguhan

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	(Dibebankan) Dikreditkan ke laporan laba rugi	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya	Dibebankan ke ekuitas dan reklasifikasi	31 Maret 2021
Perusahaan					
Aset pajak tangguhan:					
Provisi penurunan nilai piutang	824	(2)	-	-	822
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala-bersih	1.204	(13)	-	-	1.191
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	414	(60)	-	-	354
Provisi imbalan karyawan	277	25	-	-	302
Pendapatan instalasi tangguhan	119	10	-	-	129
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	23	(1)	-	-	22
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	72	9	-	-	81
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>2.933</u>	<u>(32)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.901</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Penilaian investasi jangka panjang	-	-	-	-	-
Sewa pembiayaan	(3)	-	-	-	(3)
Kapitalisasi biaya kontrak	(90)	5	-	-	(85)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(93)</u>	<u>5</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(88)</u>
Aset pajak tangguhan Perusahaan - bersih	<u>2.840</u>	<u>(27)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.813</u>
Aset pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	<u>507</u>	<u>213</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>720</u>
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>3.347</u>	<u>186</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.533</u>
Telkomsel					
Aset pajak tangguhan:					
Provisi imbalan karyawan	1.079	13	-	-	1.092
Provisi penurunan nilai piutang	282	21	-	-	303
Liabilitas kontrak	-	-	-	-	-
Instrumen keuangan lainnya	575	(362)	-	-	213
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>1.936</u>	<u>(328)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.608</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Sewa pembiayaan	1	-	-	-	1
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(1.523)	(33)	-	-	(1.556)
Amortisasi lisensi	(124)	3	-	-	(121)
Biaya kontrak	-	-	-	-	-
Instrumen keuangan lainnya	(70)	-	-	-	(70)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(1.716)</u>	<u>(30)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1.746)</u>
Liabilitas pajak tangguhan Telkomsel - bersih	<u>220</u>	<u>(358)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(138)</u>
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	<u>(550)</u>	<u>(4)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(554)</u>
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	<u>(330)</u>	<u>(362)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(692)</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

	31 Desember 2019	Dampak penerapan standar baru	Perubahan tarif pajak	(Dibebankan) Dikreditkan ke laporan laba rugi	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya	Dibebankan ke ekuitas dan reklasifikasi	31 Desember 2020
Perusahaan							
Aset pajak tangguhan:							
Provisi penurunan nilai piutang	760	16	(126)	174	-	-	824
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala-bersih	837	-	(158)	(21)	546	-	1.204
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	427	-	32	(45)	-	-	414
Provisi imbalan karyawan	230	-	(12)	59	-	-	277
Pendapatan instalasi tangguhan	92	-	(17)	44	-	-	119
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	19	-	(1)	5	-	-	23
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	75	-	(8)	5	-	-	72
Jumlah aset pajak tangguhan	2.440	16	(290)	221	546	-	2.933
Liabilitas pajak tangguhan:							
Penilaian investasi jangka panjang	(11)	-	1	10	-	-	-
Sewa pembiayaan	(5)	-	1	1	-	-	(3)
Kapitalisasi biaya kontrak	-	(135)	15	30	-	-	(90)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(16)	(135)	17	41	-	-	(93)
Telkomsel							
Aset pajak tangguhan:							
Provisi imbalan karyawan	865	-	(186)	102	298	-	1.079
Provisi penurunan nilai piutang	259	44	(59)	38	-	-	282
Liabilitas kontrak	-	9	(1)	(8)	-	-	-
Instrumen keuangan lainnya	-	191	(109)	493	-	-	575
Jumlah aset pajak tangguhan	1.124	244	(355)	625	298	-	1.936
Liabilitas pajak tangguhan:							
Sewa pembiayaan	(1.099)	1.100	-	-	-	-	1
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(557)	(1.290)	446	(122)	-	-	(1.523)
Amortisasi lisensi	(151)	-	31	(4)	-	-	(124)
Biaya kontrak	-	(27)	3	24	-	-	-
Instrumen keuangan lainnya	-	(5)	-	(65)	-	-	(70)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(1.807)	(222)	480	(167)	-	-	(1.716)
Aset pajak tangguhan Perusahaan - bersih	2.424	(119)	(273)	262	546	-	2.840
Aset / (liabilitas) pajak tangguhan Telkomsel - bersih	(683)	22	125	458	298	-	220
Aset pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	474	(2)	(57)	102	4	(3)	518
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	(547)	7	(6)	(26)	11	-	(561)
Aset pajak tangguhan - bersih	2.215	(99)	(205)	822	848	(3)	3.578
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(547)	7	(6)	(26)	11	-	(561)

Pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, jumlah agregat perbedaan temporer yang terkait dengan investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui adalah masing-masing sebesar Rp35.331 miliar dan Rp32.550 miliar.

Realisasi dari aset pajak tangguhan tergantung kepada kemampuan Grup dalam menghasilkan laba fiskal di masa depan. Meskipun tidak ada jaminan atas realisasi tersebut, Grup yakin bahwa kemungkinan besar aset pajak tangguhan tersebut akan terealisasi melalui pengurangan atas laba fiskal masa depan ketika perbedaan temporer terpulihkan. Jumlah aset pajak tangguhan tersebut diperkirakan dapat terealisasi, namun bisa berkurang jika laba fiskal di masa depan lebih kecil dari pada yang diestimasikan.

g. Administrasi

Sejak tahun 2008 s.d. 2019, secara berturut-turut Perusahaan berhak memperoleh insentif pengurangan tarif pajak sebesar 5% karena telah memenuhi persyaratan sesuai dengan PP No. 81 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 77 tahun 2013 dan diubah terakhir dengan PP No. 56 tahun 2015, serta PMK No. 238/PMK.03/2008. Selanjutnya Perusahaan juga berhak memperoleh insentif pengurangan tarif pajak sebesar 3% karena memenuhi persyaratan sesuai dengan PP No.30/2020. Berdasarkan hal tersebut untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan menghitung pajak tangguhannya dengan menggunakan tarif 19%.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Administrasi (lanjutan)

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa Perusahaan dan entitas anaknya dalam negeri menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, jangka waktu tersebut adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak tetapi tidak lebih dari tahun 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2012 tanggal 6 Juni 2012 sebagaimana telah diubah oleh PMK No. 136/PMK.03/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang penunjukan BUMN untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("PPnBM") yang berlaku efektif pada 1 Juli 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.011/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang penunjukan kembali BUMN sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 34/PMK.010/2017 tanggal 1 Maret 2017. Perusahaan telah melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPnBM serta PPh Pasal 22 sesuai dengan peraturan tersebut.

Pada bulan Mei 2019, Perusahaan ditetapkan sebagai PKP Berisiko Rendah melalui Keputusan DJP No.KEP-00080/WPJ.19/KP.04/2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2018 tanggal 12 April 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 117/PMK.03/2019 tanggal 6 Agustus 2019, maka Perusahaan dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pada masa pandemi COVID-19, Pemerintah senantiasa melakukan *update* terhadap peraturan yang mengatur insentif perpajakan. Pada bulan Juli 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 ("PMK-86/2020") tanggal 16 Juli 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Dalam PMK-86/2020, Pemerintah melakukan perluasan Kode Lapangan Usaha ("KLU") Wajib Pajak yang berhak memanfaatkan insentif perpajakan dan memperpanjang periode insentif sampai dengan Desember 2020. Berdasarkan daftar KLU dalam lampiran PMK-86/2020, KLU Perusahaan termasuk sebagai penerima insentif PPh 21 Karyawan Ditanggung Pemerintah (DTP).

Pada bulan Februari 2021, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021 ("PMK-9/2021"). Melalui PMK-9/2021, Pemerintah memperpanjang periode insentif sampai dengan masa pajak Juni 2021. Dengan demikian, sejak masa pajak Juli 2021 sampai dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan menerapkan PPh 21 karyawan DTP atas karyawan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam PMK-86/2020 sttdt PMK-9/2021.

29. LABA PER SAHAM DASAR

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp6.014 miliar dan Rp5.862 miliar dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sejumlah 99.062.216.600 masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020. Jumlah rata-rata tertimbang juga memperhitungkan rata-rata tertimbang atas dampak transaksi modal saham yang diperoleh kembali dalam perubahan transaksi pembelian saham kembali selama tahun berjalan.

Laba per saham dasar masing-masing sejumlah Rp60,71 dan Rp59,17 (dalam jumlah penuh) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No. 31 tertanggal 19 Juni 2020, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas dan dividen kas spesial untuk tahun buku 2019 masing-masing sebesar Rp11.197 miliar (Rp113,04 per lembar saham) dan Rp4.065 miliar (Rp41,03 per lembar saham).

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Saldo laba dicadangkan Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp15.337 miliar.

31. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA

Rincian liabilitas manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya adalah sebagai berikut:

	<u>Catatan</u>	<u>31 Maret 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya			
Pensiun			
Perusahaan - <i>funded</i>	31a.i.a		
Manfaat pasti	31a.i.a.i	5.668	5.557
Perusahaan - <i>unfunded</i>	31a.i.b	890	962
Telkomsel	31a.ii	3.911	3.852
Lainnya		-	1
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun		<u>10.469</u>	<u>10.372</u>
Imbalan kesehatan pasca kerja	31b	1.485	1.407
Imbalan pasca kerja lainnya	31c	355	367
Imbalan tunjangan masa kerja	31d	15	53
Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	31e	809	777
Jumlah		<u>13.133</u>	<u>12.976</u>

Beban manfaat pensiun yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban pensiun			
Perusahaan - <i>funded</i>	31a.i.a		
Manfaat pasti	31a.i.a.i	173	123
Manfaat tambahan	31a.i.a.ii	-	0
Perusahaan - <i>unfunded</i>	31a.i.b	18	29
Telkomsel	31a.ii	140	110
Beban pensiun berkala, bersih	25	<u>331</u>	<u>262</u>
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala, bersih	25,31b	78	71
Beban imbalan pasca kerja lainnya	25,31c	6	6
Beban imbalan tunjangan masa kerja	25,31d	1	-
Beban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	25,31e	34	40
Jumlah		<u>450</u>	<u>379</u>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun

i. Perusahaan

a. *Funded*

i. Manfaat pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan tetap yang mulai bekerja sebelum 1 Juli 2002. Program pensiun ini diatur didalam undang-undang pensiun Indonesia dan dikelola oleh Dana Pensiun Telkom (“Dapen”). Pengelolaan Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun dan Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri dilaksanakan oleh Dewan Pengurus. Dewan Pengurus diawasi oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari perwakilan Perusahaan dan peserta.

Manfaat pensiun yang dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok pada saat mulai pensiun dan masa kerja karyawan. Karyawan yang ikut serta dalam program pensiun ini membayar kontribusi 18% (sebelum Maret 2003: 8,4%) dari gaji pokok ke dana pensiun. Perusahaan memberikan kontribusi kepada Dapen untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp62 miliar dan Rp205 miliar.

Risiko yang terekspos pada program manfaat pasti adalah risiko seperti volatilitas aset dan perubahan imbal hasil obligasi. Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah, jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program. Penurunan imbal hasil obligasi pemerintah akan meningkatkan liabilitas program, walaupun hal ini akan saling hapus secara sebagian dengan kenaikan dari nilai obligasi program yang dimiliki. Perusahaan memastikan bahwa posisi investasi telah diatur dalam kerangka *asset-liability matching* (“ALM”) yang telah dibentuk untuk mencapai hasil jangka panjang yang sejalan dengan liabilitas pada program pensiun imbalan pasti. Dalam kerangka ALM, tujuan Perusahaan adalah untuk menyesuaikan aset-aset dan liabilitas pensiun dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik dalam menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal, dengan mempertimbangkan tingkat risikonya. Investasi pada program telah terdiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun, dan jumlah bersih yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 untuk program pensiun manfaat pasti:

	<u>31 Maret 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Perubahan liabilitas manfaat pensiun		
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	25.103	22.061
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	67	260
Beban bunga	394	1.544
Kontribusi peserta program pensiun	6	27
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(635)	2.741
Pembayaran pensiun	(418)	(1.530)
Beban tambahan manfaat kesejahteraan	-	80
Pembayaran oleh Perusahaan	-	(80)
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir periode	<u>24.517</u>	<u>25.103</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

i. Manfaat pasti (lanjutan)

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Perubahan aset program pensiun		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	19.546	19.723
Pendapatan bunga	306	1.383
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(635)	(201)
Kontribusi pemberi kerja	62	205
Kontribusi peserta program pensiun	6	27
Pembayaran pensiun	(418)	(1.530)
Beban administrasi program	(18)	(61)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir periode	18.849	19.546
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	5.668	5.557

Pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, aset program terdiri dari:

	31 Maret 2021		31 Desember 2020	
	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian
Kas dan setara kas	530	-	426	-
Instrumen ekuitas:				
Keuangan	1.430	-	2.340	-
Barang konsumen	798	-	21	-
Infrastruktur, peralatan dan transportasi	579	-	540	-
Perdagangan, jasa dan investasi	303	-	336	-
Konstruksi, properti dan real estate	302	-	303	-
Tambang	215	-	229	-
Industri dasar dan bahan kimia	194	-	290	-
Agrikultur	45	-	62	-
Industri lainnya	215	-	246	-
Reksadana berbasis saham	510	-	678	-
Instrumen keuangan pendapatan tetap:				
Obligasi korporasi	-	6.147	-	6.208
Obligasi pemerintah	6.582	-	6.821	-
Reksadana	162	-	181	-
Saham non publik:				
Penempatan langsung	-	342	-	342
Properti	-	183	-	185
Lainnya	-	311	-	338
Jumlah	11.865	6.983	12.473	7.073

Aset program pensiun termasuk didalamnya saham Seri B yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar Rp358 miliar dan Rp338 miliar, yang mewakili 1,90% dan 1,73% dari total aset program pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, dan obligasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar masing-masing senilai Rp344 miliar dan Rp352 miliar mewakili masing-masing 1,82% dan 1,80% dari total aset per tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

i. Manfaat pasti (lanjutan)

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp(379) miliar dan Rp1.121 miliar masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 14 Januari 2014 mengenai kebijakan pendanaan Dapen, Perusahaan tidak akan memberikan kontribusi ke Dapen bila Rasio Kecukupan Pendanaan (RKD) Dapen diatas 105%. Berdasarkan laporan keuangan Dapen pada tanggal 31 Maret 2021, RKD Dapen dibawah 105% sehingga Perusahaan akan memberikan kontribusi pemberi kerja ke program pensiun manfaat pasti di tahun 2021.

Pada tahun 2020, Perusahaan memberikan manfaat kesejahteraan tambahan kepada Pensiunan dan penerima manfaat pensiun dari peserta yang memasuki masa pensiun sebelum 30 Juni 2002 dengan total sebesar Rp80 miliar.

Perubahan liabilitas diestimasi manfaat pensiun untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun (beban manfaat pensiun dibayar di muka) pada awal tahun	5.557	2.338
Beban pensiun berkala bersih	173	562
Kontribusi pemberi kerja (Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(62)	(205)
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(635)	2.741
Pembayaran manfaat oleh Perusahaan	635	201
	-	(80)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	<u>5.668</u>	<u>5.557</u>

Komponen beban pensiun berkala bersih untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban jasa	67	65
Beban administrasi program	18	18
Beban bunga bersih	88	40
Beban pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada entitas anak	<u>173</u>	<u>123</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSIIAN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

i. Manfaat pasti (lanjutan)

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Laba aktuarial yang diakui pada periode berjalan	(635)	(2,292)
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	635	2,292
Jumlah bersih	<u>-</u>	<u>-</u>

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, pada laporan masing-masing tertanggal 8 April 2021 dan 20 April 2020 yang dilakukan oleh PT Towers Watson Purbajaga ("TWP"), aktuaris independen yang berasosiasi dengan Willis Towers Watson ("WTW") (dahulu Towers Watson). Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Tingkat diskonto	6,50%	7,25%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2011

ii. Manfaat tambahan

Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 7 Juni 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dapen, Perusahaan membentuk dana manfaat tambahan yang bersumber dari hasil pengembangan program pensiun paling banyak 10%, dengan ketentuan Rasio Kecukupan Dana ("RKD") diatas 105% dan tingkat pengembalian investasi diatas suku bunga aktuarial untuk pendanaan.

Aset program untuk manfaat tambahan telah disisihkan sejak 2018 sesuai persetujuan Dewan Pengawas. Pada tanggal 31 Maret 2021, kewajiban manfaat tambahan telah dilunasi sepenuhnya kepada penerima pensiun dan tidak ada kewajiban tambahan yang disisihkan karena persyaratan pengakuan manfaat tambahan sebagaimana tersebut di atas belum terpenuhi.

b. *Unfunded*

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan dan program pensiun iuran pasti untuk karyawannya.

Program pensiun iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"). Kontribusi Perusahaan kepada DPLK dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji karyawan dimana untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp11 miliar dan Rp41 miliar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

b. *Unfunded* (lanjutan)

Sejak tahun 2007, Perusahaan memberlakukan manfaat pensiun berdasarkan penyeragaman bagi peserta sebelum 20 April 1992 dan peserta sejak 20 April 1992 yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun dihitung sejak 1 Februari 2009. Pada tahun 2010, Perusahaan menggantikan penyeragaman dengan Manfaat Pensiun Sekaligus ("MPS"). MPS diberikan bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun, kematian, atau cacat sejak 1 Februari 2009.

Perusahaan juga menyelenggarakan manfaat bagi karyawan yang akan memasuki masa persiapan pensiun, dimana karyawan tidak aktif selama periode 6 bulan sebelum mencapai usia pensiun yakni 56 tahun yang disebut dengan Masa Persiapan Pensiun ("MPP"). Selama periode tersebut, karyawan tetap menerima manfaat-manfaat yang diselenggarakan bagi pegawai aktif, diantaranya termasuk, namun tidak terbatas pada gaji regular, kesehatan, cuti besar, bonus, dan manfaat-manfaat lainnya. Mulai tanggal 1 April 2012, karyawan harus mengajukan permohonan MPP terlebih dahulu dan tanpa permohonan maka dianggap tetap akan bekerja sampai dengan masa pensiun.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan MPS dan MPP untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun tanpa pendanaan pada awal tahun	962	1,479
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	6	28
Beban bunga bersih	12	89
Laba aktuarial diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	(89)
Pembayaran manfaat oleh pemberi kerja	(90)	(545)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun tanpa pendanaan pada akhir periode	890	962

Komponen biaya manfaat pensiun untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Beban jasa	6	7
Beban bunga bersih	12	22
Jumlah beban manfaat pensiun	18	29

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 masing-masing sebesar RpNihil.

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, pada laporan masing-masing tertanggal 8 April 2021 dan 20 April 2020 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Tingkat diskonto	5,25%-6,50%	6,50%-7,25%
Tingkat kenaikan kompensasi	6,10%-8,00%	6,10%-8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2011

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

ii. Telkomsel

Telkomsel menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti bagi karyawannya. Berdasarkan program ini, karyawan berhak atas imbalan pensiun yang ditentukan berdasarkan gaji pokok terakhir atau gaji bersih yang diterima (tidak termasuk tunjangan fungsional) dan masa kerjanya. Program pensiun tersebut dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("Jiwasraya"), perusahaan asuransi jiwa milik negara, melalui suatu kontrak asuransi anuitas. Hingga tahun 2004, karyawan berkontribusi pada program ini sebesar 5% dari gaji pokok bulanan mereka, sementara Telkomsel menanggung sisa besaran kontribusi yang diharuskan menurut program tersebut. Sejak tahun 2005, Telkomsel telah menanggung sepenuhnya besaran kontribusi tersebut.

Pada tahun 2020, kondisi keuangan Jiwasraya yang kurang menguntungkan telah memengaruhi secara negatif kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya kepada Telkomsel. Sebagai akibatnya, Jiwasraya dan Telkomsel menyepakati untuk merestrukturisasi program pensiun Telkomsel melalui penghentian program yang ada dan menetapkan suatu program baru dengan nilai imbalan yang dijamin sebesar Rp799 miliar pada tanggal 31 Desember 2020.

Sebagai bagian dari program restrukturisasi Jiwasraya, Indonesia Financial Group ("IFG") didirikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan, antara lain, pengambilalihan program-program Jiwasraya dengan pelanggannya. Setelah IFG beroperasi, imbalan baru yang dijamin tersebut di atas akan dialihkan kepada IFG oleh Jiwasraya dan dikelola dalam bentuk *saving plan* yang diperuntukkan khusus untuk mendanai imbalan pascakerja Telkomsel.

Jumlah kontribusi Telkomsel kepada Jiwasraya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp81 miliar dan Rp53 miliar.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun, dan nilai bersih yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 untuk program pensiun manfaat pasti:

	<u>31 Maret 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Perubahan liabilitas manfaat pensiun		
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	4.651	3.738
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	78	245
Beban bunga	100	278
Rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	1.585
Pembayaran pensiun	-	(50)
Beban jasa akhir	-	(1.145)
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir periode	<u>4.829</u>	<u>4.651</u>
Perubahan aset program pensiun		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	799	1.529
Pendapatan bunga	38	104
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	-	31
Kontribusi pemberi kerja	81	53
Pembayaran pensiun	-	(50)
Kerugian atas penyelesaian	-	(868)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir periode	<u>918</u>	<u>799</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	<u>3.911</u>	<u>3.852</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

ii. Telkomsel (lanjutan)

Perubahan liabilitas diestimasi manfaat pensiun untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

	<u>31 Maret 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada awal tahun	3.852	2.209
Beban manfaat pensiun	140	142
Rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	1.585
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	-	(31)
Kontribusi pemberi kerja	<u>(81)</u>	<u>(53)</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	<u>3.911</u>	<u>3.852</u>

Komponen biaya manfaat pensiun untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban jasa	78	66
Beban bunga bersih	62	44
Jumlah beban manfaat pensiun	<u>140</u>	<u>110</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 masing-masing sebesar RpNihil.

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dengan laporan tertanggal masing-masing 3 Maret 2021 dan 28 Februari 2020 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Tingkat diskonto	6,50%	7,50%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2011

b. Imbalan kesehatan pasca kerja

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan kesehatan pasca kerja untuk semua karyawannya yang sudah bekerja sebelum tanggal 1 November 1995 dengan masa kerja 20 tahun atau lebih pada saat pensiun, dan anggota keluarganya yang memenuhi syarat. Ketentuan untuk masa kerja selama 20 tahun ini tidak berlaku bagi karyawan yang memasuki masa pensiun sebelum tanggal 3 Juni 1995. Program ini tidak berlaku bagi karyawan yang mulai bekerja pada Perusahaan sejak tanggal 1 November 1995. Program jaminan kesehatan pasca kerja tersebut dikelola oleh Yayasan Kesehatan Telkom ("Yakes Telkom").

Program imbalan kesehatan pasca kerja iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 November 1995 atau karyawan dengan masa kerja kurang dari 20 tahun pada saat pensiun. Perusahaan tidak memberikan kontribusi ke Yakes untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja, perubahan aset program imbalan kesehatan pasca kerja, status pendanaan program imbalan kesehatan pasca kerja, dan jumlah bersih yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020:

	<u>31 Maret 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Perubahan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja		
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun	14.443	13.823
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban bunga	239	1.083
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(556)	96
Pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(147)	(559)
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir periode	13.979	14.443
Perubahan aset program		
Nilai wajar aset program pada awal tahun	13.036	12.827
Pendapatan bunga	215	1.004
Pengembalian aset program (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(556)	(62)
Pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(147)	(559)
Beban administrasi program	(54)	(174)
Nilai wajar aset program pada akhir periode	12.494	13.036
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir periode	1.485	1.407

Pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, aset program terdiri dari:

	<u>31 Maret 2021</u>		<u>31 Desember 2020</u>	
	<u>Harga kuotasian di pasar aktif</u>	<u>Tidak memiliki harga kuotasian</u>	<u>Harga kuotasian di pasar aktif</u>	<u>Tidak memiliki harga kuotasian</u>
Kas dan setara kas	647	-	745	-
Saham publik:				
Industri keuangan	1.142	-	1.191	-
Manufaktur dan konsumen	796	-	799	-
Infrastruktur dan telekomunikasi	333	-	344	-
Konstruksi	201	-	219	-
Tambang	186	-	199	-
Grosir	173	-	218	-
Industri lainnya:				
Jasa	90	-	99	-
Bioteknologi dan industri farmasi	92	-	96	-
Agrikultur	35	-	45	-
Lainnya	1	-	1	-
Reksadana berbasis ekuitas	500	-	519	-
Instrumen keuangan pendapatan tetap:				
Reksadana pendapatan tetap	7.953	-	8.239	-
Saham non-publik:				
Penempatan privat	-	345	-	322
Jumlah	12.149	345	12.714	322

Aset program Yakes juga termasuk saham Seri B yang diterbitkan Perusahaan dengan nilai wajar sebesar Rp254 miliar dan Rp246 miliar yang merupakan 2,03% dan 1,88% dari keseluruhan aset program masing-masing pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan)

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp(396) miliar dan Rp768 miliar masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Perubahan liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

	<u>31 Maret 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun	1.407	996
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala (Laba) rugi aktuarial yang diakui di penghasilan komprehensif lainnya	78	253
	(556)	96
Pengembalian aset program (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	556	62
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir periode	<u>1.485</u>	<u>1.407</u>

Komponen beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban administrasi program	54	51
Beban bunga bersih	24	20
Jumlah beban imbalan kesehatan pasca kerja	<u>78</u>	<u>71</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada periode berjalan	(556)	1,669
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	556	(1,669)
Jumlah bersih	<u>-</u>	<u>-</u>

Penilaian aktuarial untuk program imbalan kesehatan pasca kerja dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 pada laporan masing-masing tertanggal 8 April 2021 dan 20 April 2020 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Tingkat diskonto	6,75%	8,00%
Tingkat pertumbuhan beban kesehatan untuk tahun depan	7,00%	7,00%
Tingkat tren beban kesehatan	7,00%	7,00%
Tahun tingkat tren beban kesehatan tercapai	2020	2019
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2011

c. Imbalan pasca kerja lainnya

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja lainnya dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan pada saat karyawan pensiun atau saat pemutusan hubungan kerja atau meninggal dunia. Imbalan pasca kerja lainnya tersebut adalah Biaya Fasilitas Perumahan Terakhir ("BFPT") dan Biaya Perjalanan Pensiun dan Purnabhakti ("BPP") dan Pesangon Meninggal Dunia ("Pesangon MD"). Pesangon MD diberikan kepada karyawan yang meninggal dunia dengan besaran sebanyak 12 kali gaji terakhir.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

c. Imbalan pasca kerja lainnya (lanjutan)

Perubahan liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

	<u>31 Maret 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya pada awal tahun	367	366
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa kini	2	4
Beban bunga bersih	4	19
Beban jasa lalu - amandemen program	-	58
Rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	15
Pembayaran manfaat oleh Perusahaan	(18)	(95)
Liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya pada akhir periode	<u>355</u>	<u>367</u>

Komponen beban imbalan pasca kerja lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban jasa	2	1
Beban bunga bersih	4	5
Jumlah beban imbalan pasca kerja lainnya	<u>6</u>	<u>6</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 masing-masing sebesar RpNihil.

Penilaian aktuarial untuk program imbalan pasca kerja lainnya dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, pada laporan masing-masing tertanggal 8 April 2020 dan 20 April 2020 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Tingkat diskonto	5,00%	6,25%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2011

d. Imbalan khusus masa kerja

Perusahaan memberikan Tunjangan Khusus Masa Kerja kepada karyawan dengan kriteria karyawan yang diangkat sebelum 1 Juli 2002 dan memiliki masa kerja lebih dari 30 tahun serta berakhir hubungan kerja setelah 19 September 2019. Jumlah tercatat kewajiban imbalan khusus masa kerja pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp15 miliar dan Rp53 miliar. Beban tunjangan masa kerja yang dibebankan adalah sebesar Rp1 miliar dan RpNihil masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020.

e. Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, Perusahaan dan entitas anak diharuskan untuk memberikan manfaat pensiun minimum, jika belum dipenuhi oleh program pensiun yang diselenggarakan, kepada para karyawannya yang mencapai usia pensiun. Jumlah tercatat kewajiban tambahan ini pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp809 miliar dan Rp777 miliar. Beban pensiun yang dibebankan adalah sebesar Rp34 miliar dan Rp40 miliar masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 (Catatan 25).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

f. Profil jatuh tempo atas liabilitas manfaat pasti

Waktu perkiraan pembayaran manfaat dan rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti untuk 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut (dalam miliaran Rupiah):

Jangka waktu	Perkiraan pembayaran manfaat					
	Perusahaan			Telkomsel	Imbalan kesehatan pasca kerja	Imbalan pasca kerja lainnya
	Manfaat pasti	Manfaat tambahan	Unfunded			
31 Maret 2021						
Dalam 10 tahun kedepan	18.496	-	970	3.795	5.502	400
Dalam 10-20 tahun	21.775	-	94	10.620	6.778	102
Dalam 20-30 tahun	19.869	-	77	8.203	5.575	78
Dalam 30-40 tahun	14.599	-	20	1.035	2.479	4
Dalam 40-50 tahun	3.278	-	-	-	398	-
Dalam 50-60 tahun	378	-	-	-	6	-
Dalam 60-70 tahun	23	-	-	-	-	-
Dalam 70-80 tahun	-	-	-	-	-	-
Rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti	10,48 tahun	10,48 tahun	5,76 tahun	11,00 tahun	15,14 tahun	7,21 tahun
31 Desember 2020						
Dalam 10 tahun kedepan	18.913	-	1.061	3.795	5.649	417
Dalam 10-20 tahun	21.775	-	94	10.620	6.778	102
Dalam 20-30 tahun	19.869	-	77	8.203	5.575	78
Dalam 30-40 tahun	14.599	-	20	1.035	2.479	4
Dalam 40-50 tahun	3.278	-	-	-	398	-
Dalam 50-60 tahun	378	-	-	-	6	-
Dalam 60-70 tahun	23	-	-	-	-	-
Dalam 70-80 tahun	-	-	-	-	-	-
Rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti	10,48 tahun	10,48 tahun	5,76 tahun	11,00 tahun	15,14 tahun	7,21 tahun

g. Analisis sensitivitas

Perubahan 1% pada tingkat diskonto dan tingkat gaji akan memberikan dampak pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 atas liabilitas manfaat pasti sebagai berikut:

Sensitivitas	Tingkat diskonto		Tingkat gaji	
	Peningkatan 1%	Penurunan 1%	Peningkatan 1%	Penurunan 1%
	Jumlah peningkatan (penurunan)		Jumlah peningkatan (penurunan)	
31 Maret 2021				
Didanai:				
Manfaat pasti	(2.251)	2.690	1.692	(1.511)
Tidak didanai	(35)	27	29	(38)
Telkomsel	(489)	526	513	(481)
Imbalan kesehatan pasca kerja	(1.749)	2.264	2.176	(1.784)
Imbalan pasca kerja lainnya	(14)	16	-	-
31 Desember 2020				
Didanai:				
Manfaat pasti	(2.305)	2.754	1.733	(1.547)
Tidak didanai	(36)	28	30	(39)
Telkomsel	(471)	507	494	(463)
Imbalan kesehatan pasca kerja	(1.807)	2.339	2.248	(1.844)
Imbalan pasca kerja lainnya	(15)	17	-	-

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

g. Analisis sensitivitas (lanjutan)

Analisis sensitivitas dilakukan dengan menggunakan metode yang mengekstrapolasi dampak atas liabilitas manfaat pasti sebagai akibat perubahan atas asumsi utama yang muncul pada akhir periode pelaporan.

Hasil sensitivitas tersebut diatas menentukan dampak secara individu atas liabilitas manfaat pasti masing-masing program pada akhir tahun. Dalam kenyataannya, setiap program bergantung pada beberapa hal lain eksternal yang dapat menyebabkan liabilitas manfaat pasti bergerak baik searah maupun berlawanan, dan sensitivitas setiap program dapat berubah secara bervariasi dari waktu ke waktu.

Tidak terdapat perubahan metode dan asumsi yang digunakan dalam menghitung analisis sensitivitas dari periode sebelumnya.

32. PENGHARGAAN MASA KERJA (“LONG SERVICE AWARDS” atau “LSA”)

Telkomsel dan Telkomsat memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu, termasuk LSA dan *Long Service Leaves* (“LSL”). LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu.

Liabilitas yang timbul sehubungan dengan penghargaan ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*, sebesar Rp1.252 miliar dan Rp1.254 miliar masing-masing pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020. Manfaat yang dibebankan adalah sebesar Rp43 miliar masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 (Catatan 25).

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi

Rincian hubungan dan sifat akun/transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan adalah sebagai berikut:

<u>Pihak Berelasi</u>	<u>Hubungan</u>	<u>Sifat Saldo Akun/ Transaksi</u>
Pemerintah Menteri Keuangan	Pemegang saham utama	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, biaya pendanaan, dan investasi pada instrumen keuangan
BUMN	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban operasi, dan pembelian aset tetap
Indosat	Entitas sependengali	Pendapatan interkoneksi, pendapatan sewa jaringan, pendapatan atas penggunaan satelit transponder, beban interkoneksi, beban penggunaan fasilitas telekomunikasi, beban operasional dan pemeliharaan, dan beban atas penggunaan data jaringan sistem komunikasi
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
Bank milik negara Bank Mandiri	Entitas sependengali Entitas sependengali	Penghasilan pendanaan dan biaya pendanaan Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
BNI	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian hubungan dan sifat akun/transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan adalah sebagai berikut (lanjutan):

Pihak Berelasi	Hubungan	Sifat Saldo Akun/ Transaksi
BRI	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
PT Taspen (Persero) ("Taspen")	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo")	Entitas sependengali	Beban asuransi aset tetap, beban asuransi kecelakaan diri
PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN")	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, dan beban listrik
Bahana TCW	Entitas sependengali	Aset keuangan tersedia untuk dijual dan obligasi
PT Sarana Multi Infrastruktur	Entitas sependengali	Pinjaman lainnya, biaya pendanaan
Tiphone	Entitas asosiasi	Distribusi kartu SIM dan voucher prabayar
Koperasi Pegawai Telkom ("Kopegtel")	Entitas berelasi lainnya	Pembelian aset tetap, pembangunan dan instalasi, beban sewa bangunan, beban sewa mobil, pembelian mobil, pembelian barang dan jasa pembangunan, beban jasa pemeliharaan dan kebersihan, dan bagi hasil pendapatan PBH
Koperasi Pegawai Telkomsel ("Kisel")	Entitas berelasi lainnya	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban sewa mobil, beban pencetakan dan pendistribusian tagihan pelanggan, beban jasa penagihan, beban jasa-jasa lainnya, distribusi kartu SIM dan voucher prabayar, dan pembelian aset tetap
PT Graha Informatika Nusantara ("Gratika")	Entitas berelasi lainnya	Pendapatan jasa jaringan, beban operasi dan pemeliharaan, pembelian aset tetap dan jasa konstruksi, dan distribusi kartu SIM dan voucher prabayar
Direksi	Personil manajemen kunci	Gaji dan fasilitas
Komisaris	Personil pengawas	Gaji dan fasilitas

Jumlah saldo dari piutang dan utang usaha pada akhir tahun bebas dari bunga dan penyelesaiannya akan terjadi dalam bentuk kas. Tidak ada jaminan yang disediakan atau diterima untuk setiap piutang dan utang usaha dengan pihak berelasi. Pada tanggal 31 Maret 2021, Grup mencatat kerugian penurunan nilai piutang usaha dari pihak berelasi sebesar Rp113 miliar. Penilaian ini dilakukan di setiap tahun dengan menilai status masa kini dari piutang yang ada dan historis penagihan piutang yang lalu.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi

	2021		2020	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
PENDAPATAN				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	1	0,00	44	0,13
Entitas sependengali				
Indosat	312	0,92	285	0,83
Pertamina	151	0,44	67	0,20
BNI	133	0,39	33	0,10
BRI	109	0,32	91	0,27
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	408	1,20	456	1,33
Sub-jumlah	1.113	3,27	932	2,73
Entitas berelasi lainnya	50	0,15	21	0,06
Entitas asosiasi	6	0,02	12	0,04
Jumlah	1.170	3,44	1.009	2,96

	2021		2020	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
BEBAN				
Entitas sependengali				
PLN	711	3,17	326	1,46
Indosat	130	0,58	173	0,78
Jasindo	79	0,35	75	0,34
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	27	0,12	20	0,09
Sub-jumlah	947	4,22	594	2,67
Entitas berelasi lainnya				
Kopegtel	221	0,99	218	0,98
Kisel	140	0,62	26	0,12
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	63	0,28	56	0,25
Sub-jumlah	424	1,89	300	1,35
Entitas asosiasi				
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	85	0,38	42	0,19
Jumlah	1.456	6,49	936	4,21

	2021		2020	
	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan
Penghasilan pendanaan				
Entitas sependengali				
Bank milik negara	98	64,05	162	73,97
Jumlah	98	64,05	162	73,97

	2021		2020	
	Jumlah	% terhadap jumlah biaya pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah biaya pendanaan
Biaya pendanaan				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	5	0,51	8	0,66
Entitas sependengali				
Bank milik negara	251	25,56	239	19,67
Sarana Multi Infrastruktur	69	7,03	76	6,26
Jumlah	325	33,10	323	26,59

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

	2021		2020	
	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian
Pembelian aset tetap				
Entitas sepengendali	3	0,05	13	0,35
Entitas berelasi lainnya	38	0,66	32	0,87
Jumlah	41	0,71	45	1,22
	2021		2020	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
Distribusi kartu SIM dan voucher				
Entitas berelasi lainnya				
Kisel	1.673	4,93	1.489	4,35
Gratika	90	0,27	103	0,30
Sub-jumlah	1.763	5,20	1.592	4,65
Entitas asosiasi				
Tiphone	207	0,61	1.073	3,14
Jumlah	1.970	5,81	2.665	7,79

c. Saldo akun dengan pihak berelasi

	31 Maret 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah	% terhadap jumlah aset	Jumlah	% terhadap jumlah aset
Kas dan setara kas (Catatan 3)	23.575	9,14	14.745	5,97
Aset keuangan lancar lainnya (Catatan 4)	1.059	0,41	1.108	0,45
Piutang usaha - bersih (Catatan 5)	1.473	0,57	1.644	0,67
Aset kontrak				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	49	0,02	49	0,02
Entitas sepengendali				
Taspen	170	0,07	165	0,07
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	467	0,18	376	0,15
Sub-jumlah	637	0,25	541	0,22
Entitas asosiasi	1	0,00	1	0,00
Entitas berelasi lainnya	7	0,00	8	0,00
Jumlah	694	0,27	599	0,24
Aset lancar lainnya	140	0,05	209	0,08
Aset tidak lancar lainnya	60	0,02	29	0,01

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

c. Saldo akun dengan pihak berelasi (lanjutan)

	31 Maret 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas
Utang usaha (Catatan 16)				
Pemegang saham utama				
Menteri Keuangan	25	0,02	1	0,00
Entitas sepengendali				
BUMN	187	0,14	337	0,27
Indosat	178	0,14	31	0,02
Lain-lain	8	0,01	17	0,01
Sub-jumlah	373	0,29	385	0,30
Entitas berelasi lainnya				
Kopegstel	178	0,14	307	0,24
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	298	0,23	235	0,19
Sub-jumlah	476	0,37	542	0,43
Jumlah	874	0,68	928	0,73
Beban yang masih harus dibayar				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	7	0,01	4	0,00
Entitas sepengendali				
BUMN	108	0,08	98	0,08
Bank milik negara	49	0,04	40	0,03
Lain-lain	6	0,00	6	0,00
Sub-jumlah	163	0,12	144	0,11
Entitas berelasi lainnya	76	0,06	77	0,06
Jumlah	246	0,19	225	0,17
Liabilitas kontrak				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	98	0,08	97	0,08
Entitas sepengendali				
BUMN	366	0,28	350	0,28
Lain-lain	2	0,00	3	0,00
Sub-jumlah	368	0,28	353	0,28
Entitas asosiasi	1	0,00	1	0,00
Entitas berelasi lainnya	5	0,00	5	0,00
Jumlah	472	0,36	456	0,36
Deposit pada pelanggan	19	0,01	19	0,02
Utang bank jangka pendek (Catatan 19)	5.673	4,37	3.797	3,01
Pinjaman penerusan (Catatan 20a)	521	0,40	568	0,45
Utang bank jangka Panjang (Catatan 20c)	16.774	12,91	17.026	13,51
Pinjaman lainnya (Catatan 20d)	3.234	2,49	3.645	2,89

d. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi

i. Pemerintah

Perusahaan memperoleh pinjaman penerusan dari Pemerintah (Catatan 20a).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

d. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

ii. Indosat

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada masyarakat.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian interkoneksi dengan Indosat antara jaringan telepon tidak bergerak ("*Public Switched Telephone Network*" atau "PSTN") milik Perusahaan dan jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dalam rangka penyelenggaraan jasa Indosat *Multimedia Mobile* serta penyelesaian hak dan liabilitas interkoneksi terkait.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk interkoneksi jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dengan PSTN Perusahaan, yang memungkinkan pelanggan masing-masing perusahaan untuk melakukan panggilan domestik antara jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dan jaringan tidak bergerak Perusahaan, serta memungkinkan pelanggan Indosat untuk mengakses jasa SLI Perusahaan dengan menekan "007".

Perusahaan selama ini menangani pembuatan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan kepada pelanggan untuk Indosat. Indosat secara bertahap akan mengambil alih kegiatan tersebut dan melakukan sendiri penerbitan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan secara langsung. Perusahaan menerima kompensasi dari Indosat yang dihitung sebesar 1% dari jumlah yang ditagih oleh Perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995, ditambah dengan beban pemrosesan tagihan yang ditetapkan sebesar jumlah tertentu untuk setiap data (*record*). Pada tanggal 11 Desember 2008, Perusahaan dan Indosat sepakat untuk memberlakukan tarif biaya layanan SLI, besaran tarif tersebut telah memperhitungkan besaran kompensasi penerbitan kuitansi tagihan dan penagihan. Kesepakatan ini berlaku efektif di tahun berjalan dan berlaku selanjutnya sampai ada Berita Acara Kesepakatan baru.

Pada tanggal 18 Desember 2017, Perusahaan dan Indosat menandatangani amandemen atas perjanjian kerja sama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, Sambungan Langsung Jarak Jauh ("SLJJ"), dan internasional) dan jaringan bergerak dalam rangka implementasi liabilitas tarif berbasis biaya berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 8 tahun 2006. Amandemen ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2018.

Telkomsel juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada pelanggan jaringan bergerak selular GSM.

Perusahaan menyediakan layanan sirkuit langganan kepada Indosat dan entitas anaknya, yaitu PT Indosat Mega Media dan PT Aplikanusa Lintasarta ("*Lintasarta*"). Saluran ini dapat digunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk hubungan telepon, telegraf, data, teleks, faksimili, atau jasa telekomunikasi lainnya.

Pada tanggal 14 Oktober 2019, Dayamitra menandatangani SPA dengan Indosat terkait pembelian menara milik Indosat. Selain itu, disepakati juga penyewaan kembali oleh Indosat atas menara telekomunikasi yang diakuisisi oleh Dayamitra yang ditandai dengan penandatanganan MTLA.

iii. Lain-lain

Kisel adalah koperasi yang didirikan oleh karyawan Telkomsel, bergerak dalam jasa penyewaan kendaraan, percetakan dan distribusi tagihan pelanggan, penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang bermanfaat bagi Telkomsel. Telkomsel juga mengadakan perjanjian penjualan dengan Kisel untuk distribusi kartu SIM dan voucher pulsa isi ulang.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

e. Remunerasi personil manajemen kunci dan pengawas

Personil manajemen kunci adalah Direksi Perusahaan dan personil pengawas adalah Dewan Komisaris.

Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk honor dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris dan imbalan kerja jangka pendek berupa gaji dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Direksi. Jumlah tunjangan tersebut adalah sebagai berikut:

	2021		2020	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
Direksi	69	0,31%	85	0,38%
Dewan Komisaris	29	0,13%	38	0,17%

Jumlah yang disajikan pada tabel diatas adalah jumlah yang diakui sebagai beban selama periode laporan keuangan.

34. SEGMENT OPERASI

Grup memiliki empat segmen utama yang dilaporkan, yaitu *mobile*, *consumer*, *enterprise*, dan WIB. Segmen *mobile* menyediakan produk *mobile voice*, SMS, *value added service*, dan *mobile broadband*. Segmen *consumer* menyediakan jasa Indihome (terdiri dari jasa telepon tidak bergerak, TV berbayar, dan internet), dan jasa telekomunikasi lainnya yang diberikan kepada pelanggan perumahan. Segmen *enterprise* menyediakan solusi *end-to-end* ke pelanggan korporat dan institusional. Segmen WIB menyediakan jasa interkoneksi, sewa sirkuit, satelit, VSAT, *broadband access*, teknologi informasi, data dan jasa internet yang diberikan ke operator telekomunikasi lainnya dan pelanggan internasional. Segmen lain-lain merupakan segmen *digital services* yang tidak memenuhi persyaratan pengungkapan dari laporan segmen ini. Tidak terdapat segmen operasi yang digabungkan dalam menentukan laporan segmen.

Manajemen memantau hasil operasi unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan menilai kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi usaha segmen yang diukur sesuai dengan laba atau rugi usaha dalam laporan keuangan konsolidasian. Namun demikian, kegiatan pendanaan dan pajak penghasilan tidak dievaluasi secara terpisah dan tidak dialokasikan ke segmen operasi.

Pendapatan dan beban segmen meliputi juga transaksi antar segmen operasi dan dinilai sebesar nilai yang dipercaya manajemen untuk merepresentasikan nilai pasar.

	2021					Total segmen	Penyesuaian dan Eliminasi	Jumlah konsolidasian
	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain			
Hasil segmen								
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	20.382	5.973	4.102	3.347	47	33.851	94	33.945
Pendapatan antar segmen	831	215	4.826	4.134	488	10.494	(10.494)	-
Jumlah pendapatan segmen	21.213	6.188	8.928	7.481	535	44.345	(10.400)	33.945
Beban segmen								
Hasil segmen	(13.791)	(4.310)	(9.367)	(5.259)	(477)	(33.204)	10.958	(22.246)
Hasil segmen	7.422	1.878	(439)	2.222	58	11.141	558	11.699
Informasi lain								
Pembelian barang modal	(2.189)	(1.275)	(908)	(1.357)	(1)	(5.730)	(3)	(5.733)
Penyusutan dan amortisasi	(4.311)	(1.060)	(848)	(1.022)	(7)	(7.248)	(38)	(7.286)
Provisi diakui selama periode berjalan	(108)	(177)	(215)	(5)	(3)	(508)	(8)	(516)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

	2020					Total segmen	Penyesuaian dan Eliminasi	Jumlah konsolidasian
	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain			
Hasil segmen								
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	21.573	4.772	4.324	3.359	64	34.092	102	34.194
Pendapatan antar segmen	862	163	4.023	4.261	276	9.585	(9.585)	-
Jumlah pendapatan segmen	22.435	4.935	8.347	7.620	340	43.677	(9.483)	34.194
Beban segmen	(13.290)	(4.076)	(8.231)	(5.979)	(332)	(31.908)	9.643	(22.265)
Hasil segmen	9.145	859	116	1.641	8	11.769	160	11.929
Informasi lain								
Pembelian barang modal	(1.143)	(818)	(610)	(997)	(6)	(3.574)	(91)	(3.665)
Penyusutan dan amortisasi	(4.060)	(890)	(778)	(1.129)	(6)	(6.863)	14	(6.849)
Provisi diakui selama periode berjalan	(241)	(264)	(152)	(9)	(0)	(666)	(24)	(690)

Penyesuaian dan eliminasi:

	2021	2020
Hasil segmen	11.141	11.586
Rugi usaha unit bisnis	(251)	(162)
Eliminasi dan penyesuaian lainnya	809	505
Laba usaha konsolidasi	11.699	11.929

Informasi geografis:

Informasi pendapatan di bawah berdasarkan lokasi unit bisnis.

	2021	2020
Pendapatan eksternal		
Indonesia	32.401	32.531
Luar negeri	1.544	1.663
Jumlah	33.945	34.194

Aset operasional tidak lancar untuk tujuan segmen ini terdiri dari aset tetap dan aset takberwujud.

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Aset operasional tidak lancar		
Indonesia	163.963	164.188
Luar negeri	2.865	3.581
Jumlah	166.828	167.769

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI

Berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000, tarif penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan jenis tarif, struktur, dan dengan mengacu pada formula batasan tarif jasa telekomunikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

a. Tarif telepon tidak bergerak

Pemerintah telah mengeluarkan formula penyesuaian tarif baru yang diatur dalam Peraturan Menkominfo No. 15/PER/M.KOMINFO/4/2008 tanggal 30 April 2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang Disalurkan melalui Jaringan Tetap". Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya No. 09/PER/M.KOMINFO/02/2006.

Berdasarkan peraturan tersebut, struktur tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri dari:

- i. Biaya aktivasi
- ii. Biaya berlangganan
- iii. Biaya penggunaan
- iv. Biaya fasilitas tambahan.

b. Tarif telepon selular

Pada tanggal 7 April 2008, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan melalui Jaringan Bergerak Selular" yang memberikan pedoman untuk menentukan tarif selular dengan formula yang terdiri dari unsur biaya elemen jaringan dan biaya aktivitas layanan *retail*. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya No. 12/PER/M.KOMINFO/02/2006.

Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tanggal 7 April 2008, jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak selular dapat terdiri dari:

- i. Tarif jasa teleponi dasar
 - ii. Tarif jelajah, dan/atau
 - iii. Tarif jasa multimedia,
- dengan struktur tarif sebagai berikut:
- i. Biaya aktivasi
 - ii. Biaya berlangganan bulanan
 - iii. Biaya penggunaan
 - iv. Biaya fasilitas tambahan.

c. Tarif interkoneksi

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("BRTI"), dalam suratnya No. 262/BRTI/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, memutuskan untuk mengubah tarif interkoneksi SMS menjadi berbasis biaya dengan tarif maksimal sebesar Rp23 per SMS efektif sejak tanggal 1 Juni 2012 dan berlaku untuk seluruh operator penyelenggara telekomunikasi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

35. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

c. Tarif interkoneksi (lanjutan)

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 tanggal 30 Januari 2014, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika memutuskan untuk menerapkan tarif interkoneksi baru yang berlaku efektif sejak 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat dievaluasi setiap tahun oleh BRTI. Sebagai tindak lanjut, Perusahaan dan Telkomsel diminta untuk menyampaikan usulan Dokumen Penawaran Interkoneksi ("DPI") kepada BRTI untuk dievaluasi.

Selanjutnya, BRTI melalui suratnya No. 60/BRTI/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 dan No. 125/BRTI/IV/2014 tanggal 24 April 2014 menyetujui revisi DPI Telkomsel dan Perusahaan terkait tarif interkoneksi. Melalui surat tersebut, BRTI juga menyetujui perubahan tarif interkoneksi SMS menjadi Rp24 per SMS.

Pada tanggal 18 Januari 2017, BRTI melalui suratnya No. 20/BRTI/DPI/I/2017 dan No. 21/BRTI/DPI/I/2017, memutuskan untuk tetap memberlakukan tarif interkoneksi sesuai dengan DPI Perusahaan dan Telkomsel tahun 2014 sampai dengan tarif interkoneksi yang baru ditetapkan.

d. Tarif sewa jaringan

Melalui Peraturan Menkominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang "Sewa Jaringan", Pemerintah mengatur bentuk penyediaan, jenis, struktur tarif, dan formula tarif layanan untuk sewa jaringan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menkominfo tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 115 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang "Persetujuan terhadap Dokumen Jenis Layanan Sewa Jaringan, Besaran Tarif Sewa Jaringan, Kapasitas Tersedia Layanan Sewa Jaringan, Kualitas Layanan Sewa Jaringan, dan Prosedur Penyediaan Layanan Sewa Jaringan Tahun 2008 Milik Penyelenggara Dominan Layanan Sewa Jaringan", sebagai persetujuan atas usulan Perusahaan.

e. Tarif jasa lainnya

Tarif sewa satelit, jasa teleponi, dan multimedia lainnya ditentukan oleh penyedia layanan dengan memperhitungkan berbagai pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menetapkan formula tarif untuk layanan teleponi dasar. Tidak ada aturan untuk tarif atas jasa-jasa lainnya.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN

a. Pembelian barang modal

Pada tanggal 31 Maret 2021, jumlah ikatan pembelian barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan dan instalasi untuk keperluan data, internet, dan jasa teknologi dan informatika, selular, peralatan transmisi, dan jaringan kabel adalah sebagai berikut:

Mata uang	Jumlah dalam mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Rupiah	-	8.341
Dolar A.S.	58	841
HKD	105,3	197
Jumlah		9.379

Jumlah di atas termasuk perjanjian-perjanjian signifikan berikut:

(i) Perusahaan

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Perusahaan, TII dan NEC Corporation	12 Mei 2016	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut ("SKKL") <i>Indonesia Global Gateway</i>
Perusahaan dan PT NEC Indonesia	26 Maret 2019	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Radio IP Backhul
Perusahaan dan PT Datacomm Diangraha	12 November 2020	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Ekspan Metro Ethernet <i>Platform</i> Nokia-ALU
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	12 November 2020	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DWDM dan OTN <i>Platform</i> Huawei – OLO MPLS
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	7 Desember 2020	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DWDM dan OTN <i>Platform</i> Huawei - NARU POP
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	11 Desember 2020	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DWDM dan OTN <i>Platform</i> Huawei - OTN SCN
Perusahaan dan PT Lintas Teknologi Indonesia	29 Desember 2020	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DWDM <i>Platform</i> Nokia
Perusahaan dan PT Pembangunan Perumahan	30 Desember 2020	Perjanjian Pengadaan Pembangunan Konstruksi Gedung <i>Hyperscale Data Center</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Pembelian barang modal (lanjutan)

(ii) Telkomsel

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Telkomsel, Amdocs Software Solutions Limited Liability Company, dan PT Application Solutions	8 Februari 2010	Perjanjian <i>Online Charging System</i> ("OCS") and <i>Service Control Points</i> ("SCP") <i>System Solution Development</i>
Telkomsel dan PT Application Solutions	8 Februari 2010	Perjanjian <i>Technical Support</i> untuk Menyediakan Jasa <i>technical support</i> untuk OCS dan SCP
Telkomsel dan PT Huawei Tech Investment	25 Maret 2013	Perjanjian untuk Dukungan Teknik (TSA) untuk Pengadaan <i>Gateway GPRS Support Node</i> ("GGSN") <i>Service Complex</i>
Telkomsel, Wipro Limited, dan PT WT Indonesia	23 April 2013	Perjanjian Pengembangan dan Pengadaan <i>OSDSS Solution</i>
Telkomsel dan PT Ericsson Indonesia	22 Oktober 2013	Perjanjian Pengadaan <i>GGSN Service Complex Rollout</i>
Telkomsel, PT NSNI, NSN Oy, PT Huawei Tech Investment, dan PT ZTE Indonesia	1 Februari 2018	Perjanjian Pengadaan <i>Ultimate Radio Network Infrastructure</i> ROA dan TSA
Telkomsel, PT Dimension Data Indonesia, dan PT Huawei Tech Investment	1 April 2018	Perjanjian Pengadaan <i>Mobile Network Router Infrastructure</i>
Telkomsel, PT Nokia Solutions and Networks Indonesia, dan NSN Oy.	17 April 2008 24 Mei 2019	Perjanjian Pengadaan <i>Combined 2G and 3G CS Core Network Rollout</i> , telah diamandemen menjadi <i>CS Core System</i> ROA dan TSA
Telkomsel, PT Sigma Solusi Integrasi, Oracle Corporation, dan PT Phincon	5 Juli 2019	Perjanjian untuk <i>Development and Rollout Agreement</i> ("DRA") dan Dukungan Teknik pada <i>Customer Relationship Management</i> ("CRM") <i>Solution System Integrator</i>
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, dan Ericsson AB	17 April 2008 16 September 2019	Perjanjian Pengadaan <i>Combined 2G and 3G CS Core Network</i> , telah diamandemen menjadi <i>CS Core System</i> ROA dan TSA

(iii) TII

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Telin Hongkong dan Measat Global Berhad	4 Mei 2016	Pengadaan Jasa Sewa Transponder
Telin Singapore dan LSK Engineering	29 Oktober 2020	Perjanjian Peningkatan Chiller dan Diesel Data Center Telin-3

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya

- (i) Pada tanggal 31 Maret 2021 Perusahaan memiliki fasilitas bank garansi untuk jaminan penawaran (*tender bond*), pelaksanaan (*performance bond*), pemeliharaan (*maintenance bond*), setoran jaminan, dan uang muka (*advance payment bond*) berbagai proyek Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Kreditur	Jumlah fasilitas	Akhir periode fasilitas	Mata uang asal	Fasilitas yang digunakan
BRI	500	14 Maret 2022	Rp	78
BNI	500	31 Maret 2022	Rp	131
Bank Mandiri	500	23 Desember 2021	Rp	157
Jumlah	1.500			366

- (ii) Pada tanggal 31 Maret 2021, Telkomsel memiliki fasilitas bank garansi untuk berbagai macam proyek sebagai berikut:

Kreditur	Jumlah fasilitas	Akhir periode fasilitas	Mata uang asal	Fasilitas yang digunakan
BRI	1.000	25 September 2022	Rp	588
BNI	2.100	11 Desember 2021	Rp	1.037
BCA	150	15 Juli 2021	Rp	-
Jumlah	3.250			1.625

Fasilitas bank garansi dengan BRI dan BNI sebagian besar untuk *performance bond* dan *surety bond of radio frequency* (Catatan 36c.i)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya (lanjutan)

- (iii) TII memiliki fasilitas bank garansi sebesar US\$15 juta atau setara dengan Rp218 miliar dari Bank Mandiri dan telah diperbaharui sesuai dengan adendum IX (kesembilan) pada tanggal 23 Desember 2020 dengan batas kredit maksimum sebesar US\$25 juta atau setara dengan Rp363 miliar. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 23 Desember 2021. Pada tanggal 31 Maret 2021, TII belum menggunakan fasilitas bank garansi tersebut.

c. Lainnya

(i) Penggunaan frekuensi radio

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 tanggal 2 November 2015, yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 76 tanggal 15 Desember 2010, Telkomsel harus membayar biaya penggunaan frekuensi radio tahunan untuk pita frekuensi 800 Megahertz ("MHz"), 900 MHz, dan 1800 MHz ditentukan menggunakan formula yang ditetapkan dalam Peraturan.

Sebagai penerapan atas Peraturan Pemerintah tersebut, Perusahaan dan Telkomsel telah membayar biaya penggunaan frekuensi radio tahunan sejak 2010.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 018/TEL.01.02/2019 Tahun 2019 tanggal 11 Juni 2019 dari Menkominfo yang menggantikan Surat Keputusan No. 1987 Tahun 2017 tanggal 15 November 2017, Menkominfo memberikan wewenang kepada Telkomsel untuk:

1. Layanan telekomunikasi bergerak dengan pita frekuensi radio di 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz; dan
2. Layanan telekomunikasi dasar.

Mengacu pada Surat Keputusan Menkominfo No. 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009, No. 191 Tahun 2013, No. 509 Tahun 2016, No. 1896 Tahun 2017 dan No. 806 Tahun 2019, Telkomsel diharuskan, antara lain untuk:

1. Membayar iuran tahunan Biaya Hak Penyelenggara ("BHP") yang dihitung berdasarkan formula tertentu selama jangka waktu lisensi (10 tahun) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan. BHP terutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPPI. Iuran tahunan BHP terutang sampai dengan berakhirnya periode lisensi.
2. Mengeluarkan setiap tahunnya *performance bond* sebesar Rp20 miliar untuk pita frekuensi 2,1 GHz dan *surety bond* sebesar Rp1,03 triliun untuk pita frekuensi 2,3 GHz (Catatan 36b.ii).

(ii) Pembayaran sewa minimum masa depan sewa operasi

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi yang tidak dapat dibatalkan. Perjanjian tersebut meliputi sewa jaringan, peralatan telekomunikasi serta tanah dan bangunan dengan jangka waktu bervariasi berkisar 1 sampai dengan 10 tahun yang akan berakhir bervariasi antara tahun 2022 hingga 2031. Periode sewa menyewa dapat diperpanjang berdasarkan perjanjian oleh kedua belah pihak.

Jumlah pembayaran dan penerimaan sewa minimum di masa yang akan datang untuk perjanjian sewa operasi adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Kurang dari 1 tahun	2.061	2.012
1-5 tahun	6.012	5.909
Lebih dari 5 tahun	4.352	4.378
Jumlah	<u>12.425</u>	<u>12.299</u>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(iii) KPU

Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No. 17 Tahun 2016 tanggal 26 September 2016 yang menggantikan Surat Keputusan Menkominfo No. 45 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan sebelumnya yang terkait kebijakan program KPU. Peraturan tersebut mengharuskan penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi sebesar 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi (dengan mempertimbangkan piutang tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau beban interkoneksi dan/atau beban ketersambungan dan/atau pendapatan yang tidak diperhitungkan sebagai pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi) untuk pengembangan KPU.

Selanjutnya, Peraturan Menkominfo No. 17 tahun 2016 tanggal 26 September 2016 digantikan dengan Peraturan Menkominfo No. 19 tahun 2016 yang berlaku pada tanggal 4 November 2016. Peraturan tersebut menetapkan bahwa kontribusi pengembangan KPU berlaku efektif untuk tahun 2016 dan seterusnya.

Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 25 tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015, dalam hal penyediaan akses dan layanan telekomunikasi di daerah pedesaan (Program KPU), penyedia dipilih melalui proses seleksi oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika ("BPPPTI"). BPPPTI menggantikan Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan ("BTIP") yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menkominfo No. 18/PER/M.KOMINFO/11/2010 tanggal 19 November 2010. Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 3 tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018, BPPPTI berganti nama menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI"). Berikutnya, Peraturan Menkominfo No. 25 tahun 2015 digantikan dengan Peraturan Menkominfo No. 10 tahun 2018.

Pada tanggal 27 Desember 2011, Telkomsel (atas nama Konsorsium Telkomsel, konsorsium yang dibentuk dengan Dayamitra pada 9 Desember 2011) ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU di daerah perbatasan untuk semua paket (paket 1 - 13) dengan total harga sebesar Rp830 miliar. Pada tanggal tersebut, Telkomsel juga ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU (*Upgrading*) "Desa Pinter" atau "Desa Punya Internet" untuk paket 1, 2, dan 3 dengan total harga sebesar Rp261 miliar.

Pada tahun 2015, program tersebut dihentikan. Pada Januari 2016, Telkomsel mengajukan klaim arbitrase ke BANI terkait penyelesaian dari sisa piutang atas penyelenggaraan program tersebut.

Pada tanggal 22 Juni 2017, Telkomsel menerima surat keputusan BANI No. 792/1/ARB-BANI/2016 yang menginstruksikan BPPPTI untuk membayar kompensasi kepada Telkomsel sebesar Rp217 miliar, dan sampai penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini Telkomsel telah menerima pembayaran dari BAKTI sebesar Rp91 miliar (sebelum pajak) di tahun 2019 dan tidak ada pembayaran tambahan selama tahun 2020.

(iv) Investasi di AKAB

Untuk mempercepat pengembangan bisnis telekomunikasi digital memerlukan kemitraan, sinergi dan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan digital, Telkomsel melakukan investasi di AKAB yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam penerbitan aplikasi (perangkat lunak) berbasis telepon seluler dengan merek dagang Gojek ("Platform Gojek") (Catatan 11). Pada tanggal 16 November 2020, AKAB dan Telkomsel melakukan kolaborasi strategis dengan menetapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam beberapa dokumen perjanjian antara lain:

1. *Collaboration Agreement*/Perjanjian Kolaborasi;
2. *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman;
3. *Option Agreement*/Perjanjian Opsi;
4. *Conversion Side Letter*; dan
5. *Investment Term Sheet*.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM VALUTA ASING

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2021			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	234,77	0,68	13,46	3.612
Aset keuangan lancar lainnya	45,76	-	-	665
Piutang usaha				
Pihak berelasi	0,19	-	0,02	3
Pihak ketiga	206,41	-	7,96	3.123
Piutang lain-lain	0,13	-	0,06	3
Aset lancar lainnya	0,29	-	0,52	12
Aset tidak lancar lainnya	272,94	82,96	14,44	4.150
Jumlah aset	760,49	83,64	36,46	11.568
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(0,08)	-	-	(1)
Pihak ketiga	(157,02)	(3,80)	(3,79)	(2.342)
Utang lain-lain	(2,17)	-	(2,45)	(67)
Biaya yang masih harus dibayar	(58,85)	(172,29)	(0,54)	(889)
Pinjaman bank jangka pendek	(7,23)	-	-	(105)
Uang muka pelanggan	(0,31)	-	-	(5)
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(18,68)	(767,90)	(3,31)	(420)
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(44,23)	(2.303,69)	(22,15)	(1.269)
Liabilitas lainnya	(0,57)	-	-	(8)
Jumlah liabilitas	(289,14)	(3.247,68)	(32,24)	(5.106)
Aset (liabilitas) bersih	471,35	(3.164,04)	4,22	6.462

	31 Desember 2020			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	193,91	0,68	15,34	2.947
Aset keuangan lancar lainnya	57,08	-	-	802
Piutang usaha				
Pihak berelasi	0,73	-	0,03	10
Pihak ketiga	160,56	-	7,15	2.364
Piutang lain-lain	0,38	-	0,15	8
Aset lancar lainnya	-	-	-	-
Aset tidak lancar lainnya	114,37	59,99	9,37	1.747
Jumlah aset	527,03	60,67	32,04	7.878
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(0,02)	-	-	(0)
Pihak ketiga	(142,68)	(21,54)	(6,28)	(2.104)
Utang lain-lain	(3,58)	-	(2,07)	(79)
Biaya yang masih harus dibayar	(52,23)	(10,43)	(1,52)	(759)
Utang bank jangka pendek	(6,17)	-	-	(87)
Uang muka pelanggan	(0,17)	-	-	(2)
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(25,07)	(767,90)	(20,66)	(746)
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(47,54)	(2.303,69)	(6,49)	(1.073)
Liabilitas lainnya	(12,49)	-	-	(176)
Jumlah liabilitas	(289,95)	(3.103,56)	(37,02)	(5.026)
Aset (liabilitas) bersih	237,08	(3.042,89)	(4,98)	2.852

*Aset dan liabilitas dalam mata uang asing disajikan dalam setara Dolar A.S. dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh Reuters pada akhir periode pelaporan.

Aktivitas Grup memiliki kemungkinan terhadap berbagai risiko keuangan termasuk dampak perubahan harga pasar surat utang dan efek, nilai tukar mata uang asing, dan tingkat bunga.

Jika Grup melaporkan aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Maret 2021 menggunakan kurs tanggal 25 Juni 2021, kerugian selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp43 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INSTRUMEN KEUANGAN

a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

i. Klasifikasi

(a) Aset keuangan

	<u>31 Maret 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Biaya perolehan diamortisasi		
Kas dan setara kas	31.729	20.589
Aset keuangan lancar lainnya	1.090	1.194
Piutang usaha, bersih	12.380	11.339
Piutang lain-lain, bersih	278	214
Aset kontrak	1.307	1.239
Aset tidak lancar lainnya	196	215
Nilai wajar melalui laporan laba rugi		
Penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan	4.307	4.045
Aset keuangan lancar lainnya	108	109
Jumlah aset keuangan	<u>51.395</u>	<u>38.944</u>

(b) Liabilitas keuangan

	<u>31 Maret 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi		
Utang usaha dan utang lain-lain	16.722	17.577
Beban yang masih harus dibayar	14.521	14.265
Utang bank jangka pendek	12.191	9.934
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	521	568
Obligasi dan wesel bayar	7.469	7.469
Utang bank jangka panjang	30.575	28.229
Liabilitas sewa	14.018	15.617
Pinjaman lainnya	3.234	3.645
Jumlah liabilitas keuangan	<u>99.251</u>	<u>97.304</u>

ii. Nilai wajar

Tabel dibawah ini menggambarkan perbandingan nilai buku dan nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan, selain dari itu nilai wajar instrumen keuangan dipertimbangkan mendekati nilai buku sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan:

	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar	Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
			Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
31 Maret 2021					
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					
Aset keuangan lancar lainnya	108	108	76	-	32
Penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan	4.307	4.307	-	2.116	2.191
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi					
Pinjaman					
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	521	514	-	-	514
Obligasi dan wesel bayar	7.469	8.361	7.877	-	484
Utang bank jangka panjang	30.575	29.359	-	-	29.359
Liabilitas sewa	14.018	14.018	-	-	14.018
Pinjaman lainnya	3.234	3.225	-	-	3.225
Jumlah	<u>60.232</u>	<u>59.892</u>	<u>7.953</u>	<u>2.116</u>	<u>49.823</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

ii. Nilai wajar (lanjutan)

Tabel dibawah ini menggambarkan perbandingan nilai buku dan nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan, selain dari itu nilai wajar instrumen keuangan dipertimbangkan mendekati nilai buku sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan (lanjutan):

	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar	Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
			Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
31 Desember 2020					
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					
Aset keuangan lancar lainnya	109	109	77	-	32
Penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan	4.045	4.045	-	2.115	1.930
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi					
Pinjaman:					
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	568	575	-	-	575
Obligasi dan wesel bayar	7.469	8.503	8.017	-	486
Utang bank jangka panjang	28.229	28.301	-	-	28.301
Liabilitas sewa	15.617	15.617	-	-	15.617
Pinjaman lainnya	3.645	3.631	-	-	3.631
Liabilitas lainnya	169	169	-	-	169
Jumlah	59.851	60.950	8.094	2.115	50.741

Keuntungan atas pengukuran nilai wajar yang diakui pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 senilai Rp3 miliar. Tidak ada perpindahan antar hirarki nilai wajar selama tahun 2021.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir untuk investasi yang nilai wajarnya diukur dengan input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3) untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah:

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Saldo awal	1.962	1.053
Penyesuaian saldo awal PSAK 71	-	294
Laba yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	3	128
Pembelian/penambahan	300	711
Penjualan/pengurangan	(42)	(224)
Saldo akhir	2.223	1.962

iii. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah jumlah suatu aset dapat ditukarkan, atau suatu liabilitas dapat diselesaikan, antara berbagai pihak secara *arm's length transaction*.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset lancar lainnya, utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, dan utang bank jangka pendek), dan aset tidak lancar lainnya dipertimbangkan mendekati nilai bukunya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka panjang (aset tidak lancar lainnya (piutang jangka panjang dan kas dibatasi penggunaannya) dan liabilitas tidak lancar lainnya) dipertimbangkan mendekati nilai bukunya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

iii. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Grup menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pelaporan dari tiap kelas aset dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- (a) Nilai wajar pada laporan laba rugi, terdiri dari saham, reksadana, obligasi korporasi dan Pemerintah, dan obligasi konversi. Saham dan reksadana yang aktif diperdagangkan di pasar dinyatakan pada nilai wajarnya dengan menggunakan kuotasi harga pasar atau jika tidak dikuotasi, ditentukan menggunakan teknik penilaian. Nilai wajar dari obligasi konversi ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Obligasi korporasi dan Pemerintah dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi harga dari surat berharga yang sejenis pada tanggal pelaporan.
- (b) Nilai wajar liabilitas keuangan jangka panjang diestimasi dengan mendiskontokan arus kas kontraktual masa depan dari tiap liabilitas pada tingkat suku bunga yang ditawarkan kepada Grup untuk liabilitas sejenis yang jatuh temponya bisa diperbandingkan oleh para pelaku bank Grup, kecuali untuk obligasi yang didasarkan pada harga pasar.

Estimasi nilai wajar bersifat *judgmental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

- (a) Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- (b) Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Grup akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Aktivitas Grup mengandung berbagai macam risiko keuangan, seperti risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing, risiko harga pasar, dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Grup bertujuan untuk meminimalkan kerugian atas nilai aset dan liabilitas yang dapat timbul dari pergerakan nilai tukar mata uang asing dan pergerakan tingkat suku bunga. Manajemen mempunyai kebijakan tertulis untuk manajemen risiko valuta asing yang sebagian besar melalui penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk mengantisipasi risiko fluktuasi valuta asing untuk jangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan.

Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh unit *Corporate Finance* di bawah kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Unit *Corporate Finance* mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melakukan aktivitas lindung nilai risiko-risiko keuangan.

i. Risiko nilai tukar mata uang asing

Grup rentan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi penjualan, pembelian, dan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing. Transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing terutama dalam Dolar A.S. dan Yen Jepang. Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing Grup tidak material.

Risiko kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap liabilitas Grup diharapkan dapat saling hapus dengan dampak dari nilai tukar atas deposito berjangka dan piutang dalam mata uang asing yang ditetapkan minimal 25% dari liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing yang terutang.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan Grup terhadap risiko nilai tukar mata uang:

	31 Maret 2021		31 Desember 2020	
	Dolar A.S. (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)	Dolar A.S. (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)
Aset keuangan	0,76	0,08	0,52	0,06
Liabilitas keuangan	(0,29)	(3,25)	(0,29)	(3,10)
Eksposur bersih	0,47	(3,17)	0,23	(3,04)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

i. Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Analisis sensitivitas

Penguatan Dolar A.S. dan Yen Jepang, sebagaimana diindikasikan di bawah, terhadap Rupiah pada 31 Maret 2021 akan menurunkan ekuitas dan laba atau rugi sebesar jumlah yang ditunjukkan di bawah. Analisis ini didasarkan pada varian nilai tukar mata uang asing yang Grup pertimbangkan sebagai sangat mungkin terjadi pada tanggal pelaporan. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya tingkat bunga, tidak berubah.

	Ekuitas/ laba (rugi)
31 Maret 2021	
Dolar A.S. (penguatan 1%)	68
Yen Jepang (penguatan 5%)	(21)

Pelemahan Dolar A.S. dan Yen Jepang terhadap Rupiah pada 31 Maret 2021 akan mempunyai dampak yang setara tetapi berlawanan terhadap jumlah yang ditunjukkan di atas, pada dasar seluruh variabel lain tidak berubah.

ii. Risiko harga pasar

Grup rentan terhadap perubahan dalam harga pasar atas utang dan ekuitas terkait aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya.

Kinerja aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi Grup dimonitor secara berkala, bersama dengan penilaian secara teratur mengenai keterkaitannya dengan rencana strategis jangka panjang Grup.

Pada tanggal 31 Maret 2021, manajemen mempertimbangkan risiko harga untuk aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi adalah tidak material dalam hal dampak yang mungkin terjadi pada laba rugi dan total ekuitas dari perubahan dalam nilai wajar yang sangat mungkin terjadi.

iii. Risiko tingkat suku bunga

Pergerakan tingkat suku bunga diawasi untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan. Pinjaman dalam berbagai tingkat suku bunga menyebabkan Grup terpapar risiko tingkat suku bunga (Catatan 19 dan 20). Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Grup melakukan analisis pada pergerakan margin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

Pada tanggal pelaporan, profil risiko tingkat bunga pinjaman yang dikenakan bunga milik Grup adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Pinjaman bunga tetap	(25.345)	(27.474)
Pinjaman bunga mengambang	(42.663)	(37.988)

Analisis sensitivitas untuk pinjaman bunga mengambang

Pada 31 Maret 2021, penurunan (kenaikan) 25 poin dasar pada tingkat bunga pinjaman bunga mengambang akan menaikkan (menurunkan) ekuitas dan laba atau rugi masing-masing sebesar Rp106,7 miliar. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya nilai tukar mata uang asing, tidak berubah.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iv. Risiko kredit

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Grup:

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Kas dan setara kas	31.729	20.589
Aset keuangan lancar lainnya	1.198	1.303
Piutang usaha, bersih	12.380	11.339
Piutang lain-lain, bersih	278	214
Aset kontrak	1.307	1.239
Aset tidak lancar lainnya	196	215
Jumlah	47.088	34.899

Grup rentan terhadap risiko kredit terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Risiko kredit dikendalikan dengan pengawasan terus menerus atas saldo dan penagihan. Risiko kredit yang berasal dari saldo bank dan institusi keuangan dikelola oleh Grup melalui Unit *Corporate Finance* sesuai dengan kebijakan tertulis dari Grup.

Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank milik pemerintah karena bank milik pemerintah memiliki jaringan cabang terluas di Indonesia dan dipertimbangkan sebagai bank terpercaya. Oleh karena itu, penempatan ini bertujuan untuk meminimalisasi kerugian secara finansial yang berasal dari potensi kegagalan dalam pembayaran dari bank dan institusi keuangan.

Risiko kredit pelanggan dikelola dengan memantau saldo piutang dan penagihannya secara berkala. Piutang usaha dan piutang lain-lain tidak memiliki suatu konsentrasi utama risiko kredit dimana tidak ada saldo piutang pelanggan yang melebihi 3,98% dari piutang usaha dan piutang lain-lain pada tanggal 31 Maret 2021.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk mengawasi dan mempertahankan eksposur risiko kredit yang minimal, dimana Grup telah menyediakan provisi yang memadai untuk menutupi kerugian yang timbul dari piutang yang tidak tertagih berdasarkan data kerugian historis.

v. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Grup mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.

Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dalam upaya pemenuhan liabilitas keuangan Grup. Grup secara terus menerus melakukan analisis untuk mengawasi rasio-rasio likuiditas laporan posisi keuangan, seperti antara lain: rasio lancar dan rasio *debt equity* terhadap persyaratan-persyaratan yang diharuskan perjanjian utang.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

v. Risiko likuiditas (lanjutan)

Berikut adalah analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan:

	Nilai buku tercatat	Arus kas wajib	2022	2023	2024	2025	2026 dan selanjutnya
31 Maret 2021							
Utang usaha dan lain-lain	16.722	(16.722)	(16.722)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	14.521	(14.521)	(14.521)	-	-	-	-
Pinjaman							
Pinjaman penerusan <i>(two-step loans)</i>	521	(556)	(180)	(139)	(134)	(103)	-
Obligasi dan wesel bayar	7.469	(13.860)	(1.221)	(2.635)	(507)	(507)	(8.990)
Utang bank	42.766	(45.994)	(20.363)	(5.170)	(6.516)	(5.587)	(8.358)
Pinjaman lainnya	3.234	(3.677)	(1.257)	(758)	(1.137)	(525)	-
Liabilitas sewa	14.018	(15.993)	(7.191)	(1.725)	(2.151)	(1.872)	(3.054)
Jumlah	99.251	(111.323)	(61.455)	(10.427)	(10.445)	(8.594)	(20.402)

	Nilai buku tercatat	Arus kas wajib	2021	2022	2023	2024	2025 dan selanjutnya
31 Desember 2020							
Utang usaha dan lain-lain	17.577	(17.577)	(17.577)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	14.265	(14.265)	(14.265)	-	-	-	-
Pinjaman							
Pinjaman penerusan <i>(two-step loans)</i>	568	(609)	(204)	(160)	(138)	(107)	-
Obligasi dan wesel bayar	7.469	(14.052)	(1.231)	(2.817)	(507)	(507)	(8.990)
Utang bank	38.163	(42.782)	(19.097)	(6.289)	(5.637)	(4.745)	(7.014)
Pinjaman lainnya	3.645	(4.164)	(1.291)	(1.210)	(1.138)	(525)	-
Liabilitas sewa	15.617	(17.678)	(6.096)	(3.812)	(2.887)	(1.864)	(3.019)
Liabilitas lainnya	169	(199)	(11)	(47)	(47)	(47)	(47)
Jumlah	97.473	(111.326)	(59.772)	(14.335)	(10.354)	(7.795)	(19.070)

Perbedaan antara nilai buku tercatat dengan arus kas wajib merupakan nilai bunga. Nilai bunga dari pinjaman mengambang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga efektif pada tanggal pelaporan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN MODAL

Struktur modal Grup adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah	Bagian	Jumlah	Bagian
Utang jangka pendek	12.191	6,90%	9.934	5,91%
Utang jangka panjang	55.817	31,60%	55.528	33,06%
Total utang	68.008	38,50%	65.462	38,97%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	108.633	61,50%	102.527	61,03%
Jumlah	176.641	100,00%	167.989	100,00%

Tujuan Grup dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Grup guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Secara berkala, Grup melakukan penilaian utang untuk menilai kemungkinan pembiayaan kembali kewajiban yang ada dengan yang baru yang memiliki biaya yang lebih efisien yang akan mengarahkan pada biaya utang yang lebih optimal. Dalam kasus kas menganggur dengan kesempatan investasi terbatas, Grup akan mempertimbangkan membeli kembali saham-sahamnya atau membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

Sebagai tambahan untuk patuh kepada pembatasan-pembatasan utang, Grup juga menjaga struktur modalnya pada tingkat yang diyakini tidak akan membahayakan peringkat kredit dan yang hampir setara dengan pesaingnya.

Rasio utang terhadap ekuitas (perbandingan utang dengan bunga bersih terhadap total ekuitas) adalah rasio yang dimonitor oleh manajemen untuk mengevaluasi struktur modal Grup dan mengkaji efektifitas utang Grup. Grup memonitor tingkat utangnya untuk meyakinkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas sesuai atau dibawah rasio yang ditetapkan dalam pinjaman kontraktual dan bahwa rasio tersebut sebanding atau lebih baik daripada entitas industri telekomunikasi lain dalam area regional.

Rasio utang terhadap ekuitas Grup pada 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Jumlah utang dengan bunga	68.008	65.462
Dikurangi: kas dan setara kas	(31.729)	(20.589)
Utang bersih	36.279	44.873
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	108.633	102.527
Rasio utang bersih terhadap ekuitas	33,40%	43,77%

Sebagaimana disajikan dalam Catatan 20, Grup dipersyaratkan untuk memelihara rasio utang terhadap ekuitas dan rasio *debt service coverage* tertentu oleh pemberi pinjaman. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, Grup sudah memenuhi beberapa persyaratan modal yang telah diberlakukan secara eksternal dengan pengecualian untuk beberapa entitas tertentu di dalam Grup (Catatan 20).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

- a. Aktivitas non-kas investasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Penambahan aset tetap melalui:		
Utang usaha	4.802	5.051
Kapitalisasi bunga	132	22
Penambahan aset hak-guna melalui kewajiban sewa	649	-
Penambahan aset takberwujud melalui:		
Utang usaha	433	568

- b. Perubahan dalam kenaikan liabilitas dari kegiatan pendanaan adalah sebagai berikut:

	<u>1 Januari 2021</u>	<u>Arus kas</u>	<u>Perubahan nontunai</u>			<u>31 Maret 2021</u>
			<u>Perubahan valuta asing</u>	<u>Sewa baru</u>	<u>Perubahan lainnya</u>	
Utang bank jangka pendek	9.934	2.257	-	-	-	12.191
Pinjaman penerusan (<i>two step loan</i>)	568	(35)	(12)	-	-	521
Obligasi dan wesel bayar	7.469	-	-	-	-	7.469
Utang bank jangka panjang	28.229	2.322	25	-	(1)	30.575
Pinjaman lainnya	3.645	(411)	-	-	-	3.234
Kewajiban sewa	15.617	(2.366)	-	649	118	14.018
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	65.462	1.767	13	649	117	68.008

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

- a. Pada bulan April dan Mei 2021, Grup melakukan pelunasan dan penarikan fasilitas pinjaman, sebagai berikut:
- i. Pada tanggal 8 April 2021, Perusahaan melakukan pelunasan pinjaman kepada Bank of China sebesar Rp1.000 miliar.
 - ii. Pada tanggal 23 dan 29 April 2021, Telkomsel melakukan penarikan pinjaman dari MUFG Bank dan BNI masing-masing sebesar Rp1.500 miliar dan Rp1.150 miliar.
 - iii. Pada tanggal 27 April 2021, Perusahaan melakukan penarikan pinjaman dari Sindikasi Bank Mandiri dan BNI sebesar Rp100 miliar.
 - iv. Pada tanggal 7 Mei 2021, Perusahaan melakukan pelunasan pinjaman kepada HSBC sebesar Rp500 miliar.
 - v. Pada tanggal 25 Mei 2021, Telkomsel melakukan penarikan pinjaman dari Bank Mandiri, Bank of China, dan HSBC masing-masing sebesar Rp9.000 miliar, Rp1.000 miliar, dan Rp1.000 miliar.
- b. Pada tanggal 21 Mei 2021, Telkomsel melakukan investasi tambahan kepada AKAB US\$300 juta atau setara dengan Rp4.290 miliar.
- c. Pada tanggal 28 Mei 2021, dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2020, beberapa keputusannya antara lain:
- i. Perusahaan mengumumkan pembagian dividen tunai sebesar Rp12.483 miliar atau Rp126,007 per lembar saham dan dividen spesial sebesar Rp4.161 miliar atau Rp42,002 per lembar saham.
 - ii. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berubah menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/ Komisaris Independen
 Komisaris Independen
 Komisaris Independen
 Komisaris Independen
 Komisaris
 Komisaris
 Komisaris
 Komisaris
 Komisaris

Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro
 Wawan Iriawan
 Bono Daru Adji
 Abdi Negara Nurdin
 Marcelino Rumambo Pandin
 Ismail
 Rizal Mallarangeng
 Isa Rachmatarwata
 Arya Mahendra Sinulingga

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)

- c. Pada tanggal 28 Mei 2021, dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2020, beberapa keputusannya antara lain (lanjutan):

ii. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berubah menjadi sebagai berikut (lanjutan):

Direksi

Direktur Utama	Ririek Adriansyah
Direktur <i>Strategic Portfolio</i>	Budi Setyawan Wijaya
Direktur <i>Enterprise and Business Service</i>	Edi Witjara
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Heri Supriadi
Direktur <i>Network and IT Solution</i>	Herlan Wijanarko
Direktur <i>Wholesale and International Services</i>	Bogi Witjaksono
Direktur <i>Digital Business</i>	Muhamad Fajrin Rasyid
Direktur <i>Human Capital Management</i>	Afriwandi
Direktur <i>Consumer Service</i>	FM Venusiana R

- d. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No.05/KEP/DK/2021 tanggal 8 Juni 2021, susunan keanggotaan komite audit Perusahaan berubah menjadi sebagai berikut:

Ketua/ Komisaris Independen	Bono Daru Adji
Komisaris Independen	Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro
Komisaris Independen	Wawan Iriawan
Komisaris Independen	Abdi Negara Nurdin
<i>Financial Expert</i>	Emmanuel Bambang Suyitno